

**AKSES PENDIDIKAN PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
Islam, Gender dan Politik**



Oleh:

Islamiyatur Rokhmah, S.Ag, M.SI

NIM: 18300016082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Doktor Ilmu Agama Islam
YOGYAKARTA

2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islamiyatur Rokhmah, M.SI

NIM : 18.3000.160.82

Program : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 17 Februari 2021

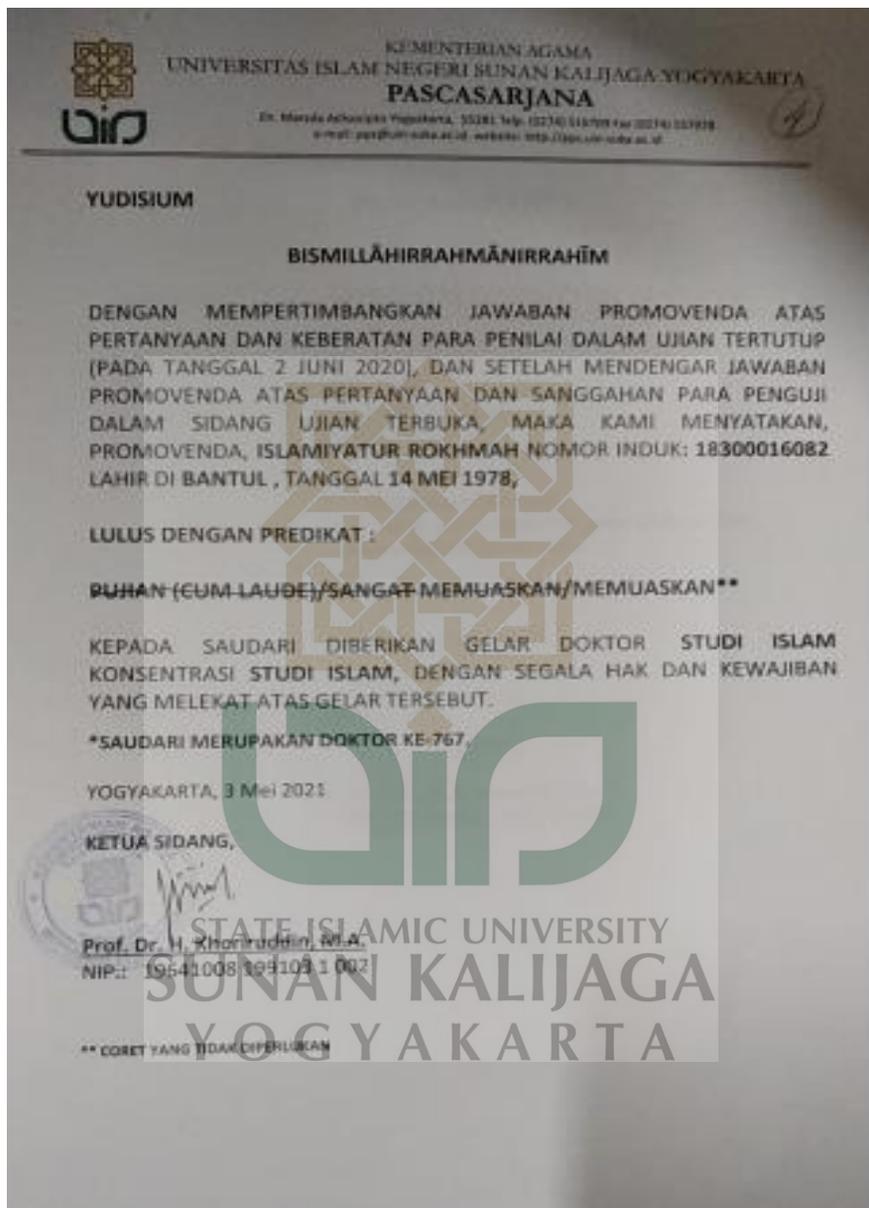
Saya yang menyatakan



Islamiyatur Rokhmah, M.SI

NIM: 18.3000.160.82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jl. Merdeka 64, Sukoharjo Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519703 Fax (0274) 557898
e-mail: pps@uin-suka.ac.id website: http://ppn.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS
PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
Islam, Gender dan Politik
Ditulis oleh : Islamiyatur Rokhmah
NIM : 18300016082
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam
Konzentrasi : Studi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 3 Mei 2021

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Khoriruddin, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
J. Wanda Adhikarya, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512700. Faks. (0274) 569979
 website: http://www.uin-suka.ac.id, email: ppa@uin-suka.ac.id

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Islamiyatur Rokhmah []
 NIM : 18300016082
 Judul Disertasi : AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : Islam, Gender dan Politik

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Khorinuddin, M.A. ([])
 Sekretaris Sidang : Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. ([])
 Anggota :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah (Promotor/Penguji) ([])
2. Rizki, BSW, M.A., Ph.D. (Promotor/Penguji) ([])
3. Dr. Arif Miftahin, M.Ag., M.A.I.S. (Penguji) ([])
4. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. (Penguji) ([])
5. Dr. Muhsin, MSW., M.Ag. (Penguji) ([])
6. Dr. Phd. Dwiwandaningrum, M.Ed. (Penguji) ([])

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021
 Tempat : Aula Lt. 1 Gg. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
 Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
 Hasil / Nilai (IPK) : 3,50
 Predikat Kelulusan : Memuaskan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sekretaris Sidang

 Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.
 NIP. 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah ()

Promotor : Ro'fah, S.Ag, BSW, MA, Ph.D ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS
PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam,
Gender, dan Politik**

yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI
NIM : 18300016082
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2021
Promotor,



Prof. Dr. M. Amin Abdullah
NIP. 95307281983031002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS
PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam,
Gender, dan Politik**

yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI
NIM : 18300016082
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2021
Promotor,



Ro'fah, S.Ag., BSW, MA, Ph.D
NIP : 1972112420011 2 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender, dan Politik**

Yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI
NIM : 18300016082
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Februari 2021
Penguji,



Dr. Arif Maftuhin, M.Ag. M.A
NIP. 197402022001121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender, dan Politik**

yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI

NIM : 18300016082

Program/Prodi : Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Januari 2021

Penguji,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender, dan Politik**

yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI
NIM : 18300016082
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Penguji,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW

NIP: 197105141998031004

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**AKSES PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender, dan Politik**

yang ditulis oleh:

Nama : Islamiyatur Rokmah, S.Ag., MSI
NIM : 18300016082
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 2 Juni 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2021

Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Phil.Dewi Candraningrum, M.Ed



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perempuan penyandang disabilitas mengalami berbagai permasalahan, salah satunya kesulitan dalam memperoleh hak sosial politik khususnya hak mendapatkan akses pendidikan. Hal tersebut dikarenakan mereka mengalami multidiskriminasi, yakni terdiskriminasi karena perempuan (ketidakadilan gender), terdiskriminasi karena kedisabilitasan dan terdiskriminasi karena kemiskinan. Meskipun ada perempuan penyandang disabilitas yang dapat memasuki lembaga pendidikan, namun mayoritas masih pada pendidikan yang levelnya lebih rendah dari perempuan bukan penyandang disabilitas dan masih sangat sulit bagi perempuan penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun structural, secara kultural mempengaruhi pemikiran keluarga dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan sedangkan secara structural kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana pandangan umat Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menafsirkan ayat-ayat disabilitas. Disertasi ini kemudian melihat sejauhmana konstruksi gender mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas dan memaparkan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode snowball sampling dalam pengambilan data, sumber primer adalah perempuan penyandang disabilitas, keluarga, tokoh agama dan aparat pemerintahan, sedangkan sumber data sekunder adalah undang-undang, peraturan-peraturan daerah, kurikulum, data statistik serta data lainnya yang mendukung, dengan metode analisis data triangulasi data. Disertasi ini mengelaborasi titik temu antara konsep keilmuan Islam '*Ulūmu al-Dīn*' ke '*Dirāsāt Islamiyyah*' dengan ilmu sosial yakni gender dan disabilitas dalam menganalisis, yakni mempertemukan analisis *intersection* (irisan antara gender dan disabilitas), *al-Fikr al-Dīn* dan *Dirāsāt Islamiyyah* (konsep berfikir *bayānī burhānī* dan *irfānī*) dan teori model (*medical model/carity model*, *social model* dan *social-relational model*). *Intersection* untuk melihat adanya irisan diskriminasi yang berbasis gender dan disabilitas yang dialami perempuan penyandang disabilitas dipertemukan dengan *al-Fikr al-Dīn* dan *Dirāsāt Islamiyyah* yakni

pendekatan *bayānī burhānī* dan *irfānī* untuk melihat konsep berfikir keluarga muslim dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian dikawinkan dengan teori model yakni pendekatan *medical model/carity model*, *social model* dan *social-relational model* untuk melihat pola advokasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Hasil Penelitian disertasi ini adalah *pertama*, secara struktural pemerintah telah melahirkan kebijakan program dan anggaran bagi perempuan penyandang disabilitas, namun belum terimplementasikan dengan baik, sehingga aksesibilitas khususnya pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas belum terealisasi dengan baik secara *afirmatif*. *Kedua*, pentingnya menyeimbangkan konsep berpikir *bayānī, burhānī* dan *irfānī* untuk dikaji secara terus-menerus oleh para ulama, agar tersosialisasi dengan baik kepada para jamaahnya dalam hal ini bisa jadi jamaahnya adalah para orang tua penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas itu sendiri. *Ketiga*, secara kultural orang tua dan masyarakat belum mendorong dan memotivasi perempuan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, oleh karenanya pentingnya perubahan cara pandang (*worldview*) dalam memaknai *takdir, ikhlas dan nrimo* kepada anak perempuan penyandang disabilitas secara lebih produktif, agar tidak melemahkan mereka namun justru menguatkan anak perempuan penyandang disabilitas agar tetap *struggle* dalam bertahan hidup khususnya dalam memberikan akses pendidikan .

Kata kunci: *pendidikan, perempuan penyandang disabilitas, konsep keilmuan islam, gender, politik*

ABSTRACT

A disabled female seems to have serious problems, one of which deals with socio-political rights, in particular the rights for proper education. Multi-discrimination, gender, disability, and poverty discriminations, may be the reasons behind all of this. Only a few disabled females have a better luck to go to school, even to college. The majority are left in lower education than those of the normal.

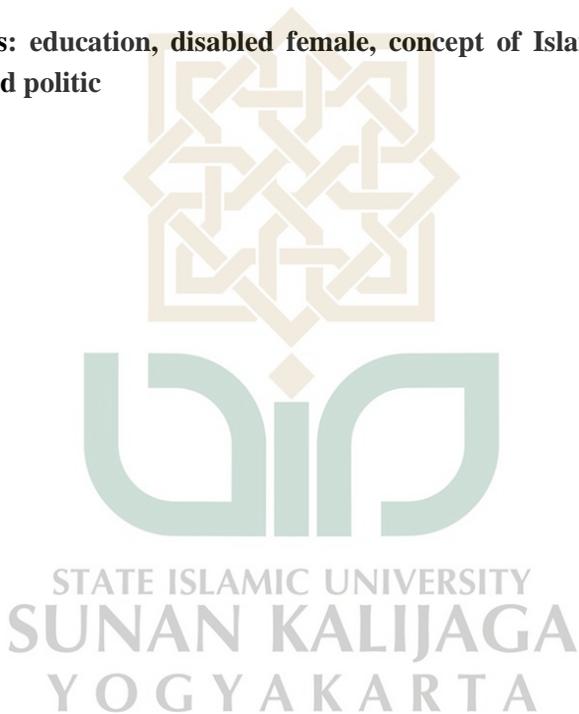
The multi-discrimination towards disabled females are hegemonizing culturally that affects family and the society's thoughts of giving access to education, and structurally that the government's policy does not reflect gender and disabled equality. The implementation of the policy is no different.

This dissertation elaborated the meeting point between Islamic science concept of '*Ulūmu al-Dīn*' to '*Dirāsāt Islamiyyah*' and social science viz. gender and disability when analyzing. It brought together intersection analysis (intersection between gender and disability), *al-Fikr al-Dīn and Dirāsāt Islamiyyah* (the concept of thinking *bayānī burhānī* and *irfānī*) and theory of model (medical model/*carity* model, social model and social-relational model). Used to see if there was a discrimination coincidence on gender and disability basis to disabled females, intersection analysis was brought together with *al-Fikr al-Dīn and Dirāsāt Islamiyyah* that is *bayānī burhānī* and *irfānī* approach to view the concept of thinking of Muslim family and the society in giving disabled female access to education, then unified with the theory of model that is an approach of medical model/*carity* model, social model and social-relational model to see the patterns of advocacy conducted by the stakeholders in giving access to education for disabled females in order to create good governance.

The results of this dissertation research are, first, that the government should not be sufficient to produce policies, but the importance of implementing programs and policies for budgets or unequal budgeting so that accessibility for women with disabilities can be well realized affirmatively. Second, the role of parents and society is very important to encourage and motivate women with disabilities to access

education, interpret destiny, sincerity and non-discrimination as women with disabilities more productively, so as not to weaken children but instead strengthen girls with disabilities to continue to struggle in surviving. life. Third, returning to the concept of thinking of *burhā nī* and *irfā nī* is very strong and becomes a necessity to be studied continuously by the ulama, so that they are well socialized to their congregation, in this case it could be that the congregation is parents with disabilities persons with disabilities themselves.

Key words: education, disabled female, concept of Islamic science, gender, and politic



ملخص

تعاني النساء المعاقات من مشاكل مختلفة، منها صعوبة الحصول على الحقوق الاجتماعية والسياسية، ولا سيما الحق في الحصول على التعليم. هذا لأنهن يتعرضن لتمييز متعدد، أي تمييز بكونهن نساء أي عدم المساواة بين الجنسين، وتمييز بمعاناتهن من الإعاقة والفقير. على الرغم من وجود النساء المعاقات اللاتي يمكنهن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، إلا أن معظمهن لا يزلن في مستوى التعليم الأدنى من النساء غير المعاقات ولا يزلن يواجهن صعوبات الحصول على التعليم الأعلى. يهيمن التمييز المتعدد ضد النساء المعاقات ثقافيا وهيكليا، ويؤثر ثقافيا على التفكير العائلي والاجتماعي في توفير الوصول إلى التعليم، ويؤثر هيكليا أن السياسات التي وضعتها الحكومة لا تستند تماما إلى العدالة بين الجنسين والإعاقة ولم تصاحبها تنفيذ سياسة جيدة.

توضح هذه الأطروحة نقطة الالتقاء بين المفاهيم العلمية للإسلام علوم الدين والدراسات الإسلامية مع العلوم الاجتماعية، تعني الجنس والإعاقة في التحليل، أي جمع التقاطع التحليلي وهو القطع بين الجنس والإعاقة، والفكر الديني، يعني مفهوم التفكير البياني، والبرهاني، والعرفاني، ونظرية نموذجية وهي نموذج طبي/نموذج خيرى، ونموذج اجتماعي، ونموذج العلاقة الاجتماعية. والتقاطع لمعرفة وجود قطع التمييز على أساس الجنس والإعاقة التي تعاني منها النساء المعاقات يُجمع مع الفكر الديني، يعني نهج البياني، والبرهاني، والعرفاني لمعرفة مفهوم تفكير الأسرة المسلمة والمجتمع في توفير الوصول إلى التعليم للنساء المعاقات، ومن ثم الانضمام إلى نظرية نموذجية، وهي نموذج طبي/نموذج خيرى، ونموذج اجتماعي، ونموذج العلاقة الاجتماعية لمعرفة أنماط المدافعة التي يقوم بها أصحاب المصلحة في توفير الوصول إلى التعليم للنساء المعاقات لتشكيل الحكومة الجيدة.

الكلمات المفتاحية : التعليم، النساء المعاقات، مفاهيم علمية للإسلام،

الجنس، الإعاقة، التقاطع

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi arab-latin yang diangkat dari Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	(Koma terbalik)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	ditulis	A
---◌---	Kasrah	ditulis	i
---◌---	Dammah	ditulis	u

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنُنشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Sempurna dan senantiasa melimpahkan nikmat sehat, rizki, dan segala kemudahan pada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. *Ṣolawāt* dan *Salām* semoga senantiasa melimpah kepada Nabi Agung Muhammad saw Sang Pembawa kabar gembira untuk alam semesta ini.

Perjalanan penyelesaian disertasi yang penuh onak dan duri ini pada akhirnya Alhamdulillah dapat tuntas terhitung sampai 10 tahun, pengalaman menjadi perempuan kepala rumah tangga, melahirkan 2 kali selama studi S3 dan berbagai lika liku kehidupan yang dialami penulis mewarnai penyelesaian disertasi ini. Semangat untuk melanjutkan studi adalah merupakan pesan dari Almarhum Muslim Ponidi sebagai bapak saya yang selalu menyemangati putri-putrinya untuk selalu menuntut ilmu dan begitu pula semangat dari ibunda Fatimah. Selain itu dukungan yang paling kuat juga oleh suami tercinta Burhan Marwanto, maka semangat mencari ilmu ini akan saya wariskan kepada putra putri kami Alpin Fathu Nugroho, Rinjani Grace Tsaniah dan Akcencorekta Amadya Akhiroh.

Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penulisan disertasi ini yang tentu banyak peran dan partisipasi dari banyak pihak, maka penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA (Rektor), Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Ahmad Muttaqin, Phd (Wakil Direktur), Ahmad Rafiq, MA., (Kaprodin) Para jajarannya pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.
2. Prof Dr. H.M. Amin Abdullah, dan Ro'fah, BSW.,MA.,Phd selaku Promotor saya yang senantiasa memberikan kesabaran dan keikhlasannya membimbing dan mengarahkan disertasi ini, dalam

keahlian Konsep Studi Islam, Gender dan Disabilitas, serta titik temu antara ketiga pendekatan tersebut. Sehingga penyelesaian disertasi ini dapat terwujud.

3. Prof. Dr. Hji. Marhumah, Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW.,M.Ag., MSW dan Dr. Arif Mahtuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Punguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
4. Ketua PP 'Aisyiyah, Ibu Dr. Dra. Siti Nor Djannah Djohantini, M.E., M.Si yang senantiasa memotivasi dan mendorong saya dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Rektor UNISA Ibu Warsiti., S.Kp., Sp. Mat., M.Kes dan Jajarannya yang senantiasa memotivasi dan menyemangati penyelesaian disertasi ini. LPPI UNISA, ibu Umu Hani, pak Iwan, pak Royan, bu Lina, pak Nurdin dan Mbak Nopik, kemudian tim BAQ mbak Sana, mbak Atik, mbak Umi dll. Tim AIK UNISA bu Irfah, Laily, pak Andi, dll. Sahabat-sahabatku UNISA Ellyda, bu Harni, bu Yekti Ningrum, bu Fitria S Utami, bu Indri, bu Andari, bu Fitria M, bu Diska, dll. Mereka selalu menyemangati dan memotivasi tersusunnya disertasi ini.
6. Bapak Dr. Sumedi dan Dr Hamim Ilyas yang sejak awal memotivasi saya untuk meneruskan studi dan mengambil S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kakak saya Nur Hidayah, M.Sos, dan dua adik saya Muslimah, S.Ag dan Siti Jihadiyah, SE begitupula saudara-saudara ipar saya Abdul Rohman, S.Ag, Y Joko Utama, S.Ag dan Wibowo, ST yang turut menyemangati penyelesaian disertasi saya ini, serta adek saya M Syahrul Akbar Almarhum yang selalu menginspirasi untuk teguh dalam belajar.
8. Mertua saya Bapak Badawi dan ibu Sunindiyati yang dengan sabar dan ikhlas menjaga anak-anak saya ketika saya menyelesaikan disertasi ini, demikian pula adik ipar saya Aris Mustofa, Pugaryati , Yeni Tri Widyati dan Siswoyo.
9. Mbah Prih yang dengan sabar dan setia menjaga anak-anak saya ketika saya tinggal untuk menyelesaikan disertasi ini.

10. LPPA PP ‘Aisyiyah ibu Prof. Dr. Alimatul Qibtiyah, Khusnul Hidayah, M.E, Ibu Siti Syamsyitun, M.A, Ph.D, Dr Witriani, Nur Kamilah, M.Si dan Dwi Wahyuning IF, LL.M kepada teman-teman tim MAMPU PP Aisyiyah pusat yang turut menyemangati selesainya disertasi ini, Ibu Dr.Tri Hastuti Noor Rokhimah, Hajar Nor Setyowati, M.Hum, Bu Nikmah Afidati, SE, Bu Heni Hikmawati, SE. dan teman-teman.
11. Teman-teman JANGER (Peduli Difabel) Dian Ajeng P, Mida M, Rina Astari, Heru Pusito, Syaifullah yang turut menjadi teman diskusi tentang penelitian dan pendampingan bagi komunitas penyandang disabilitas. Teman sedulur Mua’alimat-Muallimin angkatan 96 (Rofiqoh, Wasmiyati, Muttaqin, Miftah, Nuruddin, Sanusi, dll) yang turut mensupport dan memotivasi penyelesaian disertasi ini. Serta semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih. Menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu diharapkan kritik dan saran kepada semua pihak yang dapat membangun disertasi ini menjadi lebih baik dan sempurna. Semoga disertasi ini bermanfaat dan berkontribusi bagi khazanah keilmuan Study Islam di Program S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Penyusun

Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., M.S.I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxxii
DAFTAR GAMBAR	xxxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiv
DAFTAR ISTILAH	xxxv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Telaah Pustaka	16
1. Pendidikan Disabilitas	16
2. Gender dan Disabilitas	19
3. Islam dan Disabilitas	23
E. Kerangka Teori	25
1. Konsep Keilmuan Islam: Dari <i>'Ulūm al-Dīn ke Dirāsāt Islamīyah</i>	25
2. Gender	32
3. Konsep Disabilitas	38
4. Gender, Disabilitas dan <i>Intersection</i>	45
F. Metode Penelitian	51
1. Metode Pengumpulan Data	53

2. Metode Analisis Data	60
G. Sistematika Pembahasan	61

BAB II Dominasi Tafsir Tektual tentang Disabilitas di Kalangan

Muslim Yogyakarta	65
A. Pemahaman Agama <i>Bayānī</i> Tidak Diiringi <i>Burhānī</i> dan <i>Irfānī</i> Menghambat Perempuan Disabilitas dalam Mengakses Pendidikan	66
1. Memaknai Disabilitas sebagai Takdir dan Cobaan	66
2. Konsep Ikhlas dan Hambatan Hak Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas	71
B. Hambatan dan Tantang dalam Membumikan Ayat-ayat Advokasi	78
1. Tema-tema Disabilitas belum menjadi Topik Utama Kajian Tokoh Agama	81
2. Interpretasi Zakat, Infak dan Ṣadaqah untuk Penyandang Disabilitas	88
3. Implementasi Ayat-ayat Advokasi	92

BAB III Konstruksi Gender dan Hambatan Kebebasan Hak

Pendidikan bagi perempuan Penyandang Disabilitas	101
A. Profil Perempuan Penyandang Disabilitas Yogyakarta	101
1. Belum Pernah Merasakan Bangku Sekolah	101
2. Mengenyam Pendidikan Hingga SLTP dan SLTA	105
3. Pendidikan Tinggi Tidak Berguna Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas	111
4. Pasrah terhadap Nasib Sebagai Perempuan Penyandang Disabilitas	114
5. Aku Ingin Seperti Orang Normal	118
B. Perspektif Keluarga dan Masyarakat terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	120
1. Saya Tidak Dianggap Ada	120
2. Disabilitas Sebagai Penghambat Perempuan untuk Menggapai Asa (Sekolah)	124

3.	Pengakuan Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	127
4.	Kegiatan Publik Perempuan Penyandang Disabilitas ..	130
5.	Pendidikan Masih Diskriminatif untuk Penyandang Disabilitas	138
C.	Peran Keluarga dan masyarakat dalam Memberikan Akses Pendidikan Akses Pendidikan	141
1.	Peluang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan Penyandang Disabilitas	141
2.	Menimbang Tingkat Urgensi Pendidikan atau Keterampilan (Vokasi)	146
3.	Menakar Peluang Pekerjaan Laki-laki dan Perempuan Penyandang Disabilitas	152
4.	Keluarga dan Orangtua adalah Motivasi Utama untuk Bangkit dan Bertahan Hidup	156
5.	Wiraswasta menjadi Pilihan Pekerjaan Penyandang Disabilitas	164

BAB IV Peta Gerakan Organisasi Perempuan dan Organisasi Islam terhadap Isu Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 169

A.	Gerakan Penyandang Disabilitas dan Gender	169
1.	Perjuangan Mainstreaming Gender dan Penyandang Disabilitas	169
2.	Jejaring	177
3.	Kendala-kendala	182
B.	Gender dan Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam	186
1.	Pandangan Gender oleh Aktivis (Organisasi) Perempuan Islam	187
2.	Pandangan Aktivis Perempuan (Organisasi Islam) tentang Penyandang Disabilitas	193
3.	Gender dan Penyandang Disabilitas Menurut Tokoh Islam	204
4.	Kebijakan Organisasi Perempuan Islam tentang Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas	209

BAB V Keadilan Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Tata Pemerintahan

yang Baik di DIY	223
A. Kebijakan Pemerintah DIY tentang Disabilitas	224
1. Arah Kebijakan	224
2. Peraturan Perundangan terkait Penyandang Disabilitas di D.I. Yogyakarta	224
3. Peraturan dan Perundangan Terkait Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di DI.Yogyakarta	226
4. Mainstreaming Gender belum mengakar pada Perda Penyandang Disabilitas tentang Pendidikan	231
B. Strategi dan Langkah-Langkah Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas	235
1. Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas Berbasis Sekolah	237
a. Kurikulum	244
b. Sarana dan prasarana Pendidikan	246
c. Transportasi untuk Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Masih Menggantung Asab	247
d. Belum ada Unit Khusus Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan maupun di Dinas Sosial	251
2. Penguatan Sumber Daya Manusia	254
a. Pelatihan Guru-guru di Sekolah Inklusi	254
b. Pendampingan untuk Penyandang Disabilitas	258
c. Penguatan Keluarga Penyandang Disabilitas	261
3. Pemberian Bantuan Alat, Sarana dan PRasarana	263
4. Komite IX (pokja Penyandang Disabilitas)	269
5. Mewujudkan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Inklusi	275
6. Biaya Pendidikan dan Beasiswa untuk ABK Kurang Spesifik untuk Perempuan Penyandang Disabilitas	279
7. Kebijakan Anggaran Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas	284

a.	Bantuan Dana	285
b.	Anggaran yang Berlebih Belum Seimbang dengan Realisasi Program	287
C.	Tata Pemerintahan yang Baik dengan Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan bagi Perempuan Penyanggah Disabilitas	289
1.	Akses (Peluang dan Kesempatan) Perempuan Penyanggah Disabilitas dalam Memperoleh dan Menggunakan Pendidikan	289
2.	Jenjang Pendidikan perempuan Penyanggah Disabilitas	293
3.	Kurikulum Pendidikan yang Berkeadilan Gender bagi Perempuan Disabilitas	299
4.	Keadilan Pendidikan bagi Perempuan Penyanggah Disabilitas sebagai Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik	305
a.	Struktural	305
b.	Kultural	306
5.	Pendidikan bagi Penyanggah Disabilitas yang Adil Gender	308
6.	Pengaruh Utama Gender dan Disabilitas dalam Pendidikan	312
7.	Jejaring dengan Melibatkan Departemen Agama dan Organisasi Keagamaan dalam Pokja Penyanggah Disabilitas	318
BAB VI	Kesimpulan dan Saran	323
A.	Kesimpulan	323
B.	Saran	329
Daftar Pustaka	333
Lampiran-lampiran	359
Identitas Diri	371

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perbandingan Pendidikan Penyandang Disabilitas Laki-laki dan Perempuan di Indonesia 2012. 4
- Tabel 2 Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas. 6
- Tabel 3 Informan Wawancara Mendalam. 55
- Tabel 4 Peserta FGD. 57
- Tabel 5 Subjek Penelitian. 59
- Tabel 6 Pendapat tentang Kepentingan Pendidikan dan Keterampilan. 147
- Tabel 7 ABK yang Tidak Sekolah. 238



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Jaring Laba-laba Keilmuan konsep M Amin Abdullah. 30
- Gambar 2. Keterpautan Islam, Gender, dan Disabilitas. 31
- Gambar 3. Ilustrasi Diagram Veen Intersection Gender dan Disabilitas.
50
- Gambar 4. Intersection Gender dan Disabilitas. 177
- Gambar 5. Grafik ABK Tidak Sekolah di DIY Dilihat dari Jenis
Kelamin. 239
- Gambar 6. Grafik ABK Tidak Sekolah per-Kabupaten. 240



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Panduan Instrumen Penelitian, 333
Lampiran II	Grafik Alasan tidak Sekolah, 364
Lampiran III	Inform Consent, 369



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan
1	AAI	Australia Award Indonesia
2	ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
3	APBD	Anggaran Pendapatan Belanda Daerah
4	APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
5	APBN	Anggaran Pendapatan Belanja
6	ASODKB	Asistensi Sosial Orang dengan Kebutuhan Kecacatan Berat
7	ASPSB	Program Asistensi Penyandang penyandang disabilitas Berat
8	Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
9	Bapel Jamkesos	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
10	BBRSBGK	Besar Rehabilitas Sosial Bina Grahita Kartini
11	BKS	Balai Kasih Sayang
12	BOS	Bantuan Operasional Sekolah
13	BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
14	BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
15	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial
16	BPPM	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	BRTPD	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang penyandang disabilitas
18	BSA	Balai Sakinah 'Aisiyyah
19	BUANA	Badan Usaha Nasyiyah
20	CIQAL	Center for Improving Qualified Activity in Life
21	CO	Comunity Organizer
22	CP	Cerebral Palsy
23	Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
24	Dikpora	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
25	Dinsos	Dinas Sosial
26	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

27	Disperindagkop	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
28	Dukcapil	Kependudukan dan Catatan Sipil
29	DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
30	EUP	Usaha Ekonomi Produktif
31	FKK	Forum Kesehatan Kelurahan
32	FGD	Focus Group Discusion
33	GPK	Guru Pendamping Khusus
34	HAM	Hak Asasi Manusia
35	HIV	Human Immunodeficiency Virus
36	HTI	Hizbut Tahrir Indonesia
37	IDEA	Ide dan Analitika Indonesia
38	INFID	International NGO Forum en Indonesian Development
39	IQ	Intelligence Quotient
40	IT	Informasi dan Teknologi
41	ITMI	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia
42	JAMKESUS	Jaminan Kesehatan Khusus
43	KB	Keluarga Berencana
44	Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Budaya
45	Kemenag	Kementerian Agama
46	Kesos	Kesejahteraan Sosial
47	Kesra	Kesejahteraan Sosial
48	KH	Kyai Haji
49	KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
50	KIP	Kartu Indonesia Pintar
51	KPPD	Komite Pelayanan Penyandang Penyandang Disabilitas
52	KP3A	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
53	KSP	Koperasi Simpan Pinjam
54	KTD	Kehamilan Tidak Diinginkan
55	KTP	Kartu Tanda Penduduk
56	LAZISMU	Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah
57	LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan

		Indonesia untuk Keadilan
58	LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
59	LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
60	LPK	Lembaga Pembinaan Ketrampilan
61	LP Ma'arif NU	Lembaga Pendidikan Ma'arif Nadlatul Ulama'
62	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
63	MAMPU	Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
64	MDGs	Millenium Development Goals
65	ME	Majelis Ekonomi
66	MKS	Majelis Kesejahteraan Sosial
67	MPM	Majelis Pemberdayaan Masyarakat
68	MTQ	Musabaqah Tilawatil Qur'an
69	MTT	Majlis Ta'lim Tuli
70	NA	Nasyiatul 'Aisyiyah
71	NAPI	Narapidana
72	Naker	Tenaga Kerja
73	NGO	Non Government Organization
74	NIK	Nomor Induk Kependudukan
75	NU	Nahdlatul Ulama'
76	OHANA	Organisasi Handicap Nusantara
77	OPD	Organisasi Perangkat Desa
78	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
79	PBNU	Pengurus Besar Nadlatul Ulama
80	PBP	Pemberian Biaya Pendidikan
81	PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
82	Perda	Peraturan Daerah
83	Perdes	Peraturan Desa
84	PERTUNI	Persatuan Tunanetra Indonesia
85	PD	Penyandang Disabilitas
86	PDA	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
87	PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
88	PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

89	PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
90	PKH	Program Keluarga Harapan
91	PKSA	Program Kesejahteraan Sosial Anak
92	PLB	Pendidikan Luar Biasa
93	PMTAS	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
94	PNF	Pendidikan Non Formal
95	POS	Prosedur Operasi Standar
96	PP	Pimpinan Pusat
97	PPDI	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
98	PPDI	Persatuan Penyandang penyandang disabilitas Indonesia
99	PPGD	Pertolongan Pertama Gawat Darurat
100	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
101	PPNA	Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah
102	PSLD	Studi Layanan Difabel
103	PSM	Pekerja Sosial Masyarakat
104	PT	Perguruan Tinggi
105	PW	Pimpinan Wilayah
106	PWA	Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah
107	RA	Raudhatul Athfal
108	RM	Retardasi Mental
109	RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
110	RPTRAM	
111	SAPDA	Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak
112	SD	Sekolah Dasar
113	SDGs	Sustainable Development Goals
114	SDM	Sumber Daya Manusia
115	SID	Sistem Informasi Desa
116	SIGAB	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
117	SKPD	Satuan Kinerja Perangkat Daerah
118	SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
119	SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

120	SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
121	SMP	Sekolah Menengah Pertama
122	SMA	Sekolah Menengah Atas
123	SLB	Sekolah Luar Bisa
124	SPPI	Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia
125	SPPI	Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
126	TB	Tuberculosis
127	THT	Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
128	TK	Taman Kanak-Kanak
129	TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
130	TPA	Taman Pendidikan Alqur'an
131	TPQ	Tamam Pendidikan Quran
132	UEP	Usaha Ekonomi Produktif
133	UCPRUK	UCP Roda Untuk Kemanusiaan
134	UIN	Universitas Islam Negeri
135	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
136	UMP	Universitas Muhamadiyah Ponorogo
137	UMY	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
138	UN	Ujian Nasional
139	UNICEF	United Nations Children's Fund
140	UN CRPD	United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
141	UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
142	UPT	Unit Pelaksana Teknis
143	UPTD	Unit Layanan penyandang disabilitas
144	UU	Undang – Undang
145	Yaketunis	Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam
146	YAKKUM	Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat (*dignity*) telah mengatur hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas seperti tertuang di dalam Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menekankan:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan dan d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003² tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tentang pendidikan yang egaliter yakni *pertama*, termaktub di Pasal 4 Ayat 1, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif” *Kedua*, tercantum di Pasal 11 Ayat 1, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” *Ketiga*, kembali dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat 1b yang isinya, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.”

Indonesia juga mengambil langkah cermat dengan meratifikasi

¹ UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagian keenam tentang Hak Pendidikan pasal 10, halaman 11.

² UU Pendidikan No 20 Tahun 2003 dalam Marjuki (t.t). *Penyandang Disabilitas Berdasarkan Klasifikasi ICF*. Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan, Kemensos RI.

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada November 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang disabilitas. Ratifikasi ini kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak kaum penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi penyandang disabilitas. Ini menjadi perbincangan awal yang positif terhadap pandangan kaum penyandang disabilitas dewasa ini.³

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016⁴ tentang Penyandang Disabilitas secara tegas termuat, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.”

Budi Winarman⁵ dan Tio Tegas W⁶ memaparkan bahwa peran pemerintah dalam suatu negara mengatur dan menyejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik. Diperlukan keterlibatan dan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan di masyarakatnya, seperti dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi barometer dalam menilai keterlibatan pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia. Membincang penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab terhadap masyarakat sama halnya dengan membahas tentang pelayanan publik.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutnya dengan Penyandang Disabilitas.

⁴Undang-Undang No 8 tahun 2016 Bagian ketiga tentang pendidikan pasal 40, halaman 25.

⁵ Budi Winarni, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1992), 8.

⁶ Tio Tegas Wicaksono, dkk, *Pelayanan Umum Kereta Api di Yogyakarta bagi Difabel*, *Jurnal INKLUSI: Jurnal of Disability Studis*, Vol 6 No 1, Januari-Juni 2019, 48.

Pada kenyataannya hak-hak penyandang disabilitas, menurut Tio Tegas W,⁷ masih terabaikan di banyak sektor, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik masih terjadi. Dalam bidang pendidikan partisipasi sekolah antara penyandang disabilitas dan yang bukan disabilitas masih terjadi. Berdasarkan Statistik Pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Persentase tersebut jauh dari penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%. Adapun penduduk usia 5 tahun ke atas yang bukan disabilitas dan belum sekolah hanya 6,17%. Sementara itu, penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62%. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah pula angka partisipasi sekolah (APS). APS tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun, yaitu sebesar 91,12% untuk penyandang disabilitas dan 99,29% untuk bukan penyandang disabilitas. Sementara itu, APS terendah terjadi pada kelompok umur 19-24 tahun, yaitu 12,96% untuk penyandang disabilitas dan 24,53% untuk penyandang bukan disabilitas.⁸

Penyebab minimnya pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah, di antaranya, karena sebagian besar dari mereka berasal dari ekonomi miskin, dan pendidikan merupakan titik putih dari lingkaran hitam daur hidup kemiskinan penyandang disabilitas. Hambatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah masyarakat belum bisa menerima mereka, dan bahkan sebagian orang tua merasa takut jika anaknya atau keluarganya bergaul dengan penyandang disabilitas.⁹

Sedangkan data perbandingan akses pendidikan laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷ *Ibid.*

⁸ Protret Pendidikan Statistik Pendidikan tahun 2018, Diterbitkan Badan Pusat Statistik Pendidikan Jakarta, Indonesia, tahun 2018, 42-47

⁹ www.sapdajogja.org, diakses tanggal 29 Maret 2014

**Tabel 1. Perbandingan Pendidikan
Penyandang Disabilitas Laki-laki dan Perempuan di Indonesia
2012**

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	431,191	406,152	837,343
SD	234,316	152,436	386,752
SLTP	60,052	31,144	91,196
SLTA	44,995	19,778	64,773
D1/D2	277	137	414
D3/Sarjana Muda	1,913	981	2,894
S1/D4	3,481	1,463	4,944
S2/S3	148	55	203
Jumlah	776,373	612,146	1,388,519

Sumber: Pusdatin Kementerian sosial RI 2012

Tabel di atas menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi perempuan penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan semakin rendah. Memang, angka penyandang disabilitas yang tidak bersekolah bagi laki-laki lebih tinggi yakni 431,191 orang dan perempuan sebanyak 406,152 orang. Akan tetapi, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan SD adalah 234.316 laki-laki dan 152.436 perempuan. Penyandang disabilitas yang bersekolah hingga SLTP sebanyak 60.052 laki-laki dan perempuan hanya ada 31.144 orang. Di tingkat SLTA, partisipasi laki-laki penyandang disabilitas sebanyak 44.995 orang dan perempuan 19.778 orang. Jumlah keseluruhan partisipasi pendidikan penyandang disabilitas di perguruan tinggi terdapat 5.819 laki-laki sedangkan perempuan ada 2.636 orang. Data tersebut memperlihatkan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan penyandang

disabilitas dalam memperoleh pendidikan.¹⁰

Menariknya data yang diolah oleh The SMERU Research Institute pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas dibanding penyandang disabilitas laki-laki. Usia melek huruf penyandang disabilitas sebanyak 90,96%, laki-laki 91,43% sedangkan perempuan 90,36%. Penyandang disabilitas yang memasuki jenjang pendidikan SD 89,89%, laki-laki (90,47%) perempuan (88,97%), SMP 48,79 % dengan rincian laki-laki (47,09%) perempuan (51,09%), SMA sebanyak 24,73% dengan perbandingan laki-laki (21.60%) dan perempuan (28.79%), sedangkan yang masuk perguruan tinggi sebanyak 7,74% dengan jumlah perempuan lebih banyak yakni 10,69% dan laki-laki seanyak 5,54%. Secara rinci dapat dilihat di tabel berikut:



¹⁰ Jend Franciscus Adi Prasetyo, “Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah dan Tantangan,” *Buletin Jendela*, Semester 2 tahun 2014, 35.

Tabel 2. Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas (dalam Persen)

		Nonsisabilitas	Disabilitas
Angka melek huruf	Usia 15-44 tahun	99,24	90,96
	laki-laki	99,43	91,43
	Perempuan	99,04	90,36
	SD	97,65	89,82
	laki-laki	97,86	90,47
	Perempuan	97,43	88,97
	SMP	79,10	48,79
	laki-laki	78,48	47,09
	Perempuan	79,77	51,09
	SMA	61,00	24,73
	laki-laki	60,12	21,60
	Perempuan	61,90	28,79
	PT	18,71	7,74
	laki-laki	17,47	5,54
	Perempuan	19,98	10,69
ijazah tertinggi (usia \geq 15 tahun)	Tidak punya ijazah SD	24,31	53,78
	SD/Sederajat	25,68	24,31
	SMP/ sederajat	21,67	9,13
	SMA/ sederajat	26,95	9,89
	Perguruan Tinggi	8,97	2,90
	Total	100,00	100,00

Sumber: Penelitian SMERU disarikan Susenas 2018

Meskipun data tersebut menunjukkan angka pendidikan bagi penyandang disabilitas perempuan lebih tinggi dari pada penyandang disabilitas laki-laki, namun pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas lebih rendah dari pada perempuan non disabilitas. Data di atas menunjukkan perempuan non disabilitas yang mengenyam

pendidikan SD sebanyak 97,43%, sedangkan perempuan penyandang disabilitas sebanyak 88,97%. Di jenjang SMP sebanyak 79,77% perempuan non disabilitas yang terpenuhi hak pendidikannya sedangkan perempuan penyandang disabilitas hanya 51,09% saja. Memasuki SMA, keikutsertaan perempuan non disabilitas dalam pendidikan sebanyak 61,90% dan hanya ada 28,79% saja perempuan penyandang disabilitas yang mendapat hak pemenuhan pendidikan. Hingga memasuki jenjang perguruan tinggi, hanya ada 19,98% perempuan non disabilitas dan 10,69% perempuan penyandang disabilitas yang terpenuhi haknya di bidang pendidikan.¹¹

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dinas sosial setempat menyebut jumlah penyandang disabilitas mencapai 29,530 orang. Dari semua wilayah di DIY, jumlah tertinggi ada di Gunungkidul yaitu 8.594 orang, Kabupaten Sleman sebanyak 6.669 orang, Bantul 6.525 orang, Kulonprogo sebanyak 5.775, dan ada 1.967 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, tingkat pemerataan pendidikan penyandang disabilitas di DIY pun masih sangat memprihatinkan. Sebanyak 1.692 penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan yang jika dirunut dari masing-masing tingkat sebagai berikut: prasekolah 125 anak, taman kanak-kanak sejumlah 119, pendidikan SD 554 orang, tahap SMP 396 orang, dan SMA/ sederajat 498 orang.¹²

Rendahnya pendidikan bagi penyandang disabilitas ini bisa disebabkan dua faktor, kultural dan struktural. Secara kultural masih banyak keluarga beranggapan pendidikan tidak penting bagi penyandang disabilitas. Pemikiran semacam ini salah satunya didasari pemahaman agama yang masih rendah. Pemahaman keagamaan tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi keliru mana kala berhenti pada pemahaman *bayānī* saja belum merambah pada pola pikir *burhānī* dan *irfānī*. Salah satu pola pikir *bayānī* adalah menganggap disabilitas sebagai sebuah takdir yang harus diterima dengan sabar dan

¹¹ Hastuti dkk, “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas,” *Kertas Kerja The SMERU Research Institute*, April 2020, 22.

¹² “Anak Penyandang Disabilitas Tidak Sekolah,” dalam www.radarjogja.jawapost.com, 27 April 2018, diakses 22 Agustus 2020.

ikhlas. Keluarga dalam hal ini orang tua menguatkan dirinya untuk menerima pemberian Tuhan dengan anak penyandang disabilitas dengan konsep takdir, ikhlas, dan pasrah. Pandangan orang tua tentang takdir kedisabilitasan ini salah satunya disampaikan oleh Kara¹³ yang melakukan penelitian keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Pentingnya menafsirkan Al-Qur'an dengan nalar *irfānī*, tidak berhenti pada *bayānī* dan *burhānī* saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Amin Abdullah¹⁴ bahwa pentingnya menumbuhkan nalar *irfānī*¹⁵. Kebenaran apapun, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial-keagamaan, adalah bersifat *intersubjektif*. Apa yang dirasakan oleh penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, atau bangsa tertentu, dengan sedikit tingkat perbedaan, juga dirasakan oleh manusia dalam kultur, ras, agama, kulit dan bangsa lain.¹⁶ Dalam hal ini, termasuk pula ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas dan turut andil dalam melakukan perubahan kebijakan bagi kaum penyandang disabilitas. Jika dikaitkan dengan pandangan M. Amin Abdullah di atas, masih banyak ditemukan para mufasir yang

¹³ Kara, E. (2008). "Parents having mentally retarded children and their assesment of their children's situation in terms of religion". *Ondokuz Mayıs University Faculty of Theology Journal*, 26 (26-27), 317–331. dalam Osman Hatun, Fazilet Yavuz-Birben, Zepnep Ince & Gulay KalkanYeni, "The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability," *Journal of SRPIRITUALPSIKOLOGI AND COUNSELING*, 2016, 211.

¹⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 214.

¹⁵ Nalar *Irfānī* adalah agar memahami keberadaan orang lain atau kelompok lain yang berbeda (*understanding others*). Caranya ialah dengan menumbuhkan sikap empati dan simpati yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip universal *reciprocity* (bila merasa sakit dicubit, maka janganlah mencubit orang lain). Langkah-langkah itu akan mengantarkan tradisi epistemologi *Irfānī* dalam pola pikir yang lebih bersifat *unity in difference*, toleran, dan plural. Dengan demikian hubungan antar "subjek" dan "objek" bukan lagi bersifat subjektif (seperti yang biasa terjadi dalam tradisi *bayānī*) dan bukan pula bersifat objektif (seperti yang biasa ditanamkan dalam tradisi *burhānī*), tetapi lebih kepada sifat intersubjektif.

¹⁶ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 214.

menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang penyandang disabilitas terbatas pada makna *bayānī* saja, belum melibatkan *burhānī* dan *irfānī*. Ketika pemahaman ayat-ayat yang berkaitan tentang penyandang disabilitas berhenti di *bayānī* dan *burhānī* saja, maka akan berakibat kepada perilaku umat Muslim yang hanya berhenti pada pengakuan keberadaan penyandang disabilitas tanpa melakukan tindakan nyata untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap penyandang disabilitas.

Menurut M. Amin Abdullah,¹⁷ alangkah sangat disayangkan hingga kini agama masih banyak disampaikan secara ‘*ulūm al-dīn*.¹⁸ Pemahaman tentang realitas kehidupan sosial keagamaan dan sosial-keislaman akan lebih memadai apabila menerapkan pendekatan-pendekatan ilmu umum yakni sosial, antropologi, budaya dan yang lainnya¹⁹, maka pendekatan ‘*Ulūm al-dīn* tidak cukup, diperlukan pendekatan *al-fikr al-islāmī* dan *Dirāsāt Islāmīyah*.²⁰ Kedua pendekatan

¹⁷ M. Amin Abdullah, M. Amin Abdullah, “Mempertautkan ‘*Ulūm al-dīn*, Al-Fikr Al-Islāmī dan *Dirāsāt Islāmīyah*: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global,” : www.aminabd.wordpress.com, diakses pada 30 April 2019.

¹⁸ ‘*Ulūm al-dīn* yaitu, seputar kalam, fikih, tafsir hadis dan Al-Qur’an, faraid, akidah, akhlak, ibadah, dan lain-lain (*nahwu, sharaf, balāghah, bādī*’, dan ‘*arūd*’) dengan ilmu bantuannya bahasa Arab. ‘*Ulūm al-dīn* yang diselenggarakan oleh masyarakat sekarang ini sangat terasa sangat “lokal”, dangkal, parsial (sepotong-potong), terkotak-kotak (terbatas cara pandangnya), dan parokial (sempit)

¹⁹ Seperti *sosiologi (sūsiulūjīyah)*, antropologi (*antrūpūlūjīyah*), kebudayaan (*saqāfiyah*), dan sejarah (*tarīkhīyah*). Seorang filsuf Muslim Ibnu Rusyd sangat menekankan proses kerja akal pikiran seperti ini sebagaimana yang dilakukan dan dikonseptualisasikan oleh Aristoteles. Fungsi akal pikiran yang bersifat heuristik dengan sendirinya akan membentuk budaya kerja penelitian yang bersifat eksplanatif, eksploratif maupun verifikasiatif.

²⁰ Dialog, perbincangan, dan pembahasan yang mendalam tentang isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, gender (partisipasi wanita dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan), pluralitas agama, serta hubungan dan hukum internasional yang menggunakan metode dan pendekatan campuran antara *al-fikr al-islāmī* dan *dirāsāt islāmīyah* memberi hasil yang sangat berbeda dengan pendekatan ‘*ulūm al-dīn* yang masih menggunakan perspektif metodologi keilmuan lama.²⁰ Begitupula dalam memahami penyandang disabilitas, diperlukanlah pendekatan metode *dirāsāt*

ini dapat menghasilkan ilmu-ilmu sosial yang sangat kontekstual seperti Hak Asasi Manusia (HAM), gender (kesamaan hak perempuan dalam politik, ekonomi, sosial dan pendidikan), *trafficking*, dan termasuk juga dalam hal ini permasalahan isu ketidakadilan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik.

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan penuh dengan mengembangkan sifat-sifat positif, sifat-sifat yang telah ada dalam diri individu manusia.²¹ Dalam pandangan hidup Muslim, konsep kesempurnaan dan ketidaksempurnaan secara fisik hanya sedikit yang diaplikasikan. Dengan demikian, sama halnya pula dengan konsep sempurna dan tidak sempurna. Sikap al-Qur'an terhadap semua manusia dapat mengacu kepada ayat ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
(الحجرات : ١٣)

Artinya: “Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurāt [49]: 13)

Setiap orang diciptakan dari ayah dan ibu yang sama, setara dalam asal-usul biologisnya. Hal ini tercermin dalam persamaan martabat manusia. Ayat tersebut ada hubungannya dengan ayat sebelumnya

islamiyah, yakni pendekatan sosiologi dan antropologi agama. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap hak bagi kaum penyandang disabilitas, baik hak dalam memperoleh pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan, dan yang lainnya kemudian dibenturkan dengan realitas sosial kaum penyandang disabilitas apakah mereka mendapatkan hak-hak tersebut atau tidak. Diskursus ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dengan menggunakan sosiologi dan antropologi agama.

²¹ Muhamed Asad, *Islam at the Crossroads* (Kuala Lumpur: The Other Press, 1999), 12-13.

tentang larangan Allah memperolok orang lain. Allah menganjurkan agar manusia menghormati dan menjaga martabat dirinya dan orang lain. Evolusi manusia menjadi “negara dan suku” dimaksudkan mendorong mereka agar dapat memahami dan menghargai kesatuan manusia dan tidak mementingkan perbedaan di antara mereka.²² Menurut ayat tersebut, manusia paling mulia di hadapan Allah adalah ia yang paling mendalam ketakwaannya. Ukuran Allah dalam menilai manusia bukanlah bergantung dari atribut fisik atau prestasi material, tetapi berdasar kedewasaan rohani dan pengembangan etika. Selain itu, ayat tersebut juga membahas tentang kesetaraan gender. Derajat yang paling tinggi di hadapan Allah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh ketakwaan setiap individu. Jadi, laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah.

Rendahnya akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas disebabkan karena sebagian besar masyarakat hingga kini masih beranggapan bahwa perempuan sebagai gender yang lemah dan tidak bisa mandiri. Kedua ciri ini juga melekat kepada penyandang disabilitas, sehingga status sosial perempuan penyandang disabilitas adalah perempuan yang lemah, tergantung, dan pasif. Ciri-ciri ini diciptakan oleh lingkungan sosial.²³

Pada era teknologi informasi dan pemikiran yang sudah maju ini ternyata ketidakadilan gender masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya hingga kini. Bila satu keluarga memiliki sumber keuangan terbatas, prioritas pendidikan sekolah akan diberikan kepada anak laki-laki. Orang tua tidak menilai potensi intelektual yang baik dari anak perempuan di keluarga itu.²⁴ Ketidakadilan gender dengan sendirinya juga menimpa perempuan penyandang disabilitas. Mereka terpinggirkan dalam semua aspek kehidupan, seperti akses informasi,

²² Muhamed Asad, *Message of the Qur'an* (Lahore: Maktaba Jawahar UI-Uloom, 1980).

²³ J. Morris, “Gender and Disability”, dalam John Swain, Vic Finkelstein, Sally French, dan Mike Oliver (peny.), *Disabling Barriers-Enabling Environments* (London: Sage Publications, 1998), 85-95.

²⁴ Walter Lee William, *Javanese Lives: Women and Men in Modern Indonesian Society* (New Brunswick & London: Rutgers University Press, 1991).

pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, terutama di negara berkembang. Perempuan penyandang disabilitas dibiarkan dan disembunyikan serta kebutuhan dan hak mereka terabaikan. Mereka mengalami diskriminasi karena alasan gender perempuan, penyandang disabilitas, dan miskin. Di antara sesama perempuan pun kerap kali perempuan penyandang disabilitas dipandang tak berarti. Bahkan terhadap laki-laki penyandang disabilitas, kedudukan perempuan penyandang disabilitas tidak setara.²⁵ Laki-laki penyandang disabilitas lebih banyak mendapatkan kesempatan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Akibat ketidaksetaraan ini, secara ekonomi perempuan penyandang disabilitas menjadi beban bagi keluarganya.²⁶

Permasalahan yang dialami perempuan penyandang disabilitas di pedesaan lebih berat. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang lebih rendah. Angka buta aksara yang tinggi semakin memperparah nasib mereka, sehingga mereka tidak tahu cara mengakses berbagai fasilitas dan pelayanan. Di samping itu, kondisi pedesaan sendiri hampir tidak menyediakan fasilitas pendidikan, pekerjaan, dan alat-alat bantu mobilitas fisik yang memadai. Dengan demikian, perempuan penyandang disabilitas di pedesaan menjadi tertinggal dan terlantar.²⁷ Selain itu, perempuan penyandang disabilitas yang berada status ke-disabilitasannya dan ke-wanita-annya mendapatkan dua identitas minor dalam dirinya, atau bisa dikatakan mendapat “dosis ganda” diskriminasi, stereotipe, dan beberapa hambatan untuk mencapai tujuan hidup mereka.²⁸ Sekalipun perempuan penyandang disabilitas memperoleh

²⁵ Purusotam N, “Between Cimplice and Resitance: Woman and The Middle Class Way of Life in Singapore”, dalam Krishna Sen & Maila Stivens (peny.), *Gender and Power in Affulen Asia* (London & New York: Routledge, 1998), 127 dan 166.

²⁶ Turmusani, “Work and Adulthood: Economic Survival in the Majority Word”, dalam Mark Priestley (peny.), *Disability and the Life Course, Global Perspectives* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 192-205.

²⁷ Inge Komardjaja. Mencari Ruang Untuk Difabel, “Perempuan Peyandang Cacat dan Lingkungan Binaan yang Penuh Hambatan”, *Jurnal Perempuan*, edisi 56, Februari 2010, 31-33

²⁸ Fine dan Asch, “Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Diskrimination, and Activism,” *Journal of Social Issues* Vol. 44, No 1, 1988, 3-21.

kekuatan besar, ketahanan, dan kreativitas dari beberapa identitas mereka, tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi konsekuensi diskriminasi. Contohnya adalah rendahnya tingkat lapangan kerja, upah yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya tingkat kekerasan seksual dan fisik, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas.²⁹

Kondisi ekonomi beberapa perempuan penyandang disabilitas lebih banyak yang miskin daripada laki-laki penyandang disabilitas, dan perempuan penyandang disabilitas juga lebih banyak yang miskin dari perempuan normal. Isu-isu gender dan penyandang disabilitas hampir seluruhnya absen dari kebijakan pemerintah, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Sebenarnya jika akses perempuan penyandang disabilitas dalam pendidikan bisa ditingkatkan, maka hal ini dapat mengubah karier pekerjaannya. Namun kebanyakan dari perempuan penyandang disabilitas yang sudah ada di perguruan tinggi akan menghentikan akses pendidikan mereka atau dinonaktifkan. Ini artinya perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi saat mereka merencanakan masa depan. Selain itu, pengalaman diskriminasi ini lebih banyak dialami perempuan penyandang disabilitas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang laki-laki.³⁰

Hasil observasi penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa keluarga tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas, baik anak atau anggota keluarga lainnya untuk bertemu dengan orang lain. Alasannya adalah mereka tidak menginginkan aib keluarga menjadi konsumsi publik. Selain itu beberapa keluarga mengurung anak perempuannya yang penyandang disabilitas dan tidak memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dan bersosialisasi dengan masyarakat karena mereka khawatir anak perempuan tersebut

²⁹ Barbara, *Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues, An Overview* (Washington DC: Center for Women Policy Studies and Women and Philanthropy, 1999), 5.

³⁰ Gillian Parker, C Grebe, M Hirst, M Hendey, G Pascall, *Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market* (New York: University of York, Social Policy Research Unit, 2008), 27.

mengganggu tetangganya.

Jika sebuah keluarga memiliki anak perempuan penyandang disabilitas, sedangkan anak laki-lakinya bukan penyandang disabilitas, maka mereka lebih mengutamakan anak laki-lakinya mendapat pendidikan. Selain itu, jika keluarga memiliki dua anak perempuan dan salah satu anak perempuannya penyandang disabilitas, maka yang akan diutamakan mendapatkan pendidikan adalah anak yang non disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan terdiskriminasi dari anak laki-laki atau perempuan non disabilitas di sebuah keluarga.

Kondisi di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena posisi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami *triple* diskriminasi, yakni kemiskinan, budaya (perempuan gender yang lemah), dan sangat berpotensi pula mendapatkan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Secara struktural kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan inklusi baik dari tenaga pengajar (SDM), sarana prasarana, kurikulum dan yang lainnya. Stigma kedisabilitasan juga menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan inklusi di jalur formal, mayoritas penyandang disabilitas lebih diarahkan ke sekolah khusus yakni Sekolah Luar Biasa (SLB)³¹

Sudah ada kajian-kajian *Islamic Studies* di UIN Sunan Kalijaga yang membahas kajian literasi mengenai ajaran Islam secara *‘ulūm al-dīn* dan kajian tentang *al-fikr al-dīn*. Penelitian ini akan menguatkan dan menambah khazanah intelektual dan akademik tentang gender dan penyandang disabilitas dalam rangka kajian *“Islamic Studies”*.

Penelitian berjudul *Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas*

³¹ Yuda, “Pendidikan Vokasi untuk Difabel Jangan Terjebak Stigma Pekerjaan,” www.solider.id, 18 Juli 2019, diakses tanggal 21 Agustus 2020.

Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta: Islam, Gender, dan Politik ini mengelaborasi titik temu antara konsep keilmuan Islam ‘*Ulūmu al-Dīn*’ ke ‘*Dirasāt Islamiyyah*’ dengan ilmu sosial yakni gender dan disabilitas dalam menganalisis, yakni mempertemukan analisis *intersection* (irisan antara gender dan disabilitas), *al-Fikr al-Dīn* (konsep berpikir *bayānī burhānī* dan *irfānī*) ‘*Dirasāt Islamiyyah*’ dan teori model (*medical model/ carity model, social model* dan *social-relational model*). Analisis *intersection* digunakan untuk melihat adanya irisan diskriminasi yang berbasis gender dan disabilitas yang dialami perempuan penyandang disabilitas dipertemukan dengan *al-Fikr al-Dīn* ‘*Dirasāt Islamiyyah*’ yakni pendekatan *bayānī burhānī* dan *irfānī* untuk melihat konsep berpikir keluarga Muslim dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian dikawinkan dengan teori model, yakni pendekatan *medical model carity model, social model* dan *social-relational model* untuk melihat pola advokasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pandangan keluarga Muslim di DIY tentang penafsiran disabilitas?
- b. Bagaimanakah konstruksi gender dalam mempengaruhi hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas?
- c. Bagaimanakah peran pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam mewujudkan pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan umat Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menafsirkan ayat-ayat disabilitas. Disertasi ini kemudian melihat sejauhmana konstruksi gender mempengaruhi akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas

dan memaparkan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Tema-tema mengenai penyandang disabilitas sudah banyak ditulis, baik dalam bentuk artikel, karya ilmiah, buku, ataupun penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Kebanyakan tema kajian penyandang disabilitas melingkupi hak-hak penyandang disabilitas secara umum, sedangkan tema yang spesifik tentang penyandang disabilitas perempuan masih belum optimal. Sebagian besar bahasan tentang penyandang disabilitas perempuan berkuat dalam studi mengaitkan hubungan antara gender dan perempuan. Namun, belum banyak yang menulis tentang hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Di antara buku-buku yang membahas tentang penyandang disabilitas tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

1. Pendidikan dan Disabilitas

Pustaka yang membahas tentang pendidikan disabilitas di antaranya adalah artikel oleh Andayani dan Muhrisun Afandi³² yang membahas akses pendidikan penyandang disabilitas berjudul “Pemberdayaan dan Pendampingan komunitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses Pendidikan Tinggi.” Artikel ini adalah hasil dari pengabdian masyarakat tentang advokasi komunitas penyandang disabilitas dalam meangkses pendidikan tinggi. Dijelaskan bahwa hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi di antaranya Dinas Sosial yang lebih memfokuskan kegiatan vokasi dan mengesampingkan kemampuan akademik penyandang disabilitas. Di sisi lain guru tingkat pendidikan SLTA kurang membuka ruang informasi peluang masuk perguruan tinggi bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengakses perguruan tinggi. Ditambah lagi asumsi-asumsi yang

³² Andayani dan Muhrisun Afandi, “Pemberdayaan dan Pendampingan komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi,” *Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol. 16, no. 2, 2016, 153-166.

berkembang di masyarakat tentang ketidakmampuan penyandang disabilitas mengakses perguruan tinggi yang diamini oleh penyandang disabilitas sendiri serta tidak adanya dorongan dan motivasi dari keluarga kepada penyandang disabilitas untuk mengakses perguruan tinggi. Akhmad Soleh³³ menyajikan hasil penelitian dalam tesisnya tentang persamaan kesempatan dalam pendidikan penyandang cacat tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu di lembaga pendidikan Departemen Agama.³⁴

Sedangkan artikel yang membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas ditulis oleh Fine dan Asch³⁵ berjudul “Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and Activism”. Artikel ini menjelaskan bahwa perempuan penyandang disabilitas dengan status kedisabilitasnya dan kewanitaannya mendapatkan dua identitas minor dalam dirinya. Bisa dikatakan bahwa dia mendapat “dosis ganda” diskriminasi, *stereotipe*, di samping beberapa hambatan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Artikel yang senada ditulis oleh Barbara,³⁶ berjudul “Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues, An Overview”. Barbara memaparkan bahwa perempuan penyandang disabilitas memperoleh kekuatan besar, ketahanan, dan kreativitas dari beberapa identitas mereka. Meskipun demikian, tegas Barbara, mereka menghadapi konsekuensi diskriminasi. Contohnya adalah rendahnya tingkat lapangan kerja, upah yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya tingkat kekerasan seksual dan fisik, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas.

Kajian Lailiyah³⁷ memaparkan tentang peran pemerintah dalam

³³ Akhmad Soleh, “Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat,” *Tesis Magister* (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005).

³⁴ Ibid.

³⁵ Fine dan Asch, “Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Diskriminasi, and Activism,” *Journal of Social Issues*, vol. 44, no 1 (1988), 3-21.

³⁶ Barbara, “Women and Girls with Disabilities: Defining the Issues, An Overview”, 5.

³⁷ Lailiyah, A. “Jika Pihak Sekolah Menolak Difabel”. In: Salim, I., and Syafi’ie, M. (eds) *Hidup dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: SIGAB. 2015, 126-146.

memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan memfasilitasi segala kompleksitas permasalahannya baik masalah transportasi, ekonomi dan kebijakan beberapa sekolah yang masih menolak siswa penyandang disabilitas. Sedangkan artikel Agus Sri dan Ajiwan Arif³⁸ menegaskan bahwa kejar paket adalah alternatif bagi penyandang disabilitas untuk mengejar ketertinggalan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu dukungan peran orang tua dalam memberikan motivasi untuk mengenyam pendidikan ditulis oleh Hewett dan Frenk D³⁹ tentang peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut: 1.) Sebagai pendamping utama (*as aids*), yaitu sebagai pendamping utama yang dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. 2.) Sebagai advokat (*as advocates*), yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. 3.) Sebagai sumber (*as resources*), menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. 4.) Sebagai guru (*as teacher*), berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. 5.) Sebagai diagnostisian (*diagnosticians*) penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment, terutama di luar jam sekolah.

Di sisi lain artikel yang ditulis oleh Bélanger⁴⁰ dan Maertens⁴¹ memaparkan tentang implikasi keberhasilan program pendidikan inklusi

³⁸ Agus Sri dan Ajiwan Arif, Akses Pendidikan Formal Penting Bagi Difabel: Program Kejar Paket jadi Solusi Hambatan Batasan Usia, www.solider.id, 11 September 2019, diakses tanggal 28 Agustus 2019

³⁹ Hewett dan Frenk D, *The Emotionally Child in The Classroom Disorders* (USA: Ellyn and Bacon, Inc, 1968), 9. Dalam Wari Setiawan, Internalisasi Nilai Pendidikan Islam dan Habit Information pada Anak Berkebutuhan Khusus di Tangerang Selatan, *Indo-Islamika*, Volume 7 No.1 Januari-Juni 2017, 56

⁴⁰ Bélanger, S. Attitudes des différents acteurs scolaires à l'égard de l'inclusion. In N. Rousseau and S. Bélanger (Eds.), *La pédagogie de l'inclusion scolaire*, Presses de l'Université du Québec. 2004, 37-55

⁴¹ Maertens, F. Évolution des services éducatifs publics du Québec destinés aux élèves ayant des besoins particuliers. In N. Rousseau and S. Bélanger (Eds.), *La pédagogie de l'inclusion scolaire*, Presses de l'Université du Québec, Ste-Foy, 2004, 21-34

adalah adanya dukungan dan keaktifan guru dalam mengakomodasi kebutuhan semua siswa dalam kelas, tidak ada paksaan dan tidak mengurangi hak siswa. Sedangkan artikel Sugiarmn dalam Smith⁴² dan Schimdt dan Venet M⁴³ dalam Sugiarmn memaparkan bahwa sekolah inklusi memberikan kesempatan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan hambatan letak sekolah SLB yang jauh, dengan mengoptimalkan potensi dan memenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan harapan sekolah inklusi dapat mengakomodir semua siswa akan kebutuhan hak pendidikan selama kelasnya sesuai dengan perkembangan usia mereka.⁴⁴

2. Gender dan Disabilitas

Terdapat beberapa studi tentang penyandang disabilitas, gender, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Di antaranya adalah buku *Disability, Human Rights and Education: Cross Cultural Perspective* karya Felicity Armstrong dan Len Barton.⁴⁵ Buku ini berisi tentang pentingnya pemahaman lintas budaya informasi dari kebijakan dan kegiatan bagi masyarakat yang berbeda, yakni dalam hal ke-disabilitas-an, hak asasi manusia, dan pendidikan. Studi serupa lainnya adalah buku *Education, Equality, and Human Rights: Issues of Gender, Race, Sexuality, Special Needs, and Social Class* editan Mike Cole. Dalam buku ini terdapat uraian khusus tentang pengertian *gender, identity*, dan *equality* yang ditulis dalam salah satu bab oleh Maublair dan Mace Cole. Terdapat pula bab lainnya yang membahas *disability discrimination, the final frontier, disablement, history*, dan *liberation* (diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, batas akhir kedisabilitasan, sejarah, dan pembebasan bagi penyandang disabilitas) yang ditulis dalam satu bab

⁴² Smith, D.J. (2012), *Inclusion, School for All Student*, penerjemah: Denis, E. Bandung: Penerbit Nuansa.

⁴³ Schmidt, S & Venet, M. (2012). "Principals Facing Inclusive Schooling or Integration. *Canadian Journal of Education* 35, 1 :217-238.

⁴⁴ Sadioglu, O. Batu, S. Bilgin, A dan Oksal, A. 2013. Problem, Expectations, and Suggestion of Elementary Teacher Regarding Inclusion. *Educational Science: Theory & Practice*. DOI: 10.12738/estp.20133.1546.

⁴⁵ Felicity Armstrong dan Len Barton, *Disability, Human Rights, and Education: Cros Cultural Perspective* (McGraw-Hill Education, 1999).

oleh Richard Rieser.⁴⁶ Buku ini lebih menitikberatkan pembahasan mengenai pendidikan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (HAM) pada abad kedua puluhan.

Sedangkan kajian yang lebih spesifik membahas perempuan penyandang disabilitas, di antaranya adalah *Gender and Disability Women's Experiences in the Middle East* oleh Lina Abu Habib⁴⁷ yang diterbitkan Oxfam tahun 1997. Dalam buku ini digambarkan bahwa perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ganda, baik dari segi gender dan ke-disabilitas-annya. Lalu, ada juga buku *Gendering Disability* karya Bonnie G. Smith dan Beth Hutchison⁴⁸ tahun 2004. Buku ini mengupas tentang perbedaan antara penyandang disabilitas dan jenis kelamin. Buku ini menyajikan temuan-temuan baru, tidak hanya tentang diskriminasi yang dipraktikkan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas, tetapi juga tentang paralelisme produktif antara dua kategori tersebut.

Beberapa tulisan yang membahas tentang gender dan Pendidikan, seperti makalah yang ditulis oleh Sandra Acker⁴⁹ berjudul, "Feminist Theory and The Study of Gender and Education". Makalah ini membahas tiga kerangka teori utama feminis Barat-liberal, sosialis, dan radikal yang diwujudkan dalam aplikasi pendidikan menurut konsep mereka. Feminis liberal menulis tentang pendidikan dengan melakukan strategi merubah praktik sosialisasi, mengubah sikap dan undang-undang, hingga pengaplikasian undang-undang. Kritik terhadap aliran liberal terlihat pada keterbatasan konseptual dan keengganan golongan ini untuk menghadapi kekuasaan dan patriarki. Kaum feminis sosialis menganalisis peran sekolah dalam peran gender di bawah kapitalisme. Konsep utamanya adalah reproduksi sosio-kultural dan di tingkat yang lebih

⁴⁶ Moke Cole, et al, *Education, Equality and Human Rights: Issue of Gender, Race, Sexuality, Disability and Social Class* (London: Routledge, 2006).

⁴⁷ Lina Abu Habib, *Gender and Disability Women's Experiences in the Middle East* (Oxford: Oxfam: 1997).

⁴⁸ Bonnie G Smith dan Beth Hutchison, *Gendering Disability* (New Jersey: Rutgers University Press, 2004)

⁴⁹ Sandra Acker, "Feminist Theory and The Study of Gender and Education," *International Revue of Education- Revue Internationale de Pedagogie XXXIII* (1987), 419-435.

rendah, penerimaan dan penolakan terhadap pola perilaku berbasis gender. Sejauh ini, tulisan pendidikan sosialis-feminis lebih bersifat teoritis daripada praktis. Inilah yang membuatnya dikritik karena terlalu berpandangan determinisme dan landasan empiris yang tidak memadai. Feminis radikal dalam bidang pendidikan, terutama berkonsentrasi pada monopoli pengetahuan dan budaya laki-laki dan pada politik seksual di sekolah. Strategi ini melibatkan prioritas perhatian perempuan dan anak perempuan melalui kelompok-kelompok yang berbeda jenis kelamin, bila perlu. Para kritikus berpendapat bahwa feminisme radikal cenderung bergerak dalam *reduksionisme* biologis, deskripsi dari pada penjelasan dan juga mengandung penulisan metodologis dari pada dalam beberapa kategori lain dari beasiswa feminis. Semua kerangka teorinya patuh pada tekanan yang sama termasuk kekuatan struktur yang menindas, ketahanan individu, dan ketegangan antara universalitas (bagaimana perempuan itu sama) dan keanekaragaman (bagaimana perempuan berbeda pada atribut seperti kelas dan ras).

Studi-studi di atas telah membahas tentang hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan penyandang disabilitas. Namun, buku-buku tersebut belum ada pembahasan tentang pandangan agama tentang penyandang disabilitas, khususnya agama Islam.

Beberapa studi yang membahas tentang penyandang disabilitas adalah, di antaranya, artikel yang ditulis Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”. Artikel ini memaparkan tentang pemaknaan penyandang disabilitas, yakni dari penyandang cacat, difabel sampai penyandang disabilitas, dengan memaparkan data lapangan dari dunia daring melalui *Google Trend*.⁵⁰ Sedangkan studi yang menjelaskan tentang sejarah berkembangnya teori model adalah artikel yang ditulis oleh Ro’fah⁵¹ berjudul “Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review.” Ro’fah

⁵⁰ Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas”, *INKLUASI: Journal of Disability Studies*, vol 3 no 2, Juli-Desember 2016, 139-162.

⁵¹ Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review,” *Jurnal Difabel*, 2(1), 2015, 137-160.

menguraikan terminologi *medical model* dan *social model*, Dijelaskan bahwa *social model* mulai berkembang di Inggris sejak organisasi UPIAS (*The Union of the Physically Impaired Against Segregation*) mendeklarasikan perbedaan cacat (*impairmen*) dengan *disability*.

Serupa dengan studi Ro'fah yang mengkaji perdebatan teori model, Sofiana Millati menulis artikel berjudul "*Social-Relational Model* dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas". Artikel ini memaparkan pertarungan teori *medical model* dengan *social model* yang kemudian mendorong kemunculan teori baru untuk menjembatani pertarungan keduanya dengan teori *social relational model*.⁵² David Gillborn⁵³ menulis artikel berjudul , "*Intersectionality, Critical Race Theory, and the Primacy of Racism: Race, Class, Gender, and Disability in Education*". Artikel ini mengeksplorasi kegunaan intersectional sebagai aspek dari *Critical Race Theory* (CRT) dalam pendidikan. Menggambar pada penelitian tentang orang tua pada kelas menengah kulit hitam di Inggris, artikel ini mengeksplorasi peran berpotongan ras, kelas, jenis kelamin dalam konstruksi dan penyebaran pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa *intersectionality* adalah aspek yang penting untuk dipahami dalam ketidaksetaraan ras tetapi rasisme mempertahankan keutamaan bagi para sarjana ras kritis dalam tiga cara utama: yaitu, keunggulan empiris (sebagai poros utama penindasan dalam realitas sehari-hari di sekolah), keutamaan personal/autobiografi (sebagai komponen vital dalam bagaimana para sarjana ras kritis memandang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka tentang dunia), dan keunggulan politik (sebagai titik koherensi dan aktivisme kelompok).

Jacqueline Moodley dan Lauren Graham⁵⁴ menulis artikel berjudul

⁵² Sofiana Millati, "Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2016), 285-304

⁵³ David Gillborn "Intersectionality, Critical Race Theory, and the Primacy of Racism: Race, Class, Gender, and Disability in Education," *Qualitative Inquiry*, Vol 2, No. 1 (2015), 277-287.

⁵⁴ Jacqueline, "Moodley dan Lauren Graham dengan tema "The importance of Intersectionality in Disability and Gender Studies", *Agenda* 104/29.2 2015. 24-33

“The importance of intersectionality in disability and gender studies”. Artikel ini mengupas investigasi ke dalam hubungan antara kemiskinan dan disabilitas yang terbatas pada perspektif Afrika Selatan. Penelitian ini menampilkan kesenjangan persimpangan antara gender, ras, dan disabilitas. Pada 2007, Dedi Muhamamd Sidiq menulis tesis berjudul :Coping Strategies of Visually Difable Studens Toward Challenges in the University Life: A Case Study at the State Islamic UIN Sunan Kalijaga.” Tesis ini mengkaji tantangan akademik bagi mahasiswa difabilitas visual yang menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga.⁵⁵ Penelitian ini dilanjutkan oleh Tim Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga pada 2010 untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dialami mahasiswa difabel (terutama pada tunanetra) di perguruan tinggi Yogyakarta.⁵⁶ Selain itu, pada 2014 Akhmad Sholeh menulis disertasi berjudul “Aksesibilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi, studi kasus empat perguruan tinggi di Yogyakarta.”⁵⁷

3. Islam dan Disabilitas

Terdapat kajian tentang tentang penyandang disabilitas dalam perspektif Islam. Di antaranya adalah buku *Disability in Islamic Law* oleh Vardin Rispler-Chaim yang terbit pada 2007. Buku ini menganalisis sikap kepada orang-orang dengan berbagai penyandang disabilitas berdasarkan karya para ahli hukum Islam (fikih) pada Abad Pertengahan dan era modern.⁵⁸ Kemudian buku karya William Gaventa, David Coulter yang berjudul *Spiritual and Intellectual Sisability International Perspectives on the Effect of Cultural and Religion on Healing, Mind and Soul*. Buku

⁵⁵ Dedi Muhammad Sidiq, “Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,” tesis magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

⁵⁶ Ro’fah Makin, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010).

⁵⁷ Akhmad Sholeh, “Aksesibilitas Pelayanan penyandang disabilitas terhadap Perguruan Tinggi, Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi di Yogyakarta,” *Disertasi* (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁵⁸ Vardin Rispler-Chaim, *Disability in Islamic Law* (Dordrecht: Springer, 2006).

ini mengajak pembaca mempelajari praktik keagamaan yang inklusif dari seluruh dunia dengan perspektif multidisiplin dan antropologi, spiritualitas, dan intelektual yang berpihak kepada penyandang disabilitas.⁵⁹ Selain itu, buku ini membahas pemaknaan bahasa dalam al-Qur'an yang banyak mengandung makna metaforis, seperti dalam hal memaknaan kata-kata yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam al-Qur'an. Kajian serupa ditulis oleh Bazna dan Hattab dalam Bazna, S. Maysaa & Hattab, Tarek A. yang terbit dengan judul "Disability in the Qur'an: the Islamic Alternative to Defining, Viewing and Relating to Disability."⁶⁰ Di Indonesia sudah ada buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, diterbitkan oleh Lembaga Bahsul Masail (LBM) PBNU bekerja sama dengan P3M dan PSLD-UB. Buku tersebut mengupas lima penyebab penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-hak-nya: *pertama* problem cara pandang yakni *magis, naif* dan *kritis*; *kedua*, sikap dan perlakuan terhadap para penyandang disabilitas, *ketiga* keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas, *keempat* keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, *kelima* hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Kemudian ada beberapa artikel jurnal yang membahas pandangan Alqur'an terhadap disabilitas. Salah satu di antaranya adalah artikel yang ditulis Sri Handayani yang mengangkat tema difabel dalam Al-Qur'an yang membahas ayat-ayat tentang disabilitas kemudian dikaitkan dengan realitas sosial. Dikemukakan dalam artikel ini bahwa bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dalam Alqur'an disimpulkan ada tiga hal yakni: *pertama* tentang penggunaan istilah disabilitas yang tepat sebagai wujud untuk tidak merendahkan, *kedua* pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, *ketiga* dukungan dalam kegiatan sosial yang terukur, terstruktur dan terencana sebagai bentuk penguatan dan pemberdayaan

⁵⁹ William Gavent, David Coulter dan Routledge, *Spiritual and Intellectual Disability: International Perspectives on the Effect of Culture and Religion on Healing, Mind and Soul* (London: Routledge, 2002).

⁶⁰ Maysaa S. Bazna & Tarek A. Hattab, "Disability in the Qur'an: the Islamic alternative to defining, viewing and relating to disability," *Journal of Religion, Disability & Health* 9 (1), 2002, 5–27 dalam Milles. M, "Islam, Disability & Deafness: a Modern and Historical Bibliography," Juli 2007.

(*ayyadakuṅ bi nasribi*) kepada penyandang disabilitas.⁶¹

Kajian pustaka tersebut di atas telah membahas tentang pendidikan dan disabilitas, gender dan disabilitas serta Islam dan disabilitas, tetapi belum membahas bagaimana hak pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan penyandang disabilitas. Letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, adalah belum ada yang membahas secara specific tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan dapat menambah dan menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya dan memperkaya khazanah kajian keilmuan Islam dan Sosial di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Keilmuan Islam: *Dari 'Ulūm al-Dīn' ke 'Dirāsat Islamīyah'*

Berbincang mengenai Islam, gender, dan disabilitas tidak terlepas dari beberapa teori yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan saling berkaitan antara ilmu agama dan ilmu umum. Islam sebagai disiplin ilmu agama tidak dapat dipisahkan dari diskusi dan pembahasan tentang permasalahan kasus di lapangan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, dalam hal ini seperti ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas. Bahwa membincang permasalahan gender dan disabilitas merupakan wilayah analisis sosiologi dan antropologi. Dapat dikatakan bahwa Islam, sosiologi, antropologi saling berkaitan. Seperti teori yang dikeluarkan Ian G Barbour dan Holmes Rolston.

Ian G. Barbour, seperti dipaparkan oleh M Amin Abdullah,⁶²

⁶¹ Sri Handayani, Difabel dalam AlQur'an, *INKLUSI: Jurnal of Disability Studies*, Vol 3 no 2 Juli-Desember 2016, h.267-284

⁶² M. Amin Abdullah, "Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Keislaman di perguruan Tinggi: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga," disampaikan dalam *Seminar Kondisi dan Prospek Kemampuan Pendidikan Tinggi Mengembangkan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia [AIPI] bekerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 1-3.

menggambarkan keterkaitan hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum, menurutnya ada empat corak hubungan antara keduanya yaitu, konflik, independen, dialog, dan integrasi. Secara teoretis Barbour⁶³ dan Holmes Rolston III⁶⁴ mengelaborasi tiga kata kunci hubungan agama dan ilmu yang bercorak dialogis dan integratif, yakni *semipermeable*, *intersubjective testability*, dan *creative imagination*.

Teori Ian G Barbour dan Holmes Rolston tersebut diperkuat dengan teori yang dikeluarkan oleh M. Amin Abdullah⁶⁵ tentang *integrasi*, *interkoneksi* dan *interdisiplin* keilmuan di perguruan tinggi. M. Amin Abdullah berpandangan bahwa dalam memahami Islam tidak cukup dengan *'ulūm al-dīn*, namun harus diimbangi dengan *al-fikr al-Islāmī* dan *dirāsat Islāmīyah*. Menurut M. Amin Abdullah, penting menautkan tiga komponen, yakni hubungan dan jaringan intelektual antara tradisi keilmuan *'ulūm al-dīn (religious knowledge)*, *al-fikr al-Islāmī (Islamic thought)*, dan *dirāsat Islāmīyah (Islamic studies)*. Pemahaman *'ulūm al-dīn* sebagai representasi “tradisi lokal” keislaman yang berbasis pada “bahasa” dan “teks-teks” atau *naṣ-naṣ* keagamaan, *al-fikr al-Islāmī* sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis kepada rasio-intelek. *Dirāsat Islāmīyah* atau *Islamic studies* sebagai kluster keilmuan baru yang berbasis kepada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif melibatkan seluruh pengalaman (*experiences*) umat manusia di alam historis-empiris yang amat sangat beranekaragam.

Konsep Islam dan sains modern perlu dipertemukan, menurut M.

⁶³ Ian G. Barbour, *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks, 1966), 182-285. Juga karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Juru bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama*, terj. dari *When Science Meets Religion: Enemies, Strateges or Partners*, oleh E.R. Muhammad (Bandung: Penerbit Mizan, 2002); dan Amin Abdullah, “Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Keislaman di Perguruan Tinggi, 11.

⁶⁴ Holmes Rolston III, *Science and Religion: A Critical Survey* (New York: Random House Inc., 1987); dalam M. Amin Abdullah, “Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Keislaman di Perguruan Tinggi, 7.

⁶⁵ M. Amin Abdullah, “Mempertautkan ‘Ulūm Al-Dīn, Al-Fikr Al-Islāmī dan Dirāsat Islāmīyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global,” www.aminabd.wordpress.com, diakses pada 30 April 2019.

Amin Abdullah⁶⁶ Kalām, falsafah, fikih, dan dakwah sosial modern tidak menolak keterlibatan sains (fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya). Demikian pula tidak menolak keterlibatan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan yang lainnya, kemudian keterlibatan humanitas kontemporer (isu-isu kemanusiaan universal seperti HAM, keadilan gender, hak anak, kekerasan mengatasnamakan agama, perubahan iklim, dan persoalan yang lain).

M. Amin Abdullah⁶⁷ menegaskan bahwa *ijtihād* kontemporer yakni *kalām*, *fikih* dan dakwah sosial harus mempertimbangkan tiga prinsip dasar pola berpikir keagamaan Islam yang menyatu dalam gerak melingkar, yaitu *ḥaḍārah al-nasb*, *ḥaḍārah al-‘ilm*, dan *ḥaḍārah al-falsafah*. *Ḥaḍārah al-nasb* adalah pola pikir keagamaan Islam yang dilandasi oleh budaya *naṣ* atau teks-*bayānī*, *ḥaḍārah al-‘ilm* merupakan pola pikir keagamaan yang ditopang oleh *evidence-based of thought*, yakni ilmu-ilmu yang berdasarkan pada data-data empiris, (*rasioburhānī*), sedangkan *ḥaḍārah al-falsafah* adalah pola pikir keagamaan yang berlandaskan etik-transformatif-filosofis atau *critical philosophy*. Di sinilah multidisiplin ilmu mengemuka, karena semuanya saling berkaitan; *ḥaḍārah al-naṣ* dan *ijtihād* fikih, kalām dan dakwah sosial modern tidak dapat berdiri sendiri tanpa *ḥaḍārah al-‘ilm* dan *ḥaḍārah al-falsafah*. Begitu pula sebaliknya, monodisiplin tidak dapat menjawab perkembangan zaman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berpikir *in-box* adalah corak tipikal berpikir monodisiplin. Maka perlu berpikir *out of the box* dengan menautkan lintas keilmuan.

M. Amin Abdullah⁶⁸ menguatkan lagi pentingnya membongkar *world view* bahwa memahami Islam tidak hanya sekedar agama Tauḥīd, Kalām, Fikih saja, namun dalam memahami Islam diperlukan pertemuan dari berbagai macam disiplin ilmu, baik sosiologi, psikologi, antropologi

⁶⁶ M. Amin Abdullah, “Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: *Fresh Ijtihad* Memperjumpakan ‘Ulum al-din dan Sains Modern dalam keilmuan Keagamaan Islam untuk Pembangunan Bangsa,” dalam *Filsafat Islam: Historisitas dan Aktualisasi: Peran dan Kontribusi Filsafat Islam bagi Bangsa* (Yogyakarta: FA Press, 2014), 239.

⁶⁷ *Ibid.*, 245.

⁶⁸ *Ibid.*

dapat dipertemukan dalam Islam, karena pada hakekatnya semua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan, sebagaimana telah diutarakan di depan tentang jaring laba-laba konsep M. Amin Abdullah⁶⁹ bahwa pola pikir ‘*ulūm al-dīn* saja tidak cukup, perlu diiringi *al-fīkr al-Islāmī* dan *dirāsāt Islāmīyah*.

Sebagaimana disampaikan oleh M. Amin Abdullah bahwa dalam menafsirkan ayat hendaknya menggunakan tiga metode, yakni *bayānī*, *burhānī*, dan *irfānī*. Kenyataannya masih banyak ditemukan para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat disabilitas masih terbatas di makna *bayānī* saja, belum melibatkan *burhānī* dan *irfānī*. Padahal hakikatnya agama Islam adalah agama *rahmatan lil’ālamīn* yang artinya menghargai setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk kaum disabilitas. Ketika memahami ayat-ayat disabilitas berhenti pada *bayānī* dan *burhānī* saja, maka hal ini berakibat kepada perilaku umat Islam hanya sekedar mengakui keberadaan kaum disabilitas saja, tetapi belum melakukan tindakan pembelaan atau advokasi.

M Amin Abdullah⁷⁰ menegaskan sangat penting untuk menafsirkan al-Quran dengan nalar *irfānī*. Nalar *irfānī* bertujuan agar lebih memahami keberadaan orang lain, kelompok lain yang berbeda (*verstehen, understanding*). Caranya adalah dengan menumbuhkan sikap empati, simpati, dan *social skill* yang selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip *universal reciprocity* (bila merasa sakit dicubit, maka janganlah mencubit orang lain). Hal tersebut mengantarkan tradisi epistemologi *irfānī* dalam pola pikir yang lebih bersifat *unity in difference*, toleran, dan plural. Dengan demikian, hubungan antar “subjek” dan “objek” bukanlah bersifat subjektif (seperti yang biasa terjadi dalam tradisi *bayānī*) dan bukan pula bersifat objektif (seperti yang biasa ditanamkan pada tradisi *burhānī*), tetapi lebih intersubjektif. Kebenaran apapun, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial-keagamaan adalah bersifat intersubjektif. Apa yang dirasakan oleh penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, bangsa tertentu

⁶⁹ *ibid.*, 35

⁷⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 214.

dengan sedikit tingkat perbedaan, juga dirasakan oleh manusia dalam kultur, ras, agama, kulit, dan bangsa lain.

M. Amin Abdullah⁷¹ menggambarkan hubungan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan seperti jaring laba-laba. Keduanya saling berkaitan dan saling bertegur sapa, tidak ada dinding tebal yang memisahkan keduanya. Hubungan antara disiplin ilmu keagamaan dan non keagamaan ini secara metaforis seperti sebuah jaring laba-laba keilmuan (*spider web*). Berbagai disiplin yang berbeda tersebut saling berhubungan dan berinteraksi secara aktif-dinamis. Corak hubungan antar berbagai disiplin dan metode keilmuan tersebut bercorak integratif-interkoneksi.⁷²

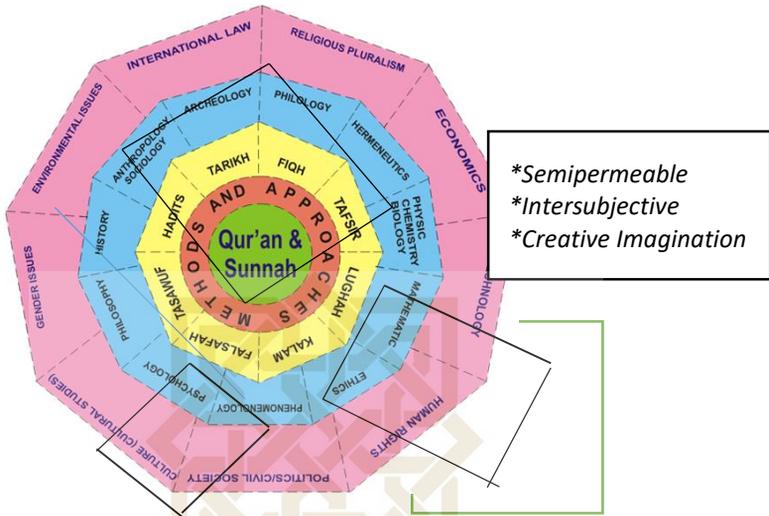
Masing-masing disiplin ilmu masih tetap dapat menjaga identitas dan eksistensinya sendiri-sendiri, meskipun saling membuka diri untuk berdialog, berkomunikasi, dan berdiskusi. Contohnya, disiplin ilmu alam yang tidak hanya berdialog secara internal, tetapi juga mampu dan bersedia berdiskusi dan menerima masukan keilmuan dari eksternal, seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu agama atau yang lebih populer disebut dengan *'ulūm al-dīn* tidak terkecuali di sini. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, terpisah, serta terisolasi dari hubungan dan kontak dengan disiplin ilmu lain di luar dirinya. Ia harus terbuka dan membuka diri serta bersedia berdialog, berkomunikasi, menerima masukan, kritik, dan bersinergi dengan keilmuan alam, sosial, dan humaniora. Metafora “jaring laba-laba” keilmuan (*open systems*; terbuka) digambarkan oleh M. Amin Abdullah⁷³ seperti di bawah ini.

⁷¹ *Ibid*, 107.

⁷² M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 107.

⁷³ *Ibid*.

**Gambar 1. Jaringan Laba-laba Keilmuan konsep
M Amin Abdullah**

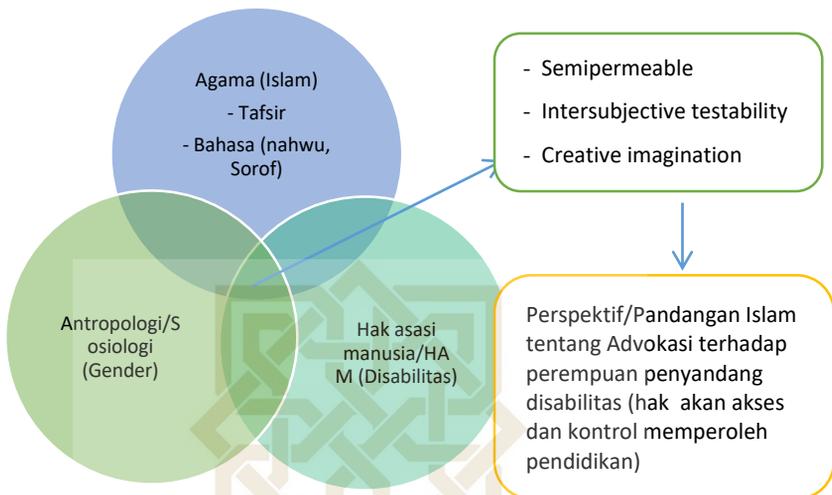


Sumber⁷⁴

Konsep jaringan laba-laba M. Amin Abdullah tersebut jika diterapkan pada pembahasan dalam disertasi ini yang membahas mengenai Islam, gender, dan disabilitas. Dengan demikian, disertasi ini tidak hanya menggunakan pendekatan monodisiplin, parsialitas, apalagi linearitas. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya, sehingga perlu pendekatan yang bersifat multiperspektif, multidimensional, serta multidisiplin. Hubungan antara *part* (*maqāṣid juziyyah*) dan *whole* (*maqāṣid al-‘ammah*) perlu tampak dengan jelas dan gamblang. Disiplin ilmu yang digunakan juga membutuhkan keutuhan ilmu yang lebih komprehensif. Dalam hal ini perspektif agama (Islam) tentang gender dan perspektif Islam tentang difabel perlu “bertegur sapa”. Bagaimana Islam memandang gender dan disabilitas perlu dipertemukan, sebagaimana gender adalah wilayah ilmu sosial, sedangkan disabilitas adalah wilayah kajian *human rights*/hak asasi manusia (HAM). Penulis menggambarkan keterpautan antara Islam, gender, dan disabilitas melalui bagan di bawah ini:

⁷⁴ *Ibid*

Gambar 2. Keterpautan Islam, Gender, dan Disabilitas



Sumber: Sintesa Penulis

Penafsiran agama tentang gender dan disabilitas perlu dipertemukan dengan ilmu-lmu lain, yakni antropologi-sosiologi dan hak asasi manusia. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh M. Amin Abdullah⁷⁵ dalam proses mencari sebab dan musabab suatu peristiwa-peristiwa alam, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, akal pikiran tidak memerlukan teks-teks keagamaan. Untuk memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-keislaman, akan menjadi lebih memadai apabila digunakan pendekatan-pendekatan seperti sosiologi (*sūsiūlūjīyah*), antropologi (*antrūpūlūjīyah*), kebudayaan (*ṣaqāfīyah*), dan sejarah (*tārīkhīyah*). Fungsi dan peran akal bukannya untuk mengukuhkan kebenaran teks seperti yang ada dalam nalar *bayānī*, tetapi lebih ditekankan melakukan analisis dan menguji terus menerus (*heuristic*) kesimpulan-kesimpulan sementara dan teori yang dirumuskan lewat premis-premis logika keilmuan. Filsuf Muslim Ibnu Rusyd sangat menekankan proses kerja akal pikiran ini sebagaimana yang dilakukan dan dikonsep oleh Aristoteles. Fungsi akal pikiran yang

⁷⁵ *Ibid.*, 214.

bersifat heuristik dengan sendirinya membentuk budaya kerja penelitian baik yang bersifat eksplanatif, eksploratif, maupun verifikatif.

Bab II disertasi ini membahas pemaparan tentang pandangan masyarakat Muslim tentang gender dan disabilitas. Kemudian pada bab tersebut akan terlihat potret di lapangan mengenai hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas; bagaimana kekuatan perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan bagaimana relasi keberagamaan seseorang dengan kaum disabilitas. Selain itu, bagaimana kualitas keberagamaan orangtua jika memiliki anak perempuan penyandang disabilitas; apakah mereka memberikan hak kepada anak-nya untuk bergaul, bersosialisasi di masyarakat, mendapatkan pendidikan atau justru menyembunyikan karena malu memiliki anak disabilitas. Apakah kualitas keberagamaannya mereka sebatas ritual keagamaan ('*ulūm al-dīn*) saja atau sudah sampai pada *dirāsat islāmīyah*, yakni memberikan hak pada anak perempuan penyandang disabilitasnya untuk mengakses pendidikan, kesehatan, informasi, dan yang lainnya. Lalu, perhatian dari pemangku kebijakan; bagaimana mereka mendesain kurikulum dan layanan pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas, apakah sudah ditingkatkan aksesibilitasnya atau belum, apakah ada prioritas khusus bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, misalnya dengan memberikan transportasi yang nyaman atau memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi.

2. Gender

Pengertian gender sudah banyak diutarakan oleh beberapa tokoh gender dan feminis. Menurut Unger dan Crawford⁷⁶, "*gender is a difference between women and men are socially constructed rather than on biological differences alone*" (gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan

⁷⁶ R. Unger dan Crawford, *Women and Gender a Feminist Psychology* (New York: McGraw Hill Inc., 1992), 272.

berdasarkan perbedaan biologis semata). Hal yang hampir sama dikemukakan Moser⁷⁷, yakni bahwa gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Sementara itu, Mosse⁷⁸ berpendapat bahwa gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki—bukan secara biologis—dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnik. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup yang berhubungan dengan akses pada pendidikan, pekerjaan, serta penguasaan alat-alat dan sumber daya. Ostergard⁷⁹ dan Bradley⁸⁰ menuturkan bahwa gender berkaitan dengan kualitas dan relasi yang dibentuk dalam hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, dominasi struktur kesempatan hidup perempuan dan laki-laki, pembagian kerja yang lebih luas, dan pada gilirannya berakar kepada kondisi produksi dan reproduksi yang diperkuat oleh sistem budaya, agama, dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan. Gender bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya, serta pengalaman hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian gender berbeda dari jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, berlaku secara umum, tidak dapat berubah, dan merupakan kodrat dari Tuhan, sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis.

Nurhaeni⁸¹ menjelaskan bahwa ketidakadilan gender adalah perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan atau laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan kompetensi, aspirasi, dan keinginannya, sehingga bersifat merugikan salah satu jenis kelamin.

⁷⁷ C.O.N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training* (London: Routledge, 1993), 20.

⁷⁸ J. C. Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar, 1996), 9.

⁷⁹ L. Ostergaard, *Gender and Development: A Practical Guide* (New York: Routledge, 1992), 122-127

⁸⁰ H. Bradley, *Gender* (Cambridge: Polity Press, 2007), 15-16

⁸¹ I. Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan menuju Kesenjangan dan Keadilan Gender* (Surakarta: UNS Press, 2009), 60

Mansour Fakh⁸² menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan bagi perempuan ataupun laki-laki berdasarkan sistem dan struktur yang ada. Manifestasi dari ketidaksetaraan itu ialah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja. Perbedaan peran gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis, sejarah, etnik, ekonomi, dan kebudayaan. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses, partisipasi, dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya. Mansour Fakh⁸³ menerangkan ketidakadilan gender sebagai berikut:

- a. *Stereotype*, yakni pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. Stereotipe tersebut kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik. Kerap kali perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur)
- b. Kekerasan. Kekerasan (*violence*) berbasis gender. Kekerasan semacam ini terjadi akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi perempuan yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas.
- c. Marginalisasi. Marginalisasi terhadap perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan. Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.

⁸² Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 14–21

⁸³ *Ibid.*

- d. Subordinasi, yakni penomorduaan ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.
- e. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.

Ace Suryadi⁸⁴ menjelaskan ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan, ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Ada tiga hal permasalahan, yakni kesempatan, jenjang, dan kurikulum. Mereka mengategorikan faktor-faktor kesenjangan gender dalam bidang pendidikan ke dalam empat aspek, yaitu: (1) akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, (2) partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, (3) kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, (4) manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.

Pada proses analisis gender sesuai dengan pandangan yang dikemukakan Van Bemmelen⁸⁵ yang berpendapat bahwa analisis gender dalam pendidikan meliputi: (1) akses perempuan dalam pendidikan, (2) nilai gender yang dianut oleh masyarakat, (3) nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, (4) nilai gender yang ditanamkan oleh guru, (5) kebijakan yang bias gender. Oleh sebab itu, hak-hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam disertasi ini menganalisis beberapa hal yakni: (1) akses (peluang atau kesempatan) perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh dan menggunakan

⁸⁴ Acee Suryadi, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* (Bandung: PT. Ganesindo, 2004), 50.

⁸⁵ Sita Van Bemmelen, "Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?," dalam T. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 175–226.

pendidikan, (2) pengaruh jenjang pendidikan perempuan penyandang disabilitas dalam berperan di masyarakat, (3) kontrol (pengaruh) pendidikan perempuan penyandang disabilitas pada peran pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat, (4) manfaat pendidikan perempuan penyandang disabilitas berguna dalam dunia kerja. Ketidakadilan gender memunculkan gerakan atau perjuangan kaum perempuan untuk kesetaraan atau keadilan. Perjuangan kesetaraan gender inilah yang diusung oleh para feminis. Jadi, secara tidak langsung ketidakadilan gender akan melahirkan paham feminisme.

Lisa Tuttle⁸⁶ menjelaskan bahwa feminisme (*feminism*) berasal dari bahasa latin *femina* (*woman*), secara harfiah artinya, “*having the qualities of female.*” Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan *womanism* pada 1980-an. Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis dalam buku *The Arthenaem*.

Aida Fitalaya⁸⁷ mempertegas bahwa feminisme yang memiliki artian dari *femina* tersebut bersifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*).⁸⁸

Maggie Humm dalam Syarif Hidayatullah⁸⁹ menyebutkan bahwa feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang

⁸⁶ Lisa Tuttle, “Encyclopedia of Feminism”, dalam Arimbi Heruputri dan R. Valentina, *Percakapan tentang Feminisme Vs Neoliberalisme* (Jakarta: debtWatch Indonesia, 2004), 8.

⁸⁷ Aida Fitalaya S. Hubis, “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan”, dalam Dadang S Anshori, dkk (peny.), *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19.

⁸⁸ Aida Fitalaya S. Hubis, “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan”, dalam Dadang S Anshori, dkk (peny.), *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19.

⁸⁹ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

melekat dalam semua pendekatan itu ialah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan yang disebabkan jenis kelamin.

Dalam bukunya, Arimbi H dan R.Valentina⁹⁰ mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran atas penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih pengelolaan kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun luar rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, feminisme menjadi lebih dari sekadar sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang hakikatnya perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami perempuan. Syarif Hidayatullah menambahkan⁹¹ bahwa berdasarkan pemahaman ideologi tentang perlawanan, feminisme harus mencakup aksi untuk membebaskan perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme juga memiliki artian gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Mansour Fakih⁹² juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.

Teori-teori gender dan ketidakadilan gender tersebut akan menjadi alat analisis hasil penelitian tentang akses, jenjang, dan kurikulum bagi perempuan penyandang disabilitas. Bagaimanakah akses perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, kemudian sampai jenjang pendidikan apa perempuan penyandang disabilitas mengenyam pendidikan serta bagaimana kurikulum pendidikan memenuhi kebutuhan

⁹⁰ Arimbi Heroepoetri dan R.Valentina, *Percakapan tentang Feminisme VS Neoliberalisme*, Jakarta DebtWatch, 2004), 10.

⁹¹ Syarifah Hidayatullah, *Teologi Feminisme*, 5.

⁹² Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 82.

pendidikan perempuan penyandang disabilitas.

3. Konsep Disabilitas

Dalam disertasi ini, penulis konsisten menggunakan istilah *penyandang disabilitas*, meskipun istilah lainnya seperti *difabel* atau penyandang cacat. Mengenai pengertian *difabel*, Mansour Faqih⁹³ mengatakan bahwa predikat penyandang disabilitas dipandang dengan cara diskriminatif dan mengandung stigma buruk. Mansour Fakih mengusulkan istilah alternatif yaitu, *difabel*, yang merupakan kepanjangan dari *differently able* (orang dengan kemampuan berbeda) . *Difabel* adalah istilah yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, sekaligus lebih sensitif terhadap perasaan dan pengalaman mereka.

Dewi Sartika⁹⁴ memaparkan istilah *disabilitas* didasarkan pada istilah *disability* yang artinya “suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal akibat ketidakmampuan fisik”. Jenny Morris⁹⁵ mengungkapkan bahwa menurut *the British Council of Disability*, definisi *disability* adalah Kelemahan atau pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh sedikitnya peran masyarakat atau tidak ada bagian/tempat orang-orang yang memiliki gangguan “*impairment*” dan termasuk mereka yang tidak memiliki aktivitas utama dalam masyarakat (oleh karena itu, *discrimination* dan *oppression social* terhadap *disability* dipandang setara dengan rasisme atau seksisme).

Menurut penelitian Arif Maftuhin⁹⁶, penggunaan istilah

⁹³ Mansour Fakih, *Panggil Aku Disabilitas*, dalam Eko Prasetyo dan Fitria Agustina (ed), *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 304; Jarot Wahyudi dkk., “Kebijakan dan Layanan Disabilitas di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol: XVII, No. 1 Januari-April 2008, 205

⁹⁴ Dewi Setiari dkk, “Katan dan Makna”, *Jurnal Perempuan*, edisi ke 65, Februari 2010, 176.

⁹⁵ Jenny Morris, “Feminism, Gender and Disability”, *makalah dipresentasikan dalam seminar di Sydney, Australia pada Februari 1998*, 2.

⁹⁶ Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *INKLUSI Journal of Disability Studies*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2016, 160

penyandang cacat mengalami penurunan hingga 26%, di sisi lain istilah ‘penyandang disabilitas’ mengalami pelonjakan hingga delapan kali lipat. Sedangkan istilah ‘difabel’ dimungkinkan akan tetap bertahan sebagai istilah alternatif kedua, dikarenakan sebagian aktifis pejuang hak-hak difabel dan akademisi di Yogyakarta akan mempertahankan istilah tersebut.

Pada penulisan disertasi ini penulis menggunakan istilah penyandang disabilitas yang merujuk pada UU No 8 tahun 2016 bab 1 pasal yang berbunyi,

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹⁷

Perkembangan pemikiran tentang penyandang disabilitas mengalami gejolak dan perjuangan yang sangat panjang. Castiglioni⁹⁸ mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarahnya, disabilitas kerap diselimuti oleh berbagai potret suram. Michael Olliver dan Colin Barnes⁹⁹ mengungkapkan bahwa masyarakat Yahudi kuno melihat disabilitas sebagai manifestasi kutukan Tuhan. Di kalangan masyarakat Barat pada abad pertengahan juga berkembang kepercayaan bahwa kelahiran anak penyandang disabilitas dianggap sebagai hasil perbuatan setan atau dosa dari orangtua. John H. Stone¹⁰⁰ menambahkan dalam masyarakat Haiti kuno yang memiliki tradisi poligami, bila seorang istri melahirkan anak penyandang disabilitas, maka kemudian suami akan meninggalkan istri lama dan menghamili perempuan lain yang dianggap bisa memberikan

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁹⁸ Castiglioni, *Introduction to Difiable People* (London: Macmillan Press Ltd, 1941); Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives* (London: John Willy and Sons, 1981), 22-27.

⁹⁹ Michael Olliver dan Colin Barnes, *The New Politics of Disablement* (London: Macmillan Pres ltd, 2012), 29.

¹⁰⁰ John H. Stone, *Culture and Disability, Providing Culturally Competent Services* (London, New Delhi: Sage Publications, 2005), 119-149.

keturunan anak normal, sehingga banyak anak disabilitas yang diasuh oleh perempuan *single parent*. Di lain pihak, masyarakat Korea kuno beranggapan bahwa anak disabilitas disebabkan karena ketika hamil orang tua si anak pernah membunuh binatang-binatang yang tabu untuk dibunuh.

Pada era industri, menurut Micael Olliver,¹⁰¹ peminggiran dan diskriminasi terhadap kaum disabilitas juga masih sangat kuat. Sapto Nugroho dan Risnawati¹⁰² mengemukakan bahwa stigma negatif yang muncul dari diagnosa medis justru memunculkan marginalisasi baru kepada kaum disabilitas, upaya “normalisasi” terhadap kelompok disabilitas, melalui beragam program institusionalisasi dan segregasi terhadap kelompok disabilitas. Proses ini sering disebut sebagai “*the management of normality*.” Beberapa model yang dipakai untuk mengadvokasi kaum disabilitas terdiri dari *medical model*, *individual model*, dan *social model*. *Medical model* menganggap bahwa secara natural disabilitas adalah

Problem individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau ketidaknormalan fisik/mental. Jelasnya masalah disabilitas adalah kekurangan seseorang dengan standar kelengkapan tubuh/indra seperti orang normal.

Sedangkan, *individual model* memiliki dua poin mendasar yang penting dalam memberikan definisi

Pertama, menempatkan “masalah” kedisabilitasan dalam diri individu, dan, *kedua*, melihat penyebab masalah ini berasal dari keterbatasan fungsional atau kerugian psikologis yang mengasumsikan muncul dari kedisabilitasan. Kedua poin tersebut didukung oleh “teori tragedi pribadi kedisabilitasan” yang menunjukkan bahwa kedisabilitasan adalah suatu peristiwa kebetulan yang mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba bagi individu yang malang.¹⁰³

¹⁰¹ Michael Oliver, *Understanding Disability from Theory to Practice* (New York: Palgrave, 1996), hlm 30-31

¹⁰² Sapto Nugroho dan Risnawati, *Meretas Siklus Kedisabilitasan Realitas yang Terabaikan* (Surakarta: Ford Foundation dan Yayasan Talenta, 2004), ix.

¹⁰³ Michael Oliver, *Understanding Disability*, 32.

Sedangkan menurut *world vision*,

“*Impairment*” diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekurangan anggota tubuh, organ, mekanisme tubuh yang tidak sepenuhnya berfungsi secara efektif atau efisien. “*Impairment*” (penurunan) meliputi fisik, sensorik, saraf, intelektual, mental, atau gangguan fisiologis jangka panjang atau pendek.¹⁰⁴

A. Lagerwall, Ellamaa, L. Karu, M. Muklane, dan T. Talvik¹⁰⁵ memaparkan bahwa *impairment* adalah kurangnya sebagian atau seluruh anggota tubuh; memiliki anggota tubuh/organ/mekanisme tubuh yang tidak sepenuhnya berfungsi secara efektif dan efisien. Penurunan yang meliputi fisik, sensorik, saraf, intelektual, mental, atau gangguan fisiologis, baik jangka panjang maupun pendek.

Disabilitas adalah akibat dari keterbatasan yang menimpa orang dengan gangguan oleh sikap, kelembagaan, dan lingkungan hambatan partisipasi mereka dalam masyarakat. Penurunan mengacu pada pengurangan atau hilangnya struktur fisik, psikologis, atau perilaku normal yang ada. Disabilitas adanya gangguan fungsional akibat dari kerusakan primer, dan efek dari hilangnya fungsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga disabilitas.¹⁰⁶

Menurut *the charity model*, seperti yang diungkapkan oleh Micael Olliver,¹⁰⁷ disabilitas (kedisabilitas) adalah orang dengan gangguan tragis atau tak berdaya yang layak untuk dikasihani dan mendapatkan bantuan atau amal dari pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan khas yang dilakukan adalah dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau hadiah, seperti makanan atau pakaian. Pandangan dan sikap penganut model ini terhadap orang-orang disabilitas adalah menganggap mereka tak berdaya, harus dikasihani, tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan,

¹⁰⁴ World Vision, *International Transformational Development Disability Working Group* (Juli 2006), 15-16.

¹⁰⁵ A. Lagerwall, Ellamaa, L. Karu, M. Muklane, dan T. Talvik, *Proceedings of the International Conference on Rehabilitation of Disabled Children: Present State and Future Trends*. Tallin, Estonia 12–26 Agustus 1989 (Estonia: Tartu University, 1991), 10-12.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Oliver, *Understanding Disability*.

kurang berharga sebagai manusia, atau hanya karena mereka memiliki kedisabilitas. Oleh karena itu, gagasan solusi dengan model ini adalah untuk memberikan amal atau *charity* seolah-olah itu adalah satu-satunya solusi untuk membantu orang disabilitas.

Berbeda dengan *social model*, menurut Oliver¹⁰⁸ kemunculan *social model* dikarenakan penolakan pemikiran fundamental, yakni pemikiran teori individual model tersebut di atas, teori ini menyangkal bahwa

Kedisabilitas bukan dari diri individu atau keterbatasan fungsional psikologis, namun menempatkan masalah kecatatan pada posisi yang tepat dalam masyarakat. Disabilitas bukan keterbatasan individu namun kegagalan masyarakat dalam memberikan layanan yang tepat dan memadai dalam menjamin kebutuhan kaum disabilitas secara sepenuhnya oleh masyarakat, pemerintah, maupun organisasi sosial.¹⁰⁹

Social model memandang disabilitas (kedisabilitas) berfokus pada masyarakat. Ia melihat disabilitas (kedisabilitas) sebagai “konsekuensi sosial dari memiliki gangguan.” Ia mengakui ketidakmampuan masyarakat untuk menerima dan mengakomodasi semua anggotanya. Dengan demikian, model ini memiliki cara pandang bahwa orang yang dinonaktifkan oleh masyarakat serta dirampas hak dan kesempatannya karena penurunan nilai mereka.

Beberapa pandangan disabilitas yang dilihat dari *social model* contohnya adalah pandangan dari Jenny Morris¹¹⁰. Menurutnya disabilitas adalah:

Penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan gangguan yang dinonaktifkan oleh masyarakat.¹¹¹

Teori Jenny Morris, Michael Oliver tentang teori model, yakni *individual model*, *medical model* dan *social model* akan digunakan untuk

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Seorang aktivis perempuan dan disabilitas di Inggris yang selama 15 tahun menggeluti isu ini. Menurutnya sejak 1980, di Inggris menguat isu tentang disabilitas. Hal ini menjadikan kekuatan politik baginya untuk memperjuangkan perempuan dan disabilitas.

¹¹¹ Jenny Morris, “Feminism, Gender and Disability”, 2.

menganalisis peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mengadvokasi perempuan penyandang disabilitas.

Perdebatan panjang antara *medical model* dan *social model* sudah berkembang sejak 1970an di Inggris, terlebih ketika UPIAS¹¹² mendeklarasikan perbedaan antara *impairment* dan *disability*. *Impairment* didefinisikan sebagai “*lacking part of all or a limb or having a defective limb, organ, or mechanism of the body*”. Kecacatan adalah keadaan di mana individu memiliki kekurangan fisik seperti anggota tubuh atau organ yang tidak berfungsi, serta ataupun kondisi mental yang tidak sehat. Selanjutnya, penggunaan terminologi cacat fisik, biologis, maupun mental diasosiasikan dengan perspektif *medical model*¹¹³. Sedangkan Greenstein¹¹⁴ berpendapat bahwa adanya ‘rezim profesional atas disabilitas’ memposisikan seseorang sebagai ‘objek’ dari medikalisasi dan *treatment-treatment individual*. Sementara Foucault¹¹⁵ mengungkap adanya praktik-praktik “kolonisasi psikiatri” di mana para otoritas profesional berkuasa dalam menentukan dan memberikan saran-saran terhadap hidup dan masa depan seseorang. Menurut Foucault, disabilitas tidak bisa dipandang sebagai suatu penyakit atau kekurangan fisik semata, namun disabilitas merupakan suatu reproduksi pengetahuan konseptual dari kekuatan dalam institusi di ranah medis.

Menurut Ro’fah,¹¹⁶ pendekatan *social* dan *medical model* memiliki dua pendekatan yang saling berlawanan. Istilah *social model* muncul sejak UPIAS (*the Union of the Physically Impaired Against Segregation*)

¹¹² Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) (1976) *Fundamental Principles of Disability*. London, Union of the Physically Impaired Against Segregation. Dalam Sofiana Millati, “Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas,” *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol.3 No2 Juli-Desember 2016, 285-304.

¹¹³ M. Oliver & C. Barnes, *The new politics of disablement*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

¹¹⁴ Greenstein, A. *Radical Inclusive Education: disability, teaching and struggle for liberation*. Sussex, Routledge, 2016, 8

¹¹⁵ Foucault, M. *Psychiatric Power*. New York, Palgrave MacMillan. 2008, 211

¹¹⁶ Ro’fah Teori *Disabilitas*: Sebuah Literature Review. *Jurnal Difabel*, 2(1), 2015, h.137-160

mendeklarasikan perbedaan term cacat (*impairment*) dengan *disability*. Pendekatan tersebut menjadi semangat gerakan organisasi persatuan penyandang disabilitas secara global dengan mengubah pemahaman yang pada awalnya berfokus pada kondisi kecacatan dalam diri individu menjadi sebuah permasalahan yang dilatarbelakangi konstruksi sosial-politik yang berada di dalam masyarakat.

Di kemudian hari pendekatan *social model* banyak dikritik oleh penggerak *medical model*, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jenny Morris¹¹⁷ mereka menganggap *impairment* tidak selamanya mendiskriminasi mereka dari sosial politik, namun justru *impairment* dapat menunjukkan kelebihan mereka dengan jargon “*bring the body back*” yang mana kondisi fisik dan bodis tidak bisa dikesampingkan. Percaturan *medical model* dan *social model* seperti yang ditulis oleh Sofia Mellati¹¹⁸ berujung pada pendekatan *social relational model* sebagai upaya menjembatani pendekatan *social model* dan *medical model*. Munculnya pendekatan *social-relational model* merupakan alternatif kerangka berpikir yang komprehensif. *Social-relational model* adalah suatu bentuk pendekatan yang berusaha menjembatani perdebatan antara model medis dan model sosial, yang mana model tersebut mempertimbangkan preposisi dari perspektif medis-sosiologis (*medical sociology*). *Social relational model* bertujuan menghubungkan pengaruh antara kekurangan fisik dalam diri individu *impairment* dan kondisi sosial, politik, dan kultural yang menjadi bahasan disabilitas sebagai suatu fenomena yang utuh dan tidak terkotak-kotak. Reindal¹¹⁹ berpendapat model medis dan model sosial, jika dipandang sepihak akan berat sebelah: *one is accused the other of either over – individualising or ever – socialising the phenomenon of disability*.

Teori model ini baik *medical model*, *social model* maupun *social*

¹¹⁷ Morris, J. *Pride Against Prejudice – A Personal Politics of Disability*. London: The Women’s Press. 1991

¹¹⁸ Sofiana Millati, Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol.3 No2 Juli-Desember 2016, h.285-304

¹¹⁹ Reindal, S. M. A *Social Relational Model of Disability: A Theoretical Framework for Special Needs Education?*. *European Journal of Special Needs Education*, 23(2), 2008, 135-146

relational model menjadi pendekatan dalam disertasi ini untuk menganalisis akses perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, baik untuk melihat strategi pendekatan kultural yakni keluarga dan masyarakat maupun struktural yakni kebijakan pemerintah dan pengimplementasian kebijakan dalam layanan pendidikan di DIY.

4. Gender, Disabilitas dan Intersection

Pembahasan mengenai isu ketidakadilan gender dan disabilitas bagi perempuan adalah dua hal yang saling terkait dalam kondisi ter subordinasi, terdiskriminasi, dan termarginalisasi. Perempuan penyandang disabilitas biasanya mendapat diskriminasi berlapis. Sebagai perempuan ia akan terdiskriminasi oleh perempuan sesama penyandang disabilitas, perempuan non disabilitas, dan oleh laki-laki disabilitas. Terlebih jika perempuan penyandang disabilitas tersebut miskin, maka semakin terdiskriminasi dari akses pada pendidikan, kesehatan, dan bahkan bisa saja mendapatkan perlakuan sarat kekerasan dari pihak lain. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa tokoh yang diuraikan di bawah ini.

Menurut Jenny Morris¹²⁰, gerakan disabilitas cenderung tidak menyoroti perjuangan perempuan penyandang disabilitas karena kekhawatiran mereka nantinya terfokus pada isu perempuan penyandang disabilitas saja. Di sisi lain, gerakan feminis juga menganggap isu perempuan penyandang disabilitas sebagai isu sampingan. Dengan kondisi ini, Jenny Morris mengartikan bahwa disabilitas bukan sebagai penyandang disabilitas, tetapi diartikan:

Sebagai *impairment* atau penurunan dan hambatan penonaktifan, diskriminasi, dan pengucilan dari masyarakat.¹²¹

Impairment tersebut dikarenakan karakteristik, fitur, atau atribut jangka panjang, bukan karena penyakit atau cedera. *Impairment* dapat mempengaruhi beberapa hal yaitu:

- a. Penampilan, karena individu tersebut melakukan cara yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid.*

- b. Fungsi ingatan, individu yang di-“singkirkan” menjadi terlepas dari masyarakat.
- c. Menyebabkan rasa sakit, kelelahan, dan memengaruhi komunikasi, sehingga mengurangi kesadaran atau ingatan terhadapnya.

Secara umum, isu mengenai diskriminasi terhadap perempuan berakar dari dikotomi ekstrem perbedaan tubuh antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak dapat dijadikan pembeda perlakuan dalam masyarakat terhadap perempuan. Namun, dalam kenyataannya justru perempuanlah yang sering mengalami perlakuan diskriminatif. Sikap minor terhadap perempuan semakin terasa ketika terkait dengan isu minoritas lainnya, salah satunya adalah isu disabilitas (atau “ketidaknormalan”)¹²² fisik penyandang disabilitas yang dijadikan alasan untuk membedakan dan seakan-akan membatasi hak hidup dalam masyarakat. Perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi ganda akibat jenis kelamin dan juga “ketidaknormalan”-nya dalam masyarakat tersebut.¹²³

Menurut Merle Froschl¹²⁴ perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi ganda, yakni: *Pertama*, dengan terdiskriminasi dari laki-laki penyandang disabilitas; *kedua*, ia akan terdiskriminasi dari perempuan yang tidak penyandang disabilitas. Misalnya, dalam mendapatkan akses pekerjaan laki-laki disabilitas lebih banyak mendapatkan peluang daripada perempuan penyandang disabilitas. Contoh diskriminasi yang kedua adalah dalam mendapatkan akses pekerjaan dengan perempuan normal, perempuan penyandang disabilitas lebih sedikit mendapatkan peluang pekerjaan.

Perempuan penyandang disabilitas lebih banyak yang miskin daripada laki-laki disabilitas ataupun perempuan normal. Hal ini

¹²² “Ketidaknormalan” dalam konteks ini menunjukkan adanya standar normal dalam masyarakat sehingga yang berbeda akan dianggap tidak normal.

¹²³ Membincang Disabilitas, *Jurnal Perempuan*, 2010, hlm, 18.

¹²⁴ Merle Froschl, Ellen Rubin dan Barbara Sprung, “Connecting Gender and Disability,” *Jurnal Gender and Disability Digest*, November 1999 hlm, 10.

diperkuat oleh pendapat Gillian Parker¹²⁵. Menurutnya, isu-isu gender dan disabilitas hampir seluruhnya absen dari kebijakan pemerintah, baik yang menyangkut pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Sebenarnya, jika perempuan penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan tinggi, maka ia dapat mengubah karier pekerjaannya. Namun, kebanyakan perempuan penyandang disabilitas dipangkas aksesnya ke perguruan. Hal demikian berkebalikan dengan yang dialami oleh laki-laki disabilitas.

Sedangkan studi tentang gender dan *disability* yang dilakukan oleh Gerschick¹²⁶ tentang kedisabilitas di negara-negara industri Barat mengungkap tentang pola dimensi publik dan swasta. Dalam kenyataannya, contoh bias gender yang ditemukan di arena publik adalah berikut:

- a. Disabilitas diklasifikasikan lebih banyak kepada perempuan, daripada laki-laki, terutama karena jumlah populasi perempuan yang menua. Ini artinya proporsi orang yang menua lebih besar berasal dari perempuan dengan *impairment* (gangguan/penurunan). Maksudnya di sini adalah bahwa usia perempuan cenderung lebih panjang, sehingga kemungkinan untuk menjadi penyandang disabilitas juga lebih tinggi, dengan kondisi fisik yang mengalami gangguan atau kelemahan fisik;
- b. Sementara itu, penyandang disabilitas yang jauh lebih mungkin untuk mengalami kemiskinan adalah perempuan, bukan laki-laki, terutama di negara-negara berkembang di mana perempuan banyak menjadi kepala keluarga.
- c. Perempuan muda penyandang disabilitas berpendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki;
- d. Perempuan penyandang disabilitas cenderung berada di angkatan kerja yang dibayar dari laki-laki penyandang disabilitas untuk

¹²⁵ G. Parker, C. Grebe, M. Hirst, M. Hendey, G. Pascall, *Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market*, (University of York: Social Policy Research Unit, 2008), 27.

¹²⁶ Thomas Greschick, "Towards a Theory of Disability and Gender," *Journal of Women and Culture Society*, 25 (4) 2000, 1263-1269.

- wanita nondisabilitas, dan pada umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dari pekerjaan;
- e. Perempuan penyandang disabilitas cenderung untuk memiliki akses ke rehabilitasi, dan hasil pekerjaan ketika mereka menerima rehabilitasi;
 - f. Persebaran usia penyandang disabilitas perempuan berbeda dari laki-laki (lebih banyak yang tua, dibandingkan dengan usia muda);
 - g. Jenis gangguan perempuan penyandang disabilitas berbeda dari laki-laki. Perempuan lebih mungkin mengalami kondisi degeneratif, sedangkan laki-laki lebih mungkin untuk mengalami cedera;
 - h. Perempuan penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami kerentanan di ruang publik, seperti kekerasan, intimidasi, dan tindakan membahayakan lainnya.

Diperkirakan bahwa sekitar 7–10% dari populasi dunia memiliki beberapa jenis disabilitas, hal ini disampaikan oleh Bruntand.¹²⁷ Secara umum menurut C. Barnes & G. Mercer¹²⁸, disabilitas didefinisikan sebagai pembatasan tindakan atau kegiatan karena kondisi fisik, mental, atau emosional. M Piet¹²⁹ dan Patricia Welch¹³⁰ memaparkan tingkat kemiskinan bervariasi antara negara-negara, tetapi sebagian besar orang miskin di dunia (sekitar 1,2 miliar) tinggal di negara-negara berkembang, yang ditandai dengan tingkat disabilitas yang juga tinggi. Kemiskinan dan disabilitas memengaruhi kemampuan individu, terutama perempuan, dan berdampak pada partisipasi mereka dalam masyarakat.

¹²⁷ Lihat Bruntand sebagai tautan dalam pidato Director-General dalam acara *Interagency Consultation on Disability*, 1(5-16 Juni 1999).

¹²⁸ C. Barnes & G. Mercer, “Disabled People and Community Participation”, dalam Gary Craig & Marjorie Mayo (peny.), *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development* (London: Zed Books, 1995), 33-45.

¹²⁹ M. Peat, “Disability in the Developing World”, dalam M.A. McColl & J.E. Bickenbach (peny.), *Introduction to Disability and Handicap* (Canada: W.B.Saunders, 1998), 43-53.

¹³⁰ Patricia Welch, “Applying the Capabilities Approach in Examining Disability, Poverty, and Gender”, dalam acara *Conference Proceeding-Promoting Women’s Capabilities examining Nussbaum’s Capabilities Approach* di von Hugel Intitute St Edmund College Cambridge pada 2002, 23

Piet¹³¹, Ann Elwan¹³², Patricia dan dikuatkan oleh ADB¹³³, memaparkan bahwa disabilitas dan kemiskinan sangat berkaitan dengan setiap masyarakat. Pada umumnya, disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah sebab dan akibat dari kemiskinan, dan penyandang disabilitas adalah satu di antara yang termiskin dari sekian banyak penduduk miskin. Kemiskinan dan disabilitas satu sama lain sangat berkontribusi terhadap peningkatan pengecualian atau marginalisasi dan kerentanan. Meskipun disabilitas dan kemiskinan mempengaruhi laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, status pada kenyataannya kondisi perempuan dengan disabilitas yang lebih parah dan memprihatinkan.

Lies Marcoes¹³⁴ mengungkapkan bahwa pembahasan gender dan disabilitas seringkali terjebak ke dalam dua domain yang berbeda, isu gender dan disabilitas kerap kali dikotak-kotakan. Dalam feminisme ada istilah *interseksionalitas*, sebuah terobosan penting untuk memahami bahwa ada irisan-irisan yang saling berhubungan dan membentuk diagram venn yang bermuara kepada praktik diskriminasi berganda. Sedangkan menurut Ro'fah¹³⁵ perjuangan isu gender dan disabilitas adalah perjuangan yang sama pentingnya dan hendaknya seiring sejalan, karena keduanya memiliki irisan yang dapat dipertemukan yakni adanya diskriminasi berlapis. Pada perjuangan advokasi perempuan dan disabilitas sering diasosiasikan dengan ketidaksetaraan, marjinalisasi, dan diskriminasi. Ketika perempuan dan disabilitas digabung maka akan terjadi ekuasi (penyamaan). Hal itu disebabkan banyak literatur menyebutkan perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi ganda, bahkan *multiple* sehingga terjadi persimpangan

¹³¹ Hubungan antara kemiskinan dan disabilitas lihat M. Peat, *op. cit.*, 45.

¹³² Ann Elwan, "Poverty and Disability: A Survey of the Literature," SP Discussion Paper No.9932 (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm 15

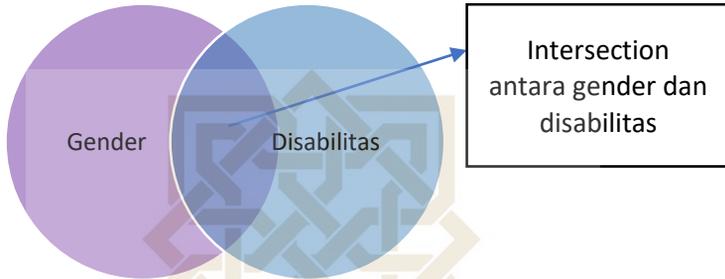
¹³³ Asian Development Bank, *Technical Assistance for Identifying Disability Issues Related to Poverty Reduction* (Manila: Asian Development Bank, 2000). Hlm, 12

¹³⁴ Lies Marcoes, "Gender dan Disabilitas Dua sisi mata Uang yang sama," 6 Oktober, 2020, www.magdalene.co, diakses tanggal 7 oktober 2020.

¹³⁵ Ro'fah, "Persimpangan (*Intersection*) Antara Gender dan Disabilitas: Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas," www.rahma.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

(*intersection*) antara dua identitas ini. Kondisi tersebut akan mendorong langkah-langkah advokasi yang digagas oleh perempuan dengan disabilitas; dan tidak heran jika mereka selalu menjadi bagian penting dalam gerakan-gerakan disabilitas di berbagai lini kehidupan.

Gambar 3: Ilustrasi Diagram Veen Intersection Gender dan Disabilitas



Sumber: Sintesa penulis

Gambar tersebut ilustrasi penulis dari pandangan Lies Marcoes dan Ro'fah, bahwa dalam feminisme ada banyak irisan-irisan. Salah satu irisan adalah antara gender dengan disabilitas yang mengakibatkan adanya diskriminasi berganda, yakni terdiskriminasi karena perempuan dan terdiskriminasi karena disabilitas, maka perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berganda.

Sedangkan *intersection* sendiri awal mulanya dicetuskan oleh Kimberlé Crenshaw¹³⁶ adalah seorang ahli teori ras, menurutnya "*Interseksionalitas*" adalah konsep yang sering digunakan dalam ilmu sosial kontemporer. Teori ini menjawab berbagai pertanyaan tentang bentuk ketidaksetaraan dan identitas saling berkaitan dalam konteks yang berbeda namun dalam seiring waktu yang bersamaan, misalnya, keterhubungan ras, kelas, jenis kelamin, kedisabilitas, dan sebagainya.

¹³⁶ K.W. Crenshaw, "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color," dalam K. Crenshaw, N. Gotanda, G. Peller, & K. Thomas (Eds.), *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement* (New York, NY: New Press, 1995), 357-383.

Sedangkan Davis¹³⁷ menambahkan istilah *intersectionalitas* yang digunakan pada seluruh ilmu sosial. Menurutnya, sekalipun kata tersebut menjadi kata kunci yang terkadang kurang spesifik dan tidak jelas. Kimberle Crenshaw menjelaskan teori tersebut. Kemudian dipaparkan bahwa pendekatan *intersection* adalah konsep untuk mengenali fakta bahwa setiap anggota kelompok yang mengalami bias, terutama pada kelompok rentan, memiliki identitas berbeda dan dapat beradaptasi dalam mengalami bias tersebut. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Pria dan wanita sering mengalami rasisme secara berbeda, sebagaimana wanita dari ras yang berbeda dapat mengalami seksisme secara berbeda, dan seterusnya. Akibatnya, pendekatan interseksional melampaui analisis konvensional untuk memfokuskan perhatian kita pada cedera yang mungkin tidak kita kenali. . . untuk 1) menganalisis masalah sosial secara lebih lengkap; 2) membentuk intervensi yang lebih efektif; dan 3) mempromosikan advokasi koalisi yang lebih inklusif.¹³⁸

Selain teori model yang diungkapkan di atas, pendekatan gender, disabilitas dan *intersection* ini juga menjadi alat analisis penulis untuk menganalisis kondisi perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pendidikan baik secara kultural, yakni dalam keluarga dan sosial masyarakat maupun pada ranah struktural, yakni kebijakan dan implementasi kebijakan di DIY.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni meneliti tentang persepsi, pandangan, dan pemahaman yang berkaitan dengan akses perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan. Di dalamnya termasuk juga dikaji pengalaman perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, baik formal dari pemerintah maupun pendidikan nonformal dalam keluarga dan

¹³⁷ K. Davis, "Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful. *Feminist Theory*, 9, 2008, 67-85.

¹³⁸ *Ibid.*

masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Lexi J Meleong¹³⁹ dan Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln,¹⁴⁰ penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena yang dialami subjek penelitian yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan persepsi. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkan dari berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, sejarah interaksional, dan visual yang menggambarkan makna keseharian dan problematika dalam kehidupan seseorang. Sejalan dengan itu, para peneliti kualitatif selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang sedang dihadapi.

Lincoln dan Guba¹⁴¹ dalam *Naturalistic Inquiry* menjelaskan lebih detail tentang pendekatan penelitian kualitatif. *Pertama*, secara ontologis penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengonstruksi realitas yang dia lihat. Dalam gagasan penelitian kualitatif masing-masing orang dilibatkan dalam penelitian sebagai partisipan atau subjek untuk bersama-sama mengonstruksi realitas. *Kedua*, secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan atas nilai dan *judgment* nilai, bukan fakta. Dalam pandangan umum di lapangan, mereka mengklaim bahwa nilai peneliti bisa memandu dan membentuk kesimpulan penelitian sebab peneliti membangun realitas dari penelitian. Dalam waktu yang sama, peneliti memiliki sensitivitas terhadap realitas yang diciptakan oleh orang lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya berdasar perbedaan-perbedaan nilai. Semua temuan dalam penelitian kualitatif yang dinegosiasikan secara sosial diakui sebagai kebenaran. *Ketiga*, penelitian kualitatif bersifat empiris dan ilmiah sebagaimana penelitian kuantitatif, meskipun dasar-dasar filosofis penelitian kualitatif, baik secara ontologis maupun epistemologis, dipandu oleh *judgment* nilai yang subjektif. Lincoln dan Guba memecahkan masalah empiris dengan sebuah kuasi

¹³⁹ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2009), 6-7.

¹⁴⁰ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

¹⁴¹ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: Sage Publications, Inc., 1985), 70-91.

grounded theory, yakni pendekatan terhadap pola-pola. Lincoln dan Guba¹⁴² menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam sebuah penelitian (*research instrument*) dan menugaskan peneliti untuk meloloskan data secara intens serta mengidentifikasi “tema-tema” yang “muncul” dari data. Tema-tema valid ditentukan (dimunculkan) dengan melakukan triangulasi antara tema-tema sudah dimunculkan dalam instrumen peneliti dengan hasil interpretasi dari format-format data yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan triangulasi yang saksama, peneliti dapat meyakini penelitiannya sebagai hasil penelitian yang hati-hati, ketat, dan sama mahirnya dengan peneliti kuantitatif.

Maka dalam penelitian ini fenomena yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi sumber utama data yang kemudian dikaitkan dengan kondisi dalam keluarga, masyarakat dan kebijakan pemerintah. Melihat begitu kompleksnya temuan di lapangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dalam menganalisis data yang ada, seperti pendekatan disabilitas, gender, pendidikan, dan psikologi yang mencakup *coping* spiritual dan *coping* psikologi. Pendekatan yang multidimensional tersebut demi memperjelas data di lapangan tentang kondisi perempuan penyandang disabilitas dan yang melingkupinya dalam memperoleh dan mendapatkan layanan pendidikan.

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono¹⁴³ mendefinisikan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya informan memiliki informasi yang penting sesuai dengan data yang peneliti harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel data yang pada awalnya sedikit lama kelamaan menjadi besar, seperti bergulingnya bola salju. Bungin B¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*, 187-220.

¹⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2009). 300.

¹⁴⁴ Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

mengutarakan bahwa dalam menentukan informan kunci (*key informan*) dilakukan dengan sengaja atau bertujuan sesuai dengan situasi sosial yang sarat informasi.

Penelitian ini *menggunakan* teknik *purposive sampling* dengan menemukan informan kunci (*key informan*) untuk menentukan informan yang paling mengetahui data pendidikan penyandang disabilitas seperti aparat pemerintah, penyandang disabilitas itu sendiri dan aktivis organisasi yang bergerak mendampingi penyandang disabilitas. Pengambilan sampel data tersebut dilakukan secara *snowball sampling* yakni dari satu informan kemudian berkembang ke informan lainnya hingga mendapatkan data yang diharapkan secara lengkap, sampai menemukan titik jenuh.

a. *Observasi*

Pada penelitian ini observasi diperlukan untuk mengamati kegiatan dan pengalaman perempuan penyandang disabilitas tentang akses dan kontrolnya dalam pendidikan. Riduwan¹⁴⁵ dan S. Margono¹⁴⁶ menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan objek secara langsung dan dari dekat. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang. Lalu observer melakukan perubahan atas penilaian atas momen tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

b. *Indepth Interview (Wawancara Mendalam)*

Pada penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam dalam proses pencarian data tentang akses pendidikan bagi perempuan

¹⁴⁵ Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.

¹⁴⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 159.

penyandang disabilitas. Gros Keraf¹⁴⁷ dan Kaelan¹⁴⁸ menjelaskan pengertian dan tujuan wawancara mendalam dalam sebuah penelitian, yakni suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau praktisi. Menurut mereka, wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam tentang akses perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Wawancara Mendalam

Informan	Jumlah
Perempuan Penyandang Disabilitas	10 orang (setiap kabupaten/kota 2 orang)
Orangtua /Keluarga Penyandang Diabilitas	10 orang (setiap kabupaten/kota 2 orang)
Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Disan Sosial, Kepada Desa dan perangkatnya)	15 orang (setiap kabupaten kota 3 orang)
Tokoh Agama ('Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, Nasyiatul 'Aisyiyah, MPM Muhammadiyah dan LP Ma'arif NU)	10 orang (setiap organisasi 1-2 orang)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): SIGAB, SABDA, dan YAKKUM	3 orang

Penulis melakukan penelusuran dalam mencari informan perempuan penyandang disabilitas berbekal data yang dikeluarkan oleh Penerima bantuan Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing

¹⁴⁷ Gros Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar kepada Kemahiran Bahasa* (Ende: Nusa Indah, 1989), 161.

¹⁴⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

kabupaten. Penulis memilih satu desa di dua kecamatan tiap kabupaten. Sumber informasi dari PKH merupakan satu-satunya data yang tersedia untuk mencari informan tersebut karena belum adanya data rinci tentang jumlah penyandang disabilitas di tiap kecamatan dan desa. Beberapa informasi yang tertulis tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya usia informan yang tertulis adalah berusia 40 tahun namun setelah ditelusur usia calon informan sudah berusia 70 tahun, bahkan ada yang berusia 90 tahun. Selain itu nama yang tercantun di data PKH sering kali tidak cocok dengan nama yang ada di lapangan, beberapa informan juga belum terdata di PKH. Penulis juga mendapatkan informasi tentang keberadaan perempuan penyandang disabilitas dari perangkat desa dan penduduk setempat.

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

Diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* sebagai sebuah metode penelitian adalah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi, sebagaimana tertulis dalam *Focused Group Discussion* karya Irwanto. Menurut Rianto Aji¹⁴⁹ dalam *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, FGD dibutuhkan jika data survei dan wawancara kurang dapat dipahami untuk menghasilkan data kualitatif yang bermutu. Metode ini juga relatif cepat untuk mendapatkan data serta cocok bagi permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Pada penelitian ini, FGD bertujuan menggali data tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pendidikan. Pemilihan informan dalam FGD menggunakan forum-forum atau komunitas penyandang disabilitas yang ada di DIY yang sudah dibentuk oleh organisasi masyarakat atau LSM, seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PPM), dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang Wirobrajan Yogyakarta. Rincian FGD yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

¹⁴⁹ FGD sebagai sebuah *metode penelitian* adalah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi dalam buku Irwanto, *Focused Group Discussion* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

Tabel 4. Peserta FGD

Peserta FGD	Kriteria	Jumlah
HWDI cabang Wirobrajan Yogyakarta	Anggota	15 orang
Bank Difabel dampingan MPM PP Muhamamdiyah	Anggota	30 orang

d. Penggunaan Dokumen

Dokumen tertulis yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk mencari data terkait dengan berbagai hal atau variabel. Bahan tertulis tersebut berupa buku, catatan laporan, majalah, jurnal, makalah, dan sebagainya.¹⁵⁰ Dalam penelitian ini, data-data yang dicari berkaitan dengan peraturan daerah untuk layanan pendidikan, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas. Di samping itu juga dicari tahu bahan-bahan kurikulum pendidikan di sekolah, majalah, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan aksesibilitas perempuan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan.

e. Keabsahan Data

Dalam rangka memeriksa kebenaran atau keabsahan data kualitatif ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan modus penggunaan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu makna. Artinya ialah informasi yang diperoleh dari satu sumber data, lalu dilakukan pengecekan pada sumber data yang lain atau biasa disebut dengan validitas kontekstual.¹⁵¹

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni di empat kabupaten: Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, serta satu kota madya di Yogyakarta. Alasan pemilihan daerah tersebut didasari atas beberapa pertimbangan. *Pertama,*

¹⁵⁰ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.

¹⁵¹ Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011), 257.

Provinsi DIY memiliki peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dari perda tersebut peneliti menganalisis apakah perempuan penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan formal. *Kedua*, kemudahan akses lokasi penelitian. Keterjangkauan lokasi penelitian menjadi faktor penting yang mempertimbangkan kemampuan tenaga dan waktu peneliti.

g. *Subjek Penelitian*

Subjek penelitian ini dapat dijabarkan pada tabel berikut yakni terdiri dari:



Tabel 5. Subjek Penelitian

Subjek	Kriteria	Jumlah	Keterangan
Perempuan penyandang disabilitas	Berusia 17 tahun ke atas	Setiap kabupaten sebanyak dua orang. Jadi total berjumlah 2x5 (kabupaten/kota madya)= 10 orang.	Pada usia ini informan sudah dapat menceritakan pengalaman dirinya dalam mengakses pendidikan.
Keluarga/orang tua perempuan penyandang disabilitas	30 tahun ke atas	Tiap kabupaten 2 orang jadi total berjumlah 2x5 (kabupaten/kota madya)= 10 orang	Keluarga/orang tua bisa menambahkan cerita tentang pengalaman masa kecil anak perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.
Tokoh agama dan tokoh masyarakat	30 tahun ke atas	Tiap kabupaten 1 orang jadi total 1x5 (kabupaten/kota madya)= 5 orang	Memberikan keterangan tentang akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas di masyarakat.
Aparat Pemerintah (dians Sosial, dinas Pendidikan dan Olah Raga)	30 tahun ke atas	Tiap kabupaten 2 orang jadi total 2x5 (kabupaten/kota madya)= 10 orang	Memberikan keterangan tentang kebijakan dan layanan pendidikan di DIY

h. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, *pertama*, sumber data utama (primer) yang berupa kata-kata dan tindakan responden (manusia), hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexi J Meleong.¹⁵² Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari jawaban perempuan penyandang disabilitas, keluarga perempuan penyandang disabilitas, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Teknis pengambilan data utama dilakukan melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan subjek penelitian, kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dan pengambilan foto.

Sumber data *kedua* adalah sumber data tambahan (sekunder) yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, dan dokumen/arsip pemerintah. Data tambahan lainnya diambil dari undang-undang, surat-surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI, peraturan daerah, maupun kebijakan dan kurikulum pendidikan sekolah, baik Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Sedangkan sumber data statistic membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek latar penelitian. Dalam hal ini, data statistik itu berupa jumlah perempuan penyandang disabilitas dan laki-laki penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.

2. Metode Analisis Data

Sebelum memaparkan metode analisis, dipaparkan terlebih dahulu bahwa pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan gender, yakni mengkaji masalah perempuan penyandang disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik dari pandangan konsep studi Islam, konsep relasi gender dan konsep disabilitas. Teori-teori tentang studi Islam, gender, dan disabilitas tersebut digunakan sebagai alat analisis.

Metode analisis data, menurut Joko Subagyo,¹⁵³ adalah kegiatan yang mengolah data agar dapat diperoleh suatu kebenaran atau

¹⁵² Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157-162.

¹⁵³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta1991), 50.

ketidakbenaran. Pembahasan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan FGD yang dianalisis. Data yang diperoleh dan disusun dalam kategori-kategori tertentu, mengacu pada pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Setelah dikategorikan maka akan muncul tema-tema yang berkaitan dengan hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Langkah selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis dengan analisis gender dan disabilitas dari beberapa teori yang dipaparkan pada bab ini, yakni teori tentang studi Islam, teori gender, dan teori disabilitas.

Data tentang pandangan perempuan penyandang disabilitas, misalnya, akan memperdalam perumusan kategorisasi dan memunculkan tema-tema tentang akses peluang atau kesempatan perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan, baik dari sejak lahir hingga dewasa, dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga formal. Data tentang pandangan keluarga atau orangtua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan pemerintah akan memperkuat analisis gender tentang akses dan kontrol pengaruh pendidikan di keluarga dan masyarakat.

Dalam analisis ini dilakukan interpretasi berupa pemaknaan akan fakta sosial dan budaya yang berkaitan dengan berbagai fenomena. Oleh karena itu, dalam analisis ini diharapkan berbagai macam fenomena sosial budaya akan berkaitan dengan pandangan perempuan penyandang disabilitas tentang hak pendidikan mereka, sehingga hasilnya akan dideskripsikan secara jelas sehingga kualitas penelitian ini dapat diharapkan sesuai realitas.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian disertasi ini terdiri dari enam bab yang disusun secara integratif, sehingga dapat menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang dicari sekaligus memberikan kontribusi keilmuan dan kemanusiaan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi pengantar penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengapa, apa yang dikaji, untuk apa, dan dalam bingkai apa dan bagaimana penelitian disertasi ini ditulis. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang

konsep-konsep dan teori yang dipakai menjadi alat analisis yakni meliputi konsep keilmuan Islam, konsep gender, disabilitas dan *intersection* yang kemudian dilengkapi pada telaah pustaka yaitu memaparkan artikel pada jurnal, buku, majalah dan referensi terkait yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Semua uraian tersebut terdapat di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Juga dalam kerangka teori, telaah pustaka, serta metode penelitian.

Bab kedua membahas Dominasi Tafsir Tekstual tentang Disabilitas di kalangan Muslim Yogyakarta. Terbagi dalam dua sub-bab yakni *pertama* tentang pemahaman agama yang *bayānī* tidak diiringi *burhānī* dan *irfānī* menghambat perempuan penyandang disabilitas. Pada sub-bab ini diuraikan tentang pandangan keluarga Muslim dalam memaknai disabilitas sebagai takdir dan cobaan, kemudian menguraikan konsep ikhlas dengan kedisabilitasan menghambat hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. *Kedua* membahas hambatan dan tantangan dalam membumikan ayat-ayat advokasi. Pada sub-bab ini pula diuraikan tentang tema-tema disabilitas belum menjadi topik utama kajian tokoh agama, interpretasi zakat, infak dan sedekah untuk penyandang disabilitas, serta implementasi ayat-ayat advokasi.

Bab ketiga dengan tema Konstruksi Gender Menghambat Kebebasan Hak Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas. Gambaran pada bab ini mendeskripsikan perjuangan gender dan perempuan penyandang disabilitas di DIY, yakni menjelaskan dan menemukan pemahaman yang utuh tentang perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan. Terdiri dari tiga sub-bab yang *pertama* profil perempuan penyandang disabilitas, *kedua* prespektif keluarga dan masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas, *ketiga* tentang peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan.

Bab keempat dengan tema Peta Gerakan Organisasi Perempuan dan Organisasi Islam terhadap Isu Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Pada bab ini dipaparkan menjadi 2 sub-bab: *pertama* tentang gerakan isu penyandang disabilitas dan gender dan *kedua* tentang gender

dan penyandang disabilitas dalam perspektif Islam.

Bab kelima Keadilan Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Tata Pemerintahan yang Baik di DIY. Pada bab ini dipaparkan menjadi tiga sub-bab: *pertama* kebijakan pemerintah DIY tentang disabilitas, *kedua* tentang Strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan untuk penyandang disabilitas, *ketiga* diuraikan tentang tata pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Bab keenam merupakan ilustrasi dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitan disertasi ini.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

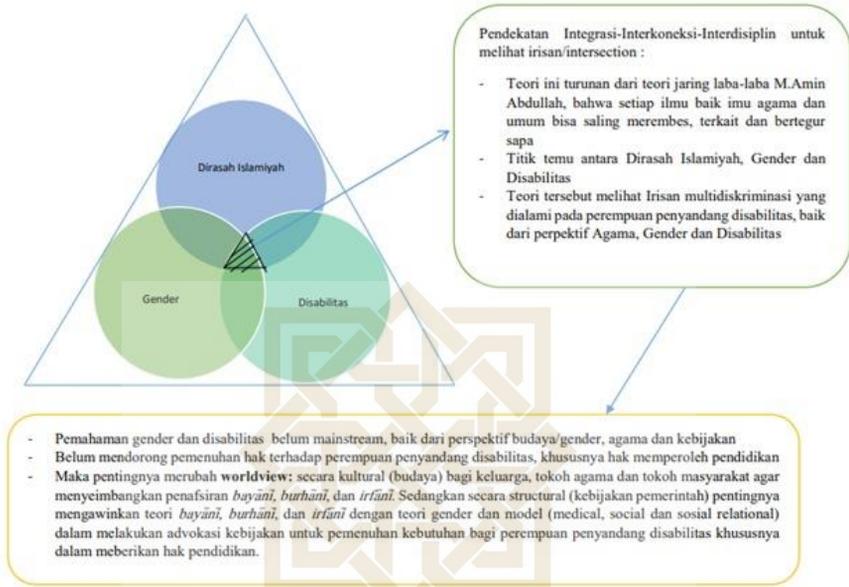
Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Disertasi ini telah mengelaborasi dan mempertautkan berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Secara teori disertasi ini menggunakan analisis teori *integrasi-interkoneksi* dan *interdisiplin* yakni teori yang dimunculkan oleh M Amin Abdullah. Titik temu antara ilmu sosial dan keilmuan Islam menjadi keniscayaan yang harus dilakukan dalam menganalisis satu permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah akses pendidikan perempuan penyandang disabilitas, penulis mengawinkan tiga pendekatan dalam menganalisis permasalahan tersebut, yakni mempertemuan analisis *intersection* (irisan antara gender dan disabilitas), *al-Fikr al-Dīn* dan *dirāsat Islamīyah (Islamic studies)* yakni konsep berpikir *bayānī burhānī dan irfānī* dipertemukan dengan teori model (*medical model/carity model, social model dan social-relational model*).

Letak urgensi dan keunikan disertasi di sini adalah mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Di sini sangat tampak sekali keduanya harus saling bertegur sapa dan pada kenyataannya sangat diperlukan pendekatan keduanya. Novelty atau temuan baru dalam disertasi ini adalah **segitiga Intersection : Integrasi-Interkoneksi dan Interdisiplin**. Sedangkan Ilustrasi dari pertemuan ilmu umum dan ilmu agama dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar : Segitiga Intersection Integrasi-Interkoneksi-Interdisiplin :
Dirasah Islamiyah, Gender, dan Disabilitas**



Pada tataran praksis perempuan penyandang disabilitas mengalami beban multidiskriminasi, yakni dari sisi gender perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Ditambah lagi, bila mereka berasal dari kalangan keluarga miskin, maka akan semakin terdiskriminasi dari akses pendidikan karena ketiadaan biaya melanjutkan pendidikan. Keluarga (orang tua dan saudara) masih banyak yang belum mendukung pendidikan bagi perempuan disabilitas. Di sinilah terlihat adanya irisan atau bisa dikatakan adanya *intersection* multidiskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas yakni perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Perlunya dukungan keluarga kepada para perempuan penyandang disabilitas agar dapat termotivasi, semangat dan memiliki *self-confidence* (kepercayaan diri) dalam menghadapi hidup serta memiliki pertahanan diri yang kuat dalam menghadapi hidup jika dapat mandiri di kemudian hari.

Masih ada masyarakat yang mengucilkan perempuan disabilitas, bukan dalam bentuk verbal, tetapi dalam bentuk kesempatan, sehingga

peran perempuan disabilitas di masyarakat masih kurang. Selain itu tokoh agama belum banyak yang membahas tentang tema-tema disabilitas dan gender. Mayoritas penceramah mengkaji tentang ilmu agama yang berkaitan dengan *aqidah, tauhīd, akhlak, ibadah, fikih, dan mu'amalah*. Kajian masih bersifat *'ulūm al-dīn*, sedangkan jika mengkaji dengan menggunakan *al-fikr al-Islāmīy*, maka kajiannya akan lebih luas dan komprehensif, non-sektarian, tidak *provincial*, dan tidak *parokial*. Pembahasan tentang penyandang disabilitas adalah bagian dari berpikir *al-fikr al-Islāmīy* yang sangat penting untuk dikembangkan dan dikaji secara terus-menerus. Hal ini dimaksud dan diharapkan agar kajian Islam akan selalu segar dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Organisasi perempuan Islam sudah banyak memasukkan pengarusutamaan gender sejak awal berdirinya, walaupun setiap tahun persoalan mengenai gender menjadi pekerjaan rumah yang terus muncul. Akan tetapi pengarusutamaan disabilitas belum secara masif dilakukan, bahkan, ada yang baru di tahap mengkaji konsep dan baru beberapa saja yang sudah masuk pada tahap mengadvokasi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, masih saja belum menjadi kebijakan organisasi dari pusat hingga menurun sampai struktur di bawahnya.

Secara konsep Islam tidak hanya cukup difahami dengan *'ulūm al-dīn (religious knowledge)* saja, namun diperlukan pemahaman *al-fikr al-Islāmīy (Islamic thought)*, dan *dirāsāt Islāmīyah (Islamic studies)*. Pemahaman *'ulūm al-dīn* sebagai representasi “tradisi lokal” keislaman yang berbasis pada “bahasa” dan “teks-teks” atau *naṣ-naṣ* keagamaan, *al-fikr al-Islāmīy* sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis kepada rasio-intelekt. Secara kontekstual, memahami Islam diperlukan tiga pendekatan yakni *irfānī*, *burhānī* dan *bayānī*. Dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut, pemahaman tentang penyandang disabilitas akan lebih humanis dan kebijakan pemerintah yang dilahirkan akan memiliki nilai *egaliter* yakni menghargai martabat *dignity* yang setara untuk penyandang disabilitas dan non disabilitas.

Secara konseptual, Islam mengajarkan untuk menghargai sesama manusia. Islam sangat mendorong manusia untuk menuntut ilmu tak terkecuali untuk perempuan penyandang disabilitas, letak kualitas

keimanan dan ketaqwaan yang menentukan derajat tertinggi dihadapan Allah, bukan kondisi fisik manusia. Di sini Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan pembelaan dan advokasi kepada penyandang disabilitas. Di sisi lain dari keilmuan umum, konsep-konsep kesetaraan gender, HAM dan disabilitas sangat mendukung teori Islam bahwa dalam melakukan pendekatan dan advokasi kepada penyandang disabilitas tidak cukup dengan *individual model*, *charity model*, dan *medical model* saja, namun diperlukan *social model* yakni masyarakat dan pemerintah ikut merasakan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, dalam konteks disertasi ini adalah memberikan hak pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. Kemudian pada perkembangan decade baru-baru ini pendekatan *medical model/charity model* dan *social model* tidak dapat dilakukan secara parsial yakni terpisah-pisah, namun hendaknya dilakukan secara bersamaan karena memperjuangkan hak penyandang disabilitas tidak cukup tanpa mengetahui tipe kedisabilitasannya mereka, sehingga kebijakan yang dilahirkan hendaknya sesuai dengan kebutuhan tipe kedisabilitasannya mereka, maka pendekatan *social relational model* menjadi jalan tengah mempertemukan *medical model/charity model* dengan *social model*.

Kebijakan pendidikan bagi disabilitas sudah diatur, baik oleh pemerintahan pusat melalui, salah satunya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maupun peraturan daerah provinsi dan perda kabupaten-kota. Namun, kebijakan tersebut belum spesifik menyebutkan persentase hak pendidikan untuk perempuan disabilitas atau bisa dikatakan belum menggunakan analisis *intersection*. Hal ini sangat menghambat *afirmasi of action* kepada perempuan penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan di lembaga formal. Kebijakan pendidikan yang sudah mengarusutamakan isu disabilitas masih belum diiringi *budgeting* yang memadai, misalnya belum tercukupinya sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sumber daya manusia (tenaga pengajar/guru), dan layanan transportasi. Selain itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi dan bantuan untuk penyandang disabilitas belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dan kendala-kendala dalam mengimplementasikan program,

yang sangat disayangkan lagi adanya penyelewengan anggaran atau dana yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, masyarakat atau instansi. Dengan kondisi demikian, masih banyak disabilitas laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan ideal.

Di sisi lain belum semua organisasi perempuan Islam mendorong pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas. 'Aisyiyah sudah memiliki pendidikan formal sekolah luar biasa (SLB) selain itu juga sudah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah dasar hingga SLTA untuk menerima siswa penyandang disabilitas yakni mendorong sekolah-sekolah siap inklusi, tetapi belum secara spesifik mengkhususkan *afirmatif of action* bagi perempuan disabilitas. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), ada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang hingga 5 tahun ke depan mempunyai program pendidikan bagi disabilitas di madrasah-madrasah Ma'arif NU. Program ini tidak hanya membuka konsep dan praktik inklusif di madrasah LP Ma'arif NU, tetapi juga mendorong kebijakan legal-formal maupun kebijakan fiskal. Selain itu membentuk kelompok kerja disabilitas di wilayah Jawa Tengah, namun sama halnya dengan organisasi 'Aisyiyah belum ada secara khusus mendorong *affirmative action* bagi perempuan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan.

Pemerintah DIY sudah membentuk POKJA DISABILITAS baik tingkat provinsi maupun kabupaten-kota, namun keterlibatan kelompok agama belum ada baik dari departemen agama maupun organisasi keagamaan. Padahal jika komite IX atau Pokja Disabilitas telah melibatkan kelompok agama, maka sosialisasi pengarus utamaan disabilitas akan lebih luas dan cepat, tentu saja dengan begitu akan lebih memudahkan desa, kota dan provinsi inklusi, karena inklusi adalah salah satu ciri tata pemerintahan yang baik.

Pada disertasi ini menunjukkan bahwa agama dalam hal ini konsep Islamic studies dapat dipertemukan dengan berbagai pendekatan ilmu social. Seperti pendekatan *intersection* untuk melihat adanya irisan diskriminasi yang berbasis gender dan disabilitas yang dialami perempuan penyandang disabilitas dipertemukan dengan *al-Fikr al-dīn* yakni pendekatan *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī* untuk melihat konsep

berpikir keluarga Muslim dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan penyandang disabilitas, kemudian dikawinkan dengan teori model yakni pendekatan *medical model/charity model*, *social model* dan *social-relational model* untuk melihat pola advokasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas khususnya dalam mengakses pendidikan, kemudian menganalisis berbagai permasalahan tersebut dengan pendekatan *intersection* yakni adanya irisan multi diskriminasi yang dialami perempuan penyandang disabilitas. *Intersection* yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak sosial politik khususnya hak mendapatkan akses pendidikan adalah disebabkan mereka terdiskriminasi karena perempuan (ketidakadilan gender), terdiskriminasi karena kedisabilitasan dan terdiskriminasi karena kemiskinan.

Multidiskriminasi tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat mengenyam pendidikan, jika ada perempuan penyandang disabilitas yang dapat memasuki lembaga pendidikan namun mayoritas masih pada pendidikan yang levelnya lebih rendah dari perempuan bukan penyandang disabilitas dan masih sangat kesulitan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sekalipun dalam Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, pada pasal 53 ayat 1 menyebutkan pemerintah baik BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen sedangkan pada ayat kedua disebutkan bagi untuk pihak swasta wajib mepekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 persen. Namun prosentasi 1-2 persen tersebut belum menjamin pemenuhan pekerjaan bagi perempuan penyandang disabilitas karena mereka masih harus bersaing dan berebut kursi dengan laki-laki penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadikan penyebab banyaknya perempuan penyandang disabilitas berpandangan bahwa pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi tidaklah penting. Maka pendidikan vokasi (kerampilan seperti menjahid, border, membatil, dll)

menjadi pilihan bagi perempuan penyandang disabilitas untuk menjamin masa depan keberlangsungan hidup mereka.

Kondisi tersebut mendorong pentingnya melakukan pendampingan dan perjuangan advokasi untuk perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural perlunya kesadaran kepada keluarga dan masyarakat tentang konsep *nrimo*, ikhlas dan takdir dalam hal ini pemahaman *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī* harus seiring sejalan tidak dapat dipamahi dengan cara terkotak-kotak. Pentingnya mendorong pemuka agama untuk dapat menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kontek penyandang disabilitas dengan pendekatan *bayānī*, *burhānī* dan *irfānī*. Sedangkan secara structural adalah dengan menciptakan kebijakan yang sensitif dan *affirmative action* bagi perempuan penyandang disabilitas, pendekatan teori model juga tidak dapat dilakukan secara parsial, namun pendekatan *medical/charity model* dan *social model* harus disandingkan yakni pendekatan *social-relational model* menjadi jembatan dalam memenuhi hak social politik perempuan penyandang disabilitas, khususnya hak memperoleh layanan pendidikan. Advokasi tidak hanya berhenti pada lahirnya kebijakan saja, namun implementasi dalam menjalankan kebijakan lebih utama, karena dengan begitu maka akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang berkeadilan gender.

B. Saran

Diskursus Agama dalam hal ini konsep Islam menunjukkan dapat di pertemuan ilmu umum atau dalam konteks disertasi ini ilmu social yakni tentang gender dan disabilitas. Jika dalam memahami al-Qur'an diperlukan pendekatan *irfānī*, *burhānī* dan *bayānī*, maka ketika dikaitkan dengan isu perempuan penyandang disabilitas adalah ketika seseorang (keluarga, masyarakat, pemerintah) sudah berpikir *irfānī* yakni ikut merasakan apa yang disarakan oleh perempuan penyandang disabilitas, yakni dengan memberikan hak sosial politiknya salah satunya hak memperoleh pendidikan. Teori ini sebenarnya sangat berkaitan dengan teori model yakni tidak cukup dengan *individual model*, *charity model*

dan *medical model* saja, namun diperlukan *social model*, yakni masyarakat dan pemerintah ikut merasakan dan bertanggung jawab dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dalam hal ini khususnya perempuan penyandang disabilitas. Sekalipun dalam perkembangannya pendekatan teori model tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, yakni harus disandingnya antara *medical model* dan *social model*, dengan pendekatan *social relational model* maka hak memperoleh pendidikan bagi perempuan penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan tipe kedisabilitasannya.

Ada beberapa pendekatan dalam mengimplementasikan konsep islam dalam mendekonstruksi tafsir disabilitas baik bagi keluarga Muslim maupun tokoh agama serta pemerintah dalam melakukan pembelaan dan advokasi kepada penyandang disabilitas. Dari sisi keluarga, orang tua yang merupakan salah satu sumber utama dalam memberikan motivasi kepada perempuan disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan. Pentingnya orang tua memberikan kekuatan dan memandirikan perempuan penyandang disabilitas agar tetap kuat (*struggle*) dan semangat dalam hidup, pentingnya mendekonstruksi konsep *takdir* dan *ikhlas* sedangkan dalam konteks masyarakat jawa konsep *nrimo* yang melemahkan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Kemudian masyarakat juga perlu disadarkan secara terus-menerus untuk menciptakan daerah inklusif sehingga penyandang disabilitas harus diakui dalam kegiatan bermasyarakat.

Tokoh agama hendaknya mengkaji tema-tema kajian secara komprehensif, baik *'ulūm al-dīn*, maupun *al-fikr al-dīnī*. Keduanya harus dipahami keterkaitannya sebagai jaring laba-laba yang saling merembes dan bertemu, dalam kaitan ini seperti hubungan antara ilmu agama, gender, dan penyandang disabilitas yang semuanya mempunyai titik temu. Di sinilah pentingnya keterlibatan kelompok agama, baik dari pemerintah seperti dari departemen agama maupun dari organisasi Islam pada pokja disabilitas di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Hal ini dimaksudnya untuk memberikan *efek domino* (penyebaran isu secara luas) kepada masyarakat luas tentang pentingnya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, selain itu kebijakan yang sifatnya untuk layanan

pendidikan di sekolah-sekolah inklusi keagamaan dan swasta milik organisasi Islam dapat tersosialisasi dengan baik

Kebijakan peraturan daerah harus diiringi dengan kebijakan fiskal karena perjuangan aksesibilitas untuk disabilitas akan sia-sia atau tidak berhasil jika kebijakan fiskal tidak diunggulkan juga. Perlunya keseimbangan guru pendidik di sekolah inklusi, baik guru (GPK maupun non GPK) dan SDM harus menguasai tentang penyandang disabilitas atau pemerataan guru SLB (GPK) ke sekolah-sekolah inklusi. Pentingnya kerja bersama antara organisasi keagamaan, LSM yang bergerak di isu gender dan perempuan, serta LSM yang fokus kepada isu penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga hendaknya menjembatani jejaring ini, baik dengan model pokja disabilitas atau wadah jejaring yang lain. Maka pendekatan *intersection* dan *social relational model* sangat penting dalam melahirkan kebijakan yang inklusif di lembaga pendidikan.

Kajian penelitian mengenai gender dan disabilitas dalam disertasi ini menemukan beberapa hal baru. *Pertama*, konsep keilmuan Islam tentang *irfānī*, *burhānī* dan *bayānī* dapat dipertemukan dalam menganalisis *intersection* yakni multidiskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dan kemudian mengharuskan pendekatan teori model untuk mengadvokasi yakni *individual* model, *charity* model, *social* model, dan *social relational* model bahwa yang lebih penting adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah ikut merasakan dan bertanggung jawab akan aksesibilitas perempuan penyandang disabilitas dan hendaknya diiringi dengan kebutuhan tipe kedisabilitasannya. *Kedua*, pemerintah tidak cukup dengan melahirkan kebijakan saja, namun pentingnya pengimplementasian program dan kebijakan anggaran atau budgeting yang setimpang agar aksesibilitas untuk perempuan penyandang disabilitas dapat terealisasi dengan baik secara *afirmatif*. *Ketiga*, peran orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mendorong dan memotivasi perempuan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, memaknai *takdir*, *ikhlas* dan *nrimo* sebagai perempuan penyandang disabilitas secara lebih produktif, sehingga tidak melemahkan anak namun justru menguatkan anak perempuan penyandang disabilitas agar tetap *struggle* dalam bertahan hidup. *Keempat*, kembali ke konsep berpikir *burhānī* dan *irfānī* sangat kuat dan

menjadi keniscayaan untuk dikaji secara terus-menerus oleh para ulama, agar tersosialisasi dengan baik kepada para jamaahnya dalam hal ini bisa jadi jamaahnya adalah para orang tua penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas itu sendiri.

Penelitian tentang tema **Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta: Islam, Gender, dan Politik** ini tentu saja tidak cukup berhenti sampai disini saja, masih sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk memperluas kajian dan tentu saja akan dilahirkan temuan-temuan baru yang akan memperkaya khazanah intelektual di Pascasarjana jurusan Islamic Studies di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Amin, M. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kedua, 2010
- Abdullah, Amin, M “Merajut Paradigma Filsafat Islam Keindonesiaan: Fresh Ijtihad Memperjumpakan ‘Ulum al-din dan Sains^{Modern} dalam keilmuan Keagamaan Islam untuk Pembangunan Bangsa,” dalam *Filsafat Islam: Historisitas dan Aktualisasi: Peran dan Kontribusi Filsafat Islam bagi Bangsa* Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Abdullah, Amin, M. “Pendekatan Multidisiplin dalam Studi Keislaman di Perguruan Tinggi: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga,” disampaikan dalam *Seminar Kondisi dan Prospek Kemampuan Pendidikan Tinggi Mengembangkan Ilmu Pengetahuan*, (Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API) bekerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 20 Agustus 2015)
- Acker,Sandra. “*Feminist Theory and The Study of Gender and Education*,” *International Revue of Education- Revue International de Pedagogie* XXXIII (1987), hlm. 419-435.
- Ali, A. Y. *The Meaning of the Holy Qur’an*. Beltsville, Maryland: Amana Publications, 1996
- Ali,Mohammad. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011), hlm. 257.
- Al-Husain bin Muhammad Al-Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* (Beirut:Dar al-Ma’rifah),
- Al-Ghazaly, Muhammad, Syaikh. *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, alih bahasa oleh Muhammad All-Baqir dari *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. V, 1996.

- Armstrong, Felicity: *Disability, Human Rights and Education*, Cros Cultural Perspektif oleh Len Barton-1999
- Amin, Qosim. *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki Menggugat Perempuan Baru*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Anggara, Sahya. “Kebijakan Publik”, Penerbit Pustaka Setya Bandung, 2018, hlm.197-20
- Asad, M, *Islam at the crossroads*. Kuala Lumpur, Malaysia: The Other Press. (Original work published 1934-1999)
- Asad, M, *Message of the Qur'an*. Lahore, Pakistan: Maktaba Jawahar Ul Uloom,1980
- Armstrong, Felicity. dan Len Barton, “*Disability, Human Rights, and Education*”: Cros Cultural Perspective (McGraw-Hill Education, 1999)
- Bemmelen, Van S. *Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?* Dalam T. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (hal. 175-226). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
- Barbour, Ian G. *Issues in Science and Religion* (New York: Harper Torchbooks, 1966), hlm.182-285. Juga karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Juru bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama*, terj. dari *When Science Meets Religion: Enemies, Strategrs or Partners*, oleh E.R. Muhammad (Bandung: Penerbit Mizan, 2002)
- Bonnie G Smith, Beth Hutchison “*Gendering Disability*”, tahun 2004
- Budi Susanto: *Penyambung Suara Lidah Rakyat* penerbit Kanisius, 2008.
- Barnes, Mercer dan Shakespeare, Barner dan Mercer, “*The Politics of Disablement*”, Macmillman Pres ltd, London, 1999. BPPS 1999

- Barbara, *Women and Gsils with disabilities: Defining the Issues, An Overview*, Copyright Center for Women Policy Studies and Women and Philanthropy, Washington, Dc, 1999
- Barnes, C. & G. Mercer, "Disabled People and Community Participation", dalam Gary Craig & Marjorie Mayo (peny.), *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development* (London: Zed Books, 1995), hlm. 33-45.
- Bazna Maysaa S. & Tarek A. Hattab, "Disability in the Quran: the Islamic Alternative to Defining, Viewing and Relating to Disability," *Journal of Religion, Disability & Health* 9 (1), 2002: 5-27; M. Milles, "Islam, Disability & Deafness: a Modern and Historical Bibliography," *Journal with Introduction and Annotation*, West Midlands, Juli 2007.
- Bélangier, S. *Attitudes des différents acteurs scolaires à l'égard de l'inclusion*. In N. Rousseau and S. Bélangier (Eds.), *La pédagogie de l'inclusion scolaire*, Presses de l'Université du Québec. 2004, hlm. 37-55
- Bradley, H. *Gender*. Cambridge: Polity Press. 2007
- Bradley, H. *Gender* (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 15-16
- Brundtand sebagai tautan dalam pidato Director-General dalam acara Interagency Consultation on Disability, 15-16 Juni 1999). Brundtand., See . as cited in the Director-General speech given at the Interagency Consultation on Disability, 15-16 Juni 1999.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012 hal University Press, 2004)
- Castiglioni, *Introduction To Difable People*, MacmiUman Press ltd, London, 1941. Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*, John Willy and Sons, London, 1981. dalam Rothman, 2003

- Crenshaw, K. W. Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In K.Crenshaw, N. Gotanda, G. Peller, & K. Thomas (Eds.), *Critical race theory: The key writings that formed the movement*, New York, NY: New Press 1995, hlm.357-383
- Cambell, "Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan", Yogyakarta: Kanisius. 1994,
- Chaim, Vardin Rispler- *Disability in Islamic Law* (Dordrecht: Springer, 2006).
- Cole, Mike *Education, Equality and Human Rights: Issue of Gender, Race, Sexuality, Disability and Social Class*, 2006
- Denzin, NK dan Lincoln Y.S, "*Handbook of Qualitative Research*", *Terjemahan, Pustaka Pelajar*
- Davis, K. *Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful*. *Feminist Theory*, 9, 2008, hlm. 67-85.
- Engineer, Ali, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet: I, 1994
- Engel, David. Fronk W. Murger: *Low and identity in the life stories of Americans with Disabilities*, 2003
- Faqih, Mansour: *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Insist Press, 2008
- Fakih, Mansour *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour *Panggil Aku Disabilitas*, dalam buku *Jaian Lain Manifesto Intelektual Organik*, Eko Prasetyo dan Fitria Agustina (ed), Pustaka Pelajar, 2002
- Faisal, Sanafiah. *Sosiologi Pendidikan Surabaya: Usaha Nasional*, 1991

- Fitalaya S. Aida, Hubis, “*Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*”, dalam Dadang S Anshori, dkk (peny.), *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Foucault, M. *Psychiatric Power*. New York, Palgrave MacMillan. 2008, hlm.211
- Froschl, Merle. Ellen Rubin dan Barbara Sprung, “Connecting Gender and Disability,” *Jurnal Gender and Disability Diegest*, November 1999 hlm, 10.
- Fuad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li alfad al-Qur’ann al-Karim*
- Ghofar, Abdul, M. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet, Ke-4, 2010
- Greenstein, A. *Radical Inclusive Education: disability, teaching and struggle for liberation*. Sussex, Routledge, 2016, hlm.8
- Greschick, T.J.C, “*Towards a Theory of disability and Gender*”, in *Signs* 25 (4): PP.1263-1269, tahun 2000
- Grewal, I., & Kaplan, C. *An introduction Women's Studies*, New York: McGrawHill Companies Inc. 2002
- Greenstein, A. *Radical Inclusive Education: disability, teaching and struggle for liberation*. Sussex, Routledge, 2016, hlm.8
- Habib, Lina Abu. *Gender and Disability Women’s Experiences in the Middle Eas* Oxford, Oxfam: 1997.
- Hans Whr, A, *Distionary of Modern Written Arabic* ed.J.Milton Cowan (New York: Ithaca, edisi ketiga pdf).hlm 659.
- Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi: “*Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*”, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Pecirindo, Jakarta, 2006

- Heruputri, Arimbi. dan R. Valentina, *Percakapan tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*, Jakarta: debtWatch Indonesia, 2004.
- Hassel Nogis Tangikilisan, “*Managemen Publik*”, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.17
- Hidayatullah, Syarif *Teologi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Holmes Rolston III, *Science and Religion: A Critical Survey* (New York: Random House Inc., 1987); dalam M. Amin Abdullah, op. cit., 2015, 7.
- Husna, Sarmidi (editor), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bahsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), 2018
- Ilyas, Hamim *Fikih Akbar*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018
- Irwanto, *FGD sebagai sebuah metode penelitian*, FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi dalam buku Focussed Group Discussion oleh Irwanto, Yayasan Obor Indonesia. 2010
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Keraf, Gros. *Komposisi: Sebuah Pengantar kepada Kemahiran Bahasa*, Ende: Nusa Indah, 1989, hlm. 161.
- Kamus bahasa Arab-Inggris Hans Wehr, Hans Whr, *A Distionary of Modern Written Arabic* ed.J.Milton Cowan (New York: Ithaca, edisi ketiga pdf)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta
- Lorber, Judith Lisa Jean Moore : *Gender and the Sosial Construction of Illeness* -2002

- Lang, J. *Even Angels Ask: A Journey to Islam in America*. Beltsville, Maryland: Amana Publications, 1997
- Maertens, F. Évolution des services éducatifs publics du Québec destinés aux élèves ayant des besoins particuliers. In N. Rousseau and S. Bélanger (Eds.), *La pédagogie de l'inclusion scolaire*, Presses de l'Université du Québec, Ste-Foy, 2004, hlm.21-34
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, CD.ROM al-Maktabah Al-Syamilah Isdar Salis. juz 2, hlm.320,
- Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Andi Offset, 2002
- Mathew B Miles and AM Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. TR Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Meleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 6-7.
- Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama, 2011)
- Moser, C.O.N, *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training* (London: Routledge, 1993), hlm. 20.
- Mosse, J. C. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar, 1996), hlm.9.
- Morris, J. *Pride Against Prejudice – A Personal Politics of Disability*. London: The Women's Press. 1991
- Muhajir, N., 1997, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Yogyakarta; Rake Sarasin
- Mujaddid, Kesehatan Anak dengan Disabilitas, Kementerian Kesehatan RI, Belletin Jendela Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014

- Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 253.
- Munir, Zakiyah, Lily. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam perspektif Islam*, 2002.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara, 2010
- Nurhaeni, I. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Surakarta: UNS Press. 2009
- Nugroho, Sapto dan Risnawati. *Meretas Siklus Kedisabilitas Realitas yang Terabaikan*, Ford Foundation dan Yayasan Talenta Surakarta, 2004.
- Nuryanto, Agus *Islam, M.Teologi Pembebasan, dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, Cet I, 2001.
- Oliver, Michael. *Understanding Disability From Theory to Practice*, Palgrave, New York, 1996
- Olliver, Michael dan Colin Barnes, *The New Politics of Disablement* (London: Macmillan Pres ltd, 2012), hlm 29.
- Ostergaard, L. *Gender and Development: A Practical Guide*. New York: Routledge, 1992, hlm, 122-127
- Overboe, J. (2007) Disability and Genetics: Affirming the Bare Life (The State of Exception). *Canadian Review of Sociology*, 44(2), 219-235.
- Panggabean, Hana, dkk. *Kearifan Lokal Keunggulan Global Cakrawala Baru di Era Globalisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hlm 132-133
- Peat, M., *Disability in the developing world*. In M.A.McColl, & J.E.Bickenbach (Eds), *Introduction to disability and handicap* (pp.43-53). Canada: W.B.Saunders (1998)

- Potret Pendidikan Statistik Pendidikan tahun 2018, Diterbitkan Badan Pusat Statistik Pendidikan Jakarta, Indonesia, tahun 2018, hlm 42-47
- Pollner, M (1987) *Mundane Reason: Reality in Everyday and Sociological Discourse*. Cambridge, UK: Cambridge University Press dalam Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, "Hand Book of Qualitative Research", terjemahan Daryanto dkk, Pustaka Pelajar, Cetakan I tahun 2009.
- Purusotam, N., *Between compliance and Resistance: woman and the Middle class way of life in Singapore* dalam Sen, K & M. Stiven, editor, *Gender and Power in affluen Asia*, London & New York: Routledge, 1998.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, "Managemen Pelayanan", Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 19
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta, 2004. Rineka Cipta.
- Ro'fah dan Roosmawati, DN, *Meretas Belenggu Kekerasan, Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Difabel di Kabupaten Boyolali, Klaten Sukoharjo dan Wonogiri*, PPRBM Solo, 2014
- Ro'fah Makin, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra* (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 21.
- Rolston III, Holmes, *Science and Religion: A Critical Survey*, New York: Random House Inc., 1987.
- Sadioglu, O. Batu, S. Bilgin, A dan Oksal, A. 2013. *Problem, Expectations, and Suggestion of Elementary Teacher Regarding Inclusion*. *Educational Science: Theory & Practice*. DOI: 10.12738/estp.20133.1546
- Sapto Nugroho dan Risnawati, *Merentes Skil Kedisabilitas Realitas Yang Terabaikan*, Ford Foundation dan Yayasan Talenta Surakarta, 2004.

- Schlegel, S.A., 1984, “ *Penelitian Grounded Research dalam Ilmu-ilmu Sosial*”, Surakarta: FISIP UNS.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir AL-Mishbah (Pesan da Keserasian Al Qur’an)* (Jakarta: Lentera Hati, Cetakan ke-IV, 2002), 2002.
- Sholeh, Akhmad, “ *Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat,*” tesis magister (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Sholeh, Akhmad, “ *Aksesibilitas Pelayanan penyandang disabilitas terhadap Perguruan Tinggi, Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi di Yogyakarta,*” disertasi doctoral (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. iv.
- Sidiq, Dedi Muhammad. “ *Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,*” Tesis Magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 16-17, tahun 2007
- Smith, Bonnie G dan Beth Hutchison, *Gendering Disability* (New Jersey: Rutgers Budi Winarni, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Pressindo, tahun 1992 hlm 8
- Smith, D.J. *Inclusion, School for All Student*. Penerjemah: Denis, E. Bandung: Penerbit Nuansa. 2012.
- Soelaiman.Joesoef, *Pendidikan Luar Sekolah*, Surabaya : CV Usaha Nasional, 1979
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 1991, hal 50.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALfabeta, 2009 hal 300
- Suryadi, A, & Idris, E. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: PT. Ganesindo. 2004
- Suleman, E. *Pendidikan Wanita di Indonesia*, Dalam T. O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (hal. 227-248). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995

- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Spardley, J.P., "Metode Etnografi" Penerjemahan, Zulfa Misbah Elizabeth, PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1997: XIX
- Surat Edaran No A/A164/VIII/2002/MS dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2002 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
- Tim Dosen IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 125.
- Thohari, Slamet. Mencari Ruang Untuk Difabel, "Menormalkan yang Dianggap Tidak Normal, Difabel dalam Lintas Sejarah", Jurnal Perempuan, Edisi 65 tahun 2010, hlm.48. Dalam Peter Coleridge, Disability, Liberation and Development, Oxfam: UK and Ireland, 1993
- Tuttle, Lisa. "Encyclopedia of Feminism", tahun 1986, dalam Arimbi Heruputri dan R. Valentina, Percakapan tentang Feminisme Vs Neoliberalisme (Jakarta: debtWatch Indonesia, 2004), hlm. 8.
- Tricahyo, Agus. *Metafora dalam Al-Qur'an: Melacak Ayat-Ayat Metafora dalam Al-Qur'an*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).
- Turmusani, M, *Work and Adulthood: Economic survival in the Majority World* dalam Priestley, M. editor, Disability and the life Course, Global perspectives, United Kingdom; Cambridge University Press, 2001
- Unger, R., & Crawford. *Women and Gender a Feminist Psychology*, New York: McGraw_Hill Inc. 1992
- Umar, Nasaruddin, *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, 2000, dalam Maslamah dan Suprapti, Konsep-Konsep Tentang Gender dalam Perspektif Islam, Jurnal SAWWA Vol 9, Nomor 2, April 2014

Umar, Nasaruddin. *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (IL), dan Teater Utan Kayu, 2002

World Vision International *Transformational Development Disability Working Group*, Juli 2006.

William Gavent, David Coulter dan Routledge, *Spiritual and Intellectual disability International perspectives on the effect of Cultural and religion on healing, mind and soul*, 2002 :

William, Walter Lee. *Javanese Lives: Women and Men in Modern Indonesian Society* (New Brunswick & London: Rutgers University Press, 1991).

William Gavent, David Coulter dan Routledge, *Spiritual and Intellectual Disability: International Perspectives on the Effect of Culture and Religion on Healing, Mind and Soul* (London: Routledge, 2002).

Vision, World International Transformational Development Disability Working Group (Juli 2006), hlm 15-16

Artikel/Paper

Abdullah, Amin, M. “Mempertautkan ‘Ulūm Al-Dīn, Al-Fikr Al-Islāmī dan Dirāsat Islāmīyah: Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global,”
<https://aminabd.wordpress.com/2010/06/20/mempertautkan-ulum-al-diin-al-fikr-al-islamiy-dan-dirasat-islamiyyah-sumbangan-keilmuan-islam-untuk-peradaban-global/>
 diakses pada 30 April 2019.

Al-Qurtuby, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, Al- Jami’ Li Ahkam al-Qur’an. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1428 H/2006 M, dalam Sri Handayani, Difabel dalam AlQur’an, INKLUSI: Jurnal of Disability Studies, Vol 3 no 2 Juli-Desember 2016, h.267-284

Al-Aufi, Hiam, Nawaf Al-Ayoud, dan Norbayah Shahmian. “Islam and the Cultural”, hlm. 207-712, dalam *Journal of Adolescence and Youth*, vol 17, No 4 Desember 2012

- Andayani, Muhrisun Afandi, "Pemberdayaan dan Pendampingan komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi," *APLIKASI: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* volume 16, nomor 2, 2016, hlm 153-166
- Analisis gender beserta table diambil dari penelitian oleh Jonattan A. Lassa, Coordinator Hivos Aceh dalam kerja-kerja rekonstruksi di Aceh Kerangka Analisis Perencanaan Gender (*Gender Planning Frameworks*)
- Ann Elwan, "Poverty and Disability: A Survey of the Literature," *SP Discussion Paper* No.9932 (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm 15
- A'rafiyah, N dan Wulandari, T. Filosofi Jawa Nrimo Ditinjau dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, *JIPPK*, volume 2 nomor 2, halaman 132-138, Desember 2017, hlm 132-235
- Asian Development Bank. Technical assistance for identifying disability issues related to poverty reduction (*TAR:OTH 33529*), Manila: Author November, 2000
- Astuti, Juli. Tutik Sulistyowati, Eka Meidianti, Strategi Survival perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Kepala Keluarga: Studi pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Desa Kabuh, kecamatan Kabuh, Kabupaten jombang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol.2.No2 Agustus 2019, hlm,35-46
- Atmadja, In Suny. dan Andrie Irawan, Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan, *UIR LAW REVIEW*, volume 02, Nomor 02 oktober 2018
- Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Analisa Pendidikan. *BPD & BPD*, Karawang. 2009

- Bazna, S Maysaa & Hattab, Tarek A ,“ Disability in the Quran: the Islamic alternative to defining, viewing and relating to disability”. *Journal of Religion, Disability & Health* 9 (1), 2005.
- Bhatty, Isra, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul, dan Mona Amer, “Disability in Islam: Insight into Theology, Law, History, and Practice”, dalam *Disabilities: Insights from across Fields and around the World*. London: Praeger, 2009.
- Brundtand sebagai tautan dalam pidato Director-General dalam acara *Interagency Conultation on Disability*, 15-16 Juni 1999.
- Connell, O’. ’Halloran,O & Doody, Raising a child with disability and dealing with life events: A mother’s journey. *Journal of Intellectual Disabilities*, 17(4), 376–386. Retrieved from <https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/>, 2013 dalam Osman Hatun, Fazilet Yavuz-Birben, Zepnep Ince &Gulay KalkanYeni, The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability, *Journal of SRPIRITUALPSIKOLOGI AND COUNSELING*, 2016, hlm:210
- Dokumen Hasil Tujuan Berkelanjutan, Terjemahan dari Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, *International NGO Forum en Indonesian Development (INFID)*, hlm 17
- Edwards, N. Disability Rights in Indonesia? Problem with Ratification of the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. *Australian Journal of Asian Law*, 15(1), tahun 2014, hlm.1-15.
- Ekşi, H., Hatun, O., Yavuz Birben, F., KalkanYeni, G., Türk, T., Tozlu Güldal, Ş., & Ulaş, E. Reborn: Psychosocial processes of kidney transplant patients [Reborn: Psychosocial processes of patients with renal transplantation.]. Istanbul, Turkey: Nobel Yayıncılık, 2016 dalam Osman Hatun, Fazilet Yavuz-Birben, Zepnep Ince &Gulay KalkanYeni, The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability, *Journal of SRPIRITUALPSIKOLOGI AND COUNSELING*, 2016, hlm:211

- Elizabeth Barnes, 2014, "Valuating Disability and Causing Disability" *Jurnal The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Ethics*, this conten download April 2015
- Elwan, *Sates linkages have been noted between poverty and disability but not systematically examined*, 1999
- Fine dan Asch, "Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Diskrimination, and Activism," *Journal of Social Issues*, Vol. 44, No 1, 1988. hlm. 3-21.
- Froschl, Merle. Ellen Rubin dan Barbara Sprung, Educatio equality Concept, Connecting Gender and Disability, Equality Resource Center, *Women Education Equality Act (WEEA)*, *Jurnal Gender and Disability Diegest*, November 1999
- Forschl, Merle. et al, "Connecting Gender and Disability", dalam *Gender and Disability Digest, Womens Educational Equity Act Resource Center*, November 1999, hlm: 1150
- Gillborn, David. "Intersectionality, Critical Race Theory, and the Primacy of Racism: Race, Class, Gender, and Disability in Education, *SAGE*, vol21(3) 277-287, 2015
- Ghaly, Mohammed. "Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence", Disertasi, Leiden: Universiteit Leiden, 2008 dalam Sri Handayani, Difabel dalam AlQur'an, *INKLUSI: Jurnal of Disability Studies*, Vol 3 no 2 Juli-Desember 2016, h.267-284
- Gerschick, Thomas. "Towards a Theory of Disability and Gender," *Journal of Women and Culture Society*, 25 (4) 2000op. cit., hlm. 1263-1269.
- Handayani, Sri. Difabel dalam Al-Qur'an, *INKLUSI: Jurnal of Disability Studies*, Vol 3 no 2 Juli-Desember 2016, h.267-284
- Hastuti dkk, Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, *Kertas Kerja The SMERU Reasearch Institut*, April 2020, hlm.22

- Hewett dan Frenk D, *The Emotionally Child in The Classroom Disorders* (USA: Ellyn and Bacon, Inc, 1968), 9. Dalam Wari Setiawan, *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam dan Habit Information pada Anak Berkebutuhan Khusus di Tangerang Selatan*, *Indo-Islamika*, Volume 7 No.1 Januari-Juni 2017, hlm.56
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.
- Jacqueline, “Moodley dan Lauren Graham dengan tema “The importance of Intersectionality in Disability and Gender Studies”, *Agenda* 104/29.2 2015. Hlm.24-33
- Jurnal Perempuan, edisi 56 bulan Februari tahun 2010
- Kara, E. (2008). Parents having mentally retarded children and their assesment of their children’s situation in terms of religion]. *Ondokuz Mayis University Faculty of Theology Journal*, 26 (26-27), 317–331. Retrieved from <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuifd/article/view/5000073390/5000067649>, dalam Osman Hatun, Fazilet Yavuz-Birben, Zepnep Ince & Gulay Kalkan Yeni, *The Ticket to Heaven: A Spiritual Resource for Coping with Disability*, *Journal of SRPIRITUALPSIKOLOGI AND COUNSELING*, 2016, hlm:211
- Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 9. General Assemy. 2006
- Komardjaja, Inge. Mencari Ruang Untuk Difabel, “Perempuan Peyandang Cacat dan Lingkungan Binaan yang Penuh Hambatan”, *Jurnal Perempuan*, edisi 56, Februari 2010, hlm. 31-33
- Lagerwall, A. Ellamaa, L. Karu, M. Muklane, dan T. Talvik, *Procedings of the International Conference on Rehabilitation of Disabled Children: Present State and Future Trends*. Tallin, Estonia 12–26 Agustus 1989 (Estonia: Tartu University, 1991), hlm. 10-12

- Lailiyah, A. “Jika Pihak Sekolah Menolak Difabel”. In: Salim, I., and Syafi’ie, M. (eds) *Hidup dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: SIGAB. 2015, hlm.126-146.
- Maftuhin, Arif. Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas, *INKLUSI Journal of Disability Studies*, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2016
- Maysa S. Bazna, Ed.D., & Tarek A. Hatab, P.E. Disability in the qur’an: the islamic alternative to defining, viewing, and relating to disability
- Millati, Sofiana. Social Relational Model dalam undang- undang penyandang disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016, hlm.286-292
- Milles. M, “ISLAM, DISABILITY & DEAFNESS”: a modern and historical bibliography, *Journal with introduction and annotation*, West Midlands, UK. July 2007
- Mernissi, Fatima. dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Alih bahasa oleh Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarta, Cet. I, 1996.
- Morris, J. “Gender and Disability”, dalam John Swain, Vic Finkelstein, Sally French, dan Mike Oliver (peny.), *Disabling Barriers-Enabling Environments*, London, Thousand oaks, New Delhi: *Sage Publications*, 1998), hlm. 85-95.
- Morris, Jenny Feminis, *Gender and Disability, Text of a paper presented at a seminar in Sydney, Australia*: February 1998
- Nurhaeni, I Reformasi Kebijakan Pendidikan menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender (Surakarta: *UNS Press*, 2009), hlm. 60
- Opcid, Hastuti dkk, *Kendala mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Kestas Kerja The SMERU Research Institut*, April 2020, hlm.22

- Parker, Gillian. C Grebe, M Hirst, M Hendey, G Pascall, Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market (*University of York: Social Policy Research Unit*, 2008), hlm. 27.
- Parker, G. C. Grebe, M. Hirst, M. Hendey, G. Pascall, Double Discrimination? Gender and Disability in Access to the Labour Market, (*University of York: Social Policy Research Unit*, 2008), hlm. 27.
- Patricia Welch, *Applying the Capabilities Approach in Examining Disability, Poverty and Gender*, Conference Proceeding-Promoting Women's Capabilities examining Nussbaum's Capabilities Approach ,2002 von Hugel Intitute St Edmund College Cambridge.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
- Prasetyo, Jend Franciscus Adi. Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah dan Tantangan, *Buletin Jendela*, Semester 2 tahun 2014, hlm. 35
- Purwanta, Sedia Adi. *Pendidikan Inklusi, Ideologisasi dan Sosialisasi*, Makalah, hal.2
- Reindal, S. M. A Social Relational Model of Disability: A Theoretical Framework for Special Needs Education?. *European Journal of Special Needs Education*, 23(2), 2008, hlm.135-146
- Ro'fah Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review. *Jurnal Difabel*, 2(1), 2015, h.137-160.
- Schmidt, S & Venet, M. (2012). Principals Facing Inclusive Schooling or Integration. *Canadian Journal of Education* 35, 1 :217-238.
- Setiarini, Dewi. dkk, "Katan dan Makna", *Jurnal Perempuan*, edisi ke 65, Februari 2010, hlm. 176.

- Stone, John H. Culture and Disability, Providing Culturally Competent Services. The State University of New York, Multi Cultural Aspects of Counseling Series 21, London, New Delhi: *Sage Publications*, 2005, hlm. 119-149
- Susenas PBS, *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester 2, 2014.
- Sukanda, Rosyikin Pemanfaatan Asset Based Community Development bagi Disabilitas, *PEKSOS Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 15 No 1 Juni 2016, hlm 30-43
- Tamoto, Nisa. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD, *Humanitas Ondonesia Psychological Journal*, Juli 2016, hlm 56
- Thohari, Slamet & Rahmad Gustomy, World Health Organization/WHO, 2001 dalam Cleoputri Yusanti, Stop Ableism: Reduksi Stigma Kepada Penyandang Disabilitas melalui intervensi Bias Imprilit, *Jurnal Psikologi*, Volume 43 Nomor 1, 2016: 1-15
- Umar, Munirwan. "Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak," *Jurnal Ilmiah Edukasi* Vol 1, Nomor 1, (Juni 2015), 20.
- Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) (1976) Fundamental Principles of Disability. London, Union of the Physically Impaired Against Segregation. Dalam Sofiana Millati, Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol.3 No2 Juli-Desember 2016, h.285-304
- Wagiran, Butir-butir Pemikiran Pengembangan Pendidikan Vokasi Secara Holistik. Universitas Negeri Padang, 2008 dalam Haryanti: Haryanti, R.H., 2018, February. People with Disability in Vocational High Schools: between School and Work. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 306, No. 1, p. 012105). IOP Publishing.

Wartono, Pelaksanaan Model Pendidikan Inklusi di Sekolah Wilayah, *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, D.I.Yogyakarta. Vol1/No.1, Oktober 2016. hlm.209-2010

Welch, Patricia. "Applying the Capabilities Approach in Examining Disability, Poverty, and Gender", dalam acara Conference Proceeding-Promoting Women's Capabilities examining Nussbaum's Capabilities Approach di von Hugel Intitute St Edmund College Cambridge pada 2002, hlm. 23

Wicaksono,Tio Tegas dkk, Pelayanan Umum Kereta Api di Yogyakarta bagi Difabel, *Jurnal INKLUSI: Jurnal of Disability Studis*, Vol 6 No 1, Januari-Juni 2019, hlm 48

Yamanashi, Julie Women. Disability and Mental Distrees, Routledge, *International Journal of Disability, Develoment and Education*, 2017, hlm 1-5

Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiri,California: *Sage Publications*, Inc., 1985), hlm. 70-91.

WEB

Adminaprilia, Tugas Pokok Guru Pendamping Khusus Kota Yogyakarta,
<https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/9140>, 31 Januari 2020, diakses pada 4 September 2020

Aditya, Ivan. Membangun Inklusi Desa, www.krjogja.com, 9 Januari 2017, diakses 10 September 2020

Agus Sri dan Ajiwan Arif, Akese Pendidikan Formal Penting Bagi Difabel: Program Kejar Paket jadi Solusi Hambatan Batasan Usia, www.solider.id, 11 September 2019, diakses tanggal 28 Agustus 2019

Astuti, Puji. Difabel Pengusaha Butuh Pasar, www.solider.id, 12 April 2018, diakses 5 September 2020

- 'Aisyiyah, Fikih Difabel Usaha Muhamamdiyah dalam Membela hak-hak Difabel, www.aisyiyah.or.id, 20 Januari 2020, diakses tanggal 10 September 2020
- Arif, Ajiwan, Pendidikan vokasi untuk difabel jangan terjebak stigma pekerjaan, www.solider.id, 18 Juli 2019, diakses tanggal 14 Agustus 2020
- Barnes,C., & Mercer,G.(1995). "*Disabled People and community participation*". In G Caig & M.Mayo (Eds), *Community and empowerment: A reader in participation and development A reader in participation and development* (pp.33-45).London:Zed Books
- BBC. News Ouch First there was racism and sexism, now there's ableism. 16 Juni 2014, Diunduh dari: <http://www.bbc.com/news/blogs-ouch-27840472>, tanggal 11 Agustus 2020.
- Ciqal-MAMPU, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Disabilitas bersama DPRD, www.mampu.or.id, 28 Juni 2018, diakses 10 September 2020
- Disability Awareness in Action. Social Model or Unsociable Muddle? http://www.daa.org.uk/social_model.html
- Didi Tarsidi, *Penyandang Ketunaan istilah Pengganti Penyandang Disabilitas* dalam www.pertuni.idp-europe.org. diakses 28 Oktober 2013. Yang Selanjutnya menjadi Komite Advokasi Penyandang Disabilitas Indonesia
- Harsono, Fitri Haryanti Penyandang Disabilitas Sulit Peroleh Alat Bantu dari Pemerintah, www.liputan6.com, 20 Agustus 2019, diakses tanggal 7 September 2020
- Harta Nining Wijaya dan Ajiwan Arief, 114 GPK untuk Pendidikan Inklusif di Yogyakarta, Komite Disabilitas, www.komitedisabilitasdiy.blogspot.com, Tugas Fungsi Komite Disabilitas DIY, maret 2015, diakses pada Kamis, 23 Agustus 2020. www.solider.id, 20 Mei 2020, diakses 5 September 2020.

- MAMPU, Program MAMPU adakan sesi berbagi Pengetahuan tentang Disabilitas, www.mampu.or.id, 7 September 2018, diakses tanggal 10 September 2020
- Marcoes, Lies. Gender dan Disabilitas Dua sisi mata Uang yang sama, www.magdalene.com. 6 Oktober, 2020, diakses tanggal 7 oktober 2020
- Nasution,S. *Metode Research* Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara
- Ro'fah, Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas : Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas, www.rahma.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020
- Saez, A. What is a Shadow Teacher?, www.classroom.synonym.com. diakses pada 13 Februari 2017
- Solider, Isu Disabilitas Harus Dijadikan Gerakan Bersama bagi NGO, www.solider.or.id, diakses 10 September 2020
- Tribun Jogja, www.tribunnews.com. Sejumlah Wali Siswa ABK di Yogyakarta Masih Kesulitan Cari Sekolah, Juli 2019, diakses tanggal 8 September 2019
- Tri, SOSIALISASI JAMKESUS TERPADU DI YOGYA MINIM-Bantuan Alat Bantu Disabilitas Belum Merata, www.harianmerapi.com, 1 November 2018, diakses 7 September 2020
- Tyas, Kertaning. Peran Orangtua dan Masyarakat serta Hak Anak Difabel dalam Advokasi Pendidikan www.solider.id, 22 September 2017, diakses tanggal 14 Agustus 2020
- Wardayah, Didik. dalam *Jogjapolitan*, www.harianjogja.com. Ribuan Anak Berkebutuhan Khusus d DIY tidak Sekolah, diakses tanggal 8 September 2019
- Wicaksono,Tio Tegar Menilik Pelayan Publik bagi Difabel dalam Prinsip Pemerintahan yang Baik, www.solider.id, 4 Juli 2019, diakses tanggal 14 Agustus 2020

Wikantosa, Bitu. dalam Ajiwan Arif, Parameter wujudkan Desa Inklusif, www.solider.id, 4 Juli 2020, diakses 10 September 2020

www.sapdajogja.org, diakses tanggal 29 Maret 2014

www.sapdajogja.org, diakses tanggal 29 Maret 2014

www.radarjogja.jawapost.com, 1692 Anak Penyandang Disabilitas Tidak Sekolah, 27 April 2018, diakses 22 Agustus 2020

www.mpm.muhammadiyah.or.id, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

www.republika.id, Mensos Mengakui Sarana dan Prasarana Difabel Minim, Jum'at 30 November 2018, diakses tanggal 31 Agustus 2020

Yuda, Pendidikan Vokasi untuk Difabel Jangan Terjebak Stigma Pekerjaan, www.solider.id, 18 Juli 2019, diakses tanggal 21 Agustus 2020

Peraturan dan Undang-undang

Perda Kota Yogyakarta No4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, BAB VI bagian kedua pasal 19

Perda Gunungkidul No 9 tahun 1916 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandnag Disabilitas BAB II pasal 4

Perda Bantul no 11 tahun 2015, tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, BAB II bagian ke dua pasal 3,4,5

Perda Sleman No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pemenuhan Hak-hak Hidup Penyandang Disabilitas, BAB II, bagain kedua, pasal 7 dan 8

Perda Kulonprogo No 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, BAB II bagian ke tidga pasal 9 dan 14

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Perda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Perda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang No. 9 Tahun 2016. (keterangan lebih jelas tentang isi perda-perda dapat dilihat dalam Lampiran 1).

Perda DIY No4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, BAB II, bagian kedua, pasal 10

Perda Kota Yogyakarta No 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, BAB II, bagian kedua, pasal 22

Perda Kota Yogyakarta No 4 tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, BAB II, bagian kedua

Purusotam N, “Between Cimpliance and Resitance: Woman and The Middle Class Way of Life in Singapore”, dalam Krishna Sen & Maila Stivens (peny.), *Gender and Power in Affulen Asia* (London & New York: Routledge, 1998), hlm. 127 dan 166.

Peraturan Daeran No 4 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta, tahun 2019

Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 Pasal 1 angka 2 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang, 2003) UU NO.4/1997 pasal 10 tentang Penyandang disabilitas.

- Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas .pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan RPD.pdf, diakses dalam www.bpkp.go.id. Diakses pada 29 Oktober 2013
- Undang-Undang republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan CRPD.pdf, diakses dalam www.bpkp.go.id. 29 Oktober 2013.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pdf.
- UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagian keenam tentang Hak Pendidikan pasal 10, hlm 11
- UU Pendidikan No 20 Tahun 2003 dalam Marjuki (t.t). Penyandang penyandang disabilitas berdasarkan Klasifikasi ICF. Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan, Kemensos RI.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutnya dengan Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No 8 tahun 2016 Bagian ketiga tentang pendidikan pasal 40, halaman 25
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 dalam Cleoputri Yusanti, Slamet Thohari & Rahmad Gustomy, Stop Ableism: Reduksi Stigma Kepada Penyandang Disabilitas melalui intervensi Bias Imprilit, Jurnal Psikologi, Volume 43 Nomor 1, 2016: 1-15



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Islamiyatur Rokhmah, S.Ag.,M.SI
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
NIP/ NIDN : 12.09.150 / 0514057801
Tempat Tanggal Lahir : 14 Mei 1978
Alamat Rumah : Kadipiro RT 08, RW 13, No 229 Ngestiharjo
Kasihani Bantul Yogyakarta
Telp/HP : 0818461118
Alamat Kantor : Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Jalan
Ringroad Barat no.63 Mlangi, Nogotirto,
Gamping, Sleman,
Telp/Fax : (0274) 4469199, Fax.: (0274) 4469204
Email : islamalrin@gmail.com,
islamiyatur.rokhmah@unisayogya.ac.id
Nama Ayah : Muslim Ponidi
Nama Ibu : Fatimah
Suami : Burhan Marwanto
Anak : 1. Alpin Fathu Nugroho
2. Rinjani Grace Tsaniah
3. Acensorekta Amadya Akhiroh

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Wirobrajan II Yogyakarta 1990
2. SLTP Madrasah Mu'allimat Muhamamdiyah Yogyakarta 1993
3. SLTA Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta 1996
4. Sarjana Pendidikan Agama Islam, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2001
5. Magister Pemikiran Pendidikan Islam, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2007
6. Program Doktorat Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Pimpinan Pusat Ikatan Remama Muhamamdiyah (PP IRM)1996-2001
2. Direktur ALIFAH PP IRM 2000-2001
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1997-1998

4. Pendidikan Anak-Anak Masjid Syuhada' Yogyakarta (PAMS) 1997-2000
5. Anggota Jurnalis PARADIGMA Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1997-1998
6. LSM Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) 2001-2002
7. Solidaritas Perempuan Kinasih 2001-2005
8. Anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah 2006-2010
9. Anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2011
10. Anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah Pimpinan Pusat 'Aisyiyah 2010-sekarang

Pengalaman Short Courses dan exchange

1. Program Pertukaran Community Organizer Yogyakarta Indonesia – Luthon England United Kingdom kerjasama Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan British Council, 1th-30th November 2008.
2. MAMPU Short Course Australia Award Organizational Leadership and Management Practice for Non-Government Organization Empowering Women Leadership Training Course At the Sydney Southeast Asia Centre University of Sydney, 15th-27th March 2015.

Pengalaman Penelitian

1. Tim Peneliti Indeks Demokrasi Indonesia, Jaringan Pendidikan Politik untuk Rakyat (JPPR) dengan UNDP 2007-2008
2. Need Assesment Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Serang Profinsi Banten tahun 2010, PP 'Aisyiyah dan The Asia Foundation (TAF)
3. Need Assesment Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Kabupaten Bantul Yogyakarta 2011, PP 'Aisyiyah dan The Asia Foundation (TAF)
4. Penguatan Kepemimpinan Lokal Perempuan untuk Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Tegal Jawa Tengah, Cirebon Jawa Barat, Takalar Sulawesi Selatan, Sambas Kalimantan Barat, Magelang Jawa Tengah pada tahun 2012-2016, PP 'Aisyiyah dengan MAMPU DFAD AUSAID

5. Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Perempuan Difabel (Tuna Grahita) di SLB Negeri 2 Yogyakarta tahun 2014, LPPM UNISA
6. Sunat Perempuan dalam Perspektif Agama, Budaya dan Kesehatan tahun 2014 KEMENRISTEK DIKTI
7. Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam: Kajian Ayat-ayat Kebidanan tahun 2016, LPPM UNISA
8. Pernikahan dini dalam Perspektif Agama dan Kesehatan: Studi Kasus di Kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta tahun 2016, LPPM UNISA
9. Studi Perbandingan Advokasi Disabilitas oleh Organisasi Keagamaan : YAKKUM, YAKETUNIS dan MPM PPMuhammadiyah 2017, DIKTI PP Muhammadiyah
10. Interfensi Kesiapan ibu berbasis Spiritual Terhadap Maternal Confident pada ibu Muda di kecamatan Dukun Magelang Jawa Tengah 2018, LPPM UNISA
11. Pengaruh Literasi Keuangan pada Penguatan Ekonomi Keluarga Pasangan Nikah Muda : Study Kasus PASUTRI yang telah mendapatkan BIMWIN di Kecamatan Dukun Magelang Jawa Tengah tahun 2019, LPPM UNISA
12. Perkaderan dimasa Pandemi Covid-19: Studi Refleksi Baitul Arqom dan Pesantren Pemimpin Muda di UNISA Yogyakarta, DIKTI PP Muhammadiyah, 2020

Pengalaman Pengabdian Masyarakat

1. Pelatihan Sadar Gender untuk Remaja ALIFAH PP IRM dengan TAF 1999-2000
2. Pendampingan Anak Jananan LSPPA dengan ADB 2000-2001
3. Pendampingan Buruh Migran Perempuan dan TKW di Kebumen Jawa Tengah Solidaritas Perempuan Kinasih dengan PLAN Internasional 2001-2003
4. Politik Perempuan Perempuan Pilih Program Perempuan Solidaritas perempuan C for VC UN EROPA 2003-2005
5. Jaringan Pendidikan Politik Untuk Rakyat (JPPR) PP Nasyitaul 'Aisyiyah dengan TAF 2008-2010
6. Pelatihan Fasilitator Kesehatan Reproduksi di Yogyakarta PP Aisyiyah dengan TAF 2010
7. Pelatihan Advokasi JAMPERSAL dan Kesehatan Reproduksi di Yogyakarta PP 'Aisyiyah dengan PROREP USAID 2011
8. Pelatihan Penguatan Ekonomi bagi Remaja Perempuan di Magelang dan Klaten Jawa Tengah PP 'Aisyiyah dan Global Fund For Children (GFC) 2012

9. Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Difabel di SLB Negeri I Bantul Yogyakarta 2016 LPPM UNISA
10. Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Anak di SD Muhammadiyah Wirobrajan II Yogyakarta 2017 LPPM UNISA
11. Pelatihan dan Pendampingan Kepemimpinan dan Kesehatan reproduksi di Bantaeng Sulawesi Selatan, Tegal Jawa Tengah, Lamongan Jawa Timur, Sambas Kalimantan Barat, dan Magelang Jawa Tengah PP 'Aisyiyah dan MAMPU DFAD AUSAID 2013-2018
12. Pelatihan Digital Marketing bagi Difabel di Kecamatan Ngemplak Sleman Yogyakarta tahun 2018 LPPM UNISA
13. Pemberdayaan Kesehatan reproduksi dan Ekonomi bagi Keluarga Muda di Kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta 2018 LPPA PP 'Aisyiyah dengan LAZISMU

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi

1. Pemetaan Kesehatan Reproduksi di Tegal Jawa Tengah, Prosiding STIKES 'Aisyiyah 2014
2. Identifikasi Kebutuhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Perempuan Difabel (Tuga Grahita) di SLB Negero 2 Yogyakarta, Jurnal Kebidanan Universitas Muhammadiyah Semarang 2015
3. Sunnat Perempuan dalam Perspektif Agama, Budaya dan Kesehatan, Jurnal Kebidanan dan Keperawatan UNISA <http://ejournal.say.ac.id/ejournal/index.php/jkk/article/view/85>, 2016
4. Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam: Kajian Ayat-ayat Kebidanan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan UNISA 2016
5. Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Kesehatan. Study kasus di kecamatan Dlingo Bantul Yogyakarta Prosiding UNISA 2017
6. Semakin Rendah Pendidikan Perempuan Penyandang Disabilitas Semakin Rentan Kehilangan Pekerjaan saat Pandemi Covid-19: Gender, Disabilitas dan Intersection, Harian Jogja 2020
7. Penguatan Kelompok Usaha Micro Difabel berbasis Digital Marketing di Komunitas dampingan JANGER Wedomartani Sleman Yogyakarta, Prosiding The ¹¹ University Research Colloquium (URECOL), University 'Aisyiyah Yogyakarta, 2020

Pengalaman Penulisan Buku

1. Buku Modul Pendidikan Sadar Gender untuk Remaja ALIFAH PP IRM 2000

2. Peran Perempuan dalam Musrenbang LPPA PP 'Aisyiyah 2010
3. Modul Pelatihan Advokasi Kesehatan Reproduksi LPPA PP 'Aisyiyah 2012
4. Modul Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja Difabel LPPM UNISA 2015
5. Hikmah CORONA di Bulan Ramadhan untuk mencintai BUMI dalam buku UNISA Menulis Pada Masa Pandemi Covid-19, UNISA Yogyakarta 2020
6. Editor buku Panduan Baca Alqur'an AL-Yusra LPPI UNISA Yogyakarta 2021

Yogyakarta, 18 Februari 2021



Islamiyatur Rokhmah, S.Ag., MSI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA